

LAPORAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG,
SERTA CAPAIAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TRIWULAN I 2025



**MENGAKSELERASI TRANSFORMASI DAN MEMPERKUAT
RESPONS KEBIJAKAN UNTUK STABILITAS DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN**



LAPORAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN
WEWENANG, SERTA CAPAIAN PROGRAM DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Triwulan I 2025

Laporan Kelembagaan Bank Indonesia - Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang, serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia adalah laporan kinerja kelembagaan yang disusun sebagai pemenuhan kewajiban akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	viii

BAB 1 Kelembagaan Bank Indonesia **1**

1.1.	Profil Bank Indonesia	2
1.2.	Dewan Gubernur Bank Indonesia	3
1.3.	Organisasi Bank Indonesia	10
1.4.	Daftar Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia	12

BAB 2 Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia **19**

2.1.	Lingkungan Strategis Perekonomian Global dan Nasional	20
2.2.	Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan	23

BAB 3 Respons Kebijakan Bank Indonesia **27**

3.1.	<i>Stance</i> Kebijakan Bank Indonesia	28
3.2.	Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia	29
Boks 1.	Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2024	30

BAB 4 Transformasi Bank Indonesia **33**

4.1.	Transformasi Kebijakan	34
4.2.	Transformasi Organisasi dan Proses Kerja	40
4.3.	Transformasi SDM dan Budaya Kerja	42
4.4.	Transformasi Digital	43

PS 01	Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter dan Bauran Kebijakan Bank Indonesia secara Berkelanjutan, Konsisten, dan Transparan untuk Mencapai Stabilitas Nilai Rupiah dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	48
PS 02	Memperkuat Sinergi Bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan Kebijakan Fiskal dan Reformasi Struktural Pemerintah dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	51
Boks 2.	<i>High Level Meeting</i> (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Tahun 2025	52
PS 03	Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan serta Surveilans Makroprudensial untuk Turut Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	54
Boks 3.	Peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 44	55
PS 04	Memperkuat Sinergi Kebijakan dan Pengawasan Makroprudensial dengan KSSK dan Otoritas Terkait untuk Turut Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	56
PS 05	Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran, serta Pelindungan Konsumen, untuk Memelihara Stabilitas Sistem Pembayaran dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	59
Boks 4.	Peluncuran QRIS TAP	60
Boks 5.	Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2025	62
PS 06	Memperkuat Sinergi Kebijakan, Pengawasan, dan Pelindungan Konsumen antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan Otoritas Terkait untuk Percepatan Ekonomi dan Keuangan Digital dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	64
PS 07	Mengatur, Mengawasi, dan Mengembangkan Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing untuk Mendukung Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia serta Memperkuat Sinergi dengan Otoritas Terkait untuk Pengembangan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Ekonomi	66
Boks 6.	Penandatanganan BAST dan NK Bappebti, Bank Indonesia, dan OJK	68
PS 08	Merumuskan Kebijakan dan Implementasi Pengembangan Ekonomi-Kuangan Inklusif dan Hijau baik secara Konvensional maupun Berdasarkan Prinsip Syariah serta Memperkuat Sinergi dan Koordinasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	70
Boks 7.	Peluncuran Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2024, <i>Kick Off</i> Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2025 & <i>Sharia Economic and Financial Outlook</i> (ShEFO) 2025	71
PS 09	Merumuskan Kebijakan dan Melaksanakan Kerja Sama Internasional dengan Bank Sentral, Organisasi, dan Lembaga Internasional untuk Mendukung Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia serta Bersinergi dengan Pemerintah dan Otoritas Lain dalam rangka Memperjuangkan Kepentingan Nasional	74
Boks 8.	The 29 th ASEAN Senior Level Committee (SLC) Meeting 2025	77
PS 10	Merumuskan dan Implementasi Bauran Kebijakan Kelembagaan dengan Kepemimpinan Profesional dan Tata Kelola yang Baik untuk Mencapai Kinerja Unggul	79
PS 11	Merumuskan dan Implementasi Kebijakan Komunikasi dan Pengaturan Hukum untuk Memperkuat Akuntabilitas, Transparansi, dan Kredibilitas Bank Indonesia	81
PS 12	Merencanakan, Mengembangkan, dan Mengelola Aset Fisik dan Aset Sistem Informasi yang Terintegrasi dengan Pengadaan dan Pengelolaan Program untuk Mendukung Pencapaian Kinerja Kelembagaan Optimal	82

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Bank Indonesia dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia periode triwulan I 2025. Sebagai bagian dari Laporan Kelembagaan Bank Indonesia, laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Laporan ini disusun sebagai perwujudan dari komitmen Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral yang kredibel dalam mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan taat asas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada triwulan I 2025, ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang makin luas. Pertumbuhan ekonomi AS dan negara-negara lain seperti Eropa, Jepang, dan India diperkirakan melambat, sedangkan pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok relatif tertahan. Di pasar keuangan global, ketidakpastian masih berlanjut diwarnai oleh penurunan *yield* US *Treasury*, melemahnya indeks mata uang dolar AS (DXY), dan pergeseran aliran modal global menuju komoditas dan obligasi di negara maju dan negara berkembang. Sementara itu, portofolio investasi saham masih terkonsentrasi ke negara maju kecuali AS, dan belum masuk ke negara *Emerging Market* (EM). Kondisi ini memerlukan respons kebijakan yang tepat dan terkoordinasi guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Di tengah dinamika ketidakpastian global yang tinggi dan tantangan perekonomian nasional yang dihadapi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 masih tetap baik dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,87%. Hal tersebut didukung oleh upaya Bank Indonesia dalam memperkuat respons bauran kebijakan Bank Indonesia dan sinergi erat bersama Pemerintah dan

mitra kerja lainnya dalam menjaga kinerja perekonomian nasional dari dampak rambatan global. Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Pergerakan Rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi domestik dalam menjaga stabilitas perekonomian. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret 2025 juga tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian.

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis global dan domestik tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan berkelanjutan, bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2025 akan diarahkan pada keseimbangan untuk menjaga stabilitas, dengan tetap mencermati ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (*"pro-stability and growth"*). Sejalan dengan itu, pada triwulan I 2025 Bank Indonesia menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75% yaitu pada RDG Bulanan Januari 2025 dan dipertahankan sampai April 2025. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah makin meningkatnya ketidakpastian global, serta untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah diperkuat pada 1 April 2025 untuk lebih mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita. Kebijakan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui keandalan infrastruktur dan struktur industri, serta memperluas akseptasi pembayaran digital.

Pada triwulan I 2025, transformasi kebijakan terus diperkuat untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia, di tengah tantangan dinamika lingkungan

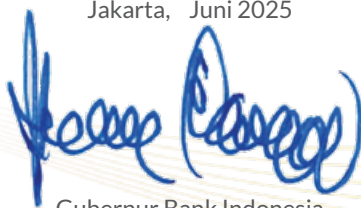
strategis yang dihadapi. Penyempurnaan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia termasuk pengaturan lanjutan atas implementasi UU P2SK diwujudkan melalui penerbitan sejumlah Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI), serta berbagai ketentuan internal di area kebijakan. Selain itu, Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka manajemen krisis melalui pengembangan Protokol Manajemen Krisis (PMK) terintegrasi, mengembangkan BI-Digital Innovation Center (BIDIC), serta mendorong konektivitas lintas negara melalui partisipasi Bank Indonesia dalam Proyek Nexus. Di area kelembagaan, Bank Indonesia memperkuat fondasi kelembagaan melalui penerbitan ketentuan internal tentang Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK) dan berbagai ketentuan turunannya. Sebagai bagian dari transformasi di area SDM, pada triwulan I 2025 telah diluncurkan aplikasi *HR Super Apps* sebagai *platform* terintegrasi untuk mempermudah pegawai dalam merencanakan karier, meningkatkan kinerja, mengembangkan kompetensi, dan menjaga kesehatan secara berkelanjutan.

Di tengah beratnya tantangan lingkungan strategis yang dihadapi, Bank Indonesia dapat mencapai berbagai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan untuk triwulan I 2025 sesuai tahapannya, didukung pelaksanaan

berbagai inisiatif transformasi dan respons kebijakan. Capaian ini menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh penajaman sejumlah agenda transformasi, baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Penerapan kebijakan yang konsisten dan bertata kelola, inovasi yang berkelanjutan, serta eratnya sinergi yang dilakukan sepanjang triwulan I 2025 telah menghasilkan persepsi yang positif dari mitra kerja, termasuk sejumlah pengakuan dan penghargaan internasional.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak sehingga Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas mulia dalam menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami berharap Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang, serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia periode triwulan I 2025 ini dapat menjadi rujukan terpercaya bagi masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam menyusun langkah bersama untuk memajukan perekonomian Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan keberkahan, kesempurnaan, dan kemudahan bagi setiap langkah kita untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional.

Jakarta, Juni 2025



Gubernur Bank Indonesia

Perry Warjiyo



AIDA S. BUDIMAN
Deputi Gubernur

DONI PRIMANTO JOEWONO
Deputi Gubernur

PERRY WARJIYO
Gubernur



FILIANINGSIH HENDARTA
Deputi Gubernur

JUDA AGUNG
Deputi Gubernur

DESTRY DAMAYANTI
Deputi Gubernur Senior

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia

Pada triwulan I 2025, ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang makin luas. Hal ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi AS dan negara-negara lain, seperti Eropa, Jepang, dan India. Sementara itu, pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai akibat kebijakan tarif impor AS tertahan berkat dukungan kebijakan pelebaran defisit fiskal 2025 dari yang ditargetkan. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia untuk keseluruhan 2025 diperkirakan akan tertahan pada angka 3,2%.

Di pasar keuangan global, ketidakpastian masih berlanjut diwarnai oleh penurunan *yield* US Treasury, melemahnya indeks mata uang dolar AS (DXY), dan pergeseran aliran modal global menuju komoditas dan obligasi di negara maju dan negara berkembang. Sementara itu, portofolio investasi saham masih terkonsentrasi ke negara maju kecuali AS, dan belum masuk ke negara *Emerging Market* (EM). Kondisi ini memerlukan respons kebijakan yang tepat dan terkoordinasi guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Berbagai lembaga internasional, seperti European Central Bank (ECB), International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), mengonfirmasi bahwa perekonomian global triwulan I 2025 masih diwarnai ketidakpastian tinggi, perlambatan pertumbuhan, tekanan inflasi yang berlanjut, serta fragmentasi ekonomi global akibat eskalasi ketegangan geopolitik dan ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional.

Semakin tingginya ketidakpastian global tersebut tentunya menimbulkan risiko terhadap kinerja perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga, termasuk Asian Development Bank (ADB), menyimpulkan bahwa perekonomian Indonesia pada

triwulan I 2025 menghadapi tantangan yang tidak ringan. Perekonomian domestik menghadapi risiko pelemahan daya beli, tekanan terhadap persepsi pasar, serta dampak kenaikan tensi geopolitik dan perang tarif global terhadap ekspor dan arus modal. Untuk menghadapinya, Pemerintah menekankan pentingnya efisiensi, stabilitas, dan sinergi kebijakan untuk menjaga kinerja perekonomian dari dampak rambatan global.

Di tengah tingginya tantangan ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tetap baik. Ekonomi Indonesia triwulan I 2025 masih mampu tumbuh cukup tinggi sebesar 4,87% (yoy), meskipun lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Perkembangan ini ditopang oleh kegiatan ekonomi domestik, khususnya selama periode libur tahun baru dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, serta kinerja ekspor yang positif. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik dimana posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2025 tercatat tinggi sebesar 157,1 miliar dolar AS. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat, nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Nilai tukar Rupiah pada akhir triwulan I 2025 tercatat Rp16.560 per dolar AS atau melemah secara terbatas sebesar 2,81% (ytd) dibandingkan dengan akhir triwulan IV 2024. Bank Indonesia terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi, termasuk intervensi terukur di pasar *off-shore NDF* dan strategi *triple intervention* pada transaksi *spot*, DNDF, dan SBN di pasar sekunder. Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter *pro-market* melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Pada Maret 2025, inflasi IHK tercatat 1,03% (yoy), lebih rendah daripada Desember 2024 sebesar 1,57% (yoy).

Lebih lanjut, transmisi kebijakan moneter tetap baik di tengah kenaikan risiko dari dinamika global. Sejalan dengan penurunan BI-Rate pada Januari 2025 dan operasi moneter yang ditempuh Bank Indonesia, suku bunga pasar uang mengalami penurunan. Ada pun suku bunga perbankan tercatat rendah ditopang oleh kecukupan likuiditas perbankan sejalan dengan implementasi penguatan KLM serta publikasi transparansi SBDK. Likuiditas yang cukup tersebut mampu meningkatkan efisiensi pembentukan suku bunga perbankan sehingga mendukung penyaluran kredit perbankan. Di tengah berbagai dampak perang tarif AS dan potensi perlambatan ekonomi domestik yang dapat mempengaruhi pembiayaan perbankan, kredit perbankan tetap tumbuh positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada Maret 2025, kredit perbankan masih tumbuh 9,16% (yoy), meskipun lebih rendah daripada Februari 2025 yang tercatat 10,30% (yoy). Ke depan, berbagai risiko ketidakpastian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi prospek permintaan kredit dan preferensi penempatan aset likuid perbankan.

Pada triwulan I 2025, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital terus mencatat pertumbuhan positif seiring terjaganya sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Volume transaksi digital mencapai 10,76 miliar atau tumbuh 33,50% (yoy), didukung oleh peningkatan penggunaan aplikasi *mobile*, internet, dan QRIS. Di sisi infrastruktur, transaksi BI-FAST tumbuh 57,68% (yoy) menjadi 1,07 miliar, sementara transaksi BI-RTGS naik 0,69% (yoy) dengan nilai mencapai Rp46.281,21 triliun. Pengelolaan uang Rupiah juga menunjukkan kinerja positif, dengan pertumbuhan Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) sebesar 15,51% (yoy).

Selain dinamika perekonomian global dan nasional, Bank Indonesia juga mencermati perubahan lingkungan strategis yang memerlukan penguatan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan. Sinergi bauran kebijakan

bank sentral, khususnya antara kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial, dengan kebijakan fiskal dan sektor riil, serta kebijakan stabilitas sistem keuangan sangat dibutuhkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dari dampak perlambatan ekonomi global. Selain itu, sinergi dalam digitalisasi ekonomi keuangan nasional memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mengantisipasi risiko, termasuk peningkatan ancaman dan serangan siber di sektor keuangan. Tantangan lingkungan strategis global, domestik, dan kelembagaan yang berat tersebut memerlukan kehati-hatian dalam merumuskan respons kebijakan, termasuk perlunya untuk terus mendorong sinergi kebijakan antarotoritas, guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Respons Kebijakan Bank Indonesia

Bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2025 diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan, bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2025 akan diarahkan pada keseimbangan untuk menjaga stabilitas, dengan tetap mencermati ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (*"pro-stability and growth"*). Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (*"pro-growth"*).

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75% yaitu pada RDG Bulanan Januari 2025 dan dipertahankan sampai April 2025. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah makin meningkatnya ketidakpastian global, serta untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan BI-Rate lebih lanjut dengan

mempertimbangkan stabilitas nilai tukar Rupiah, prospek inflasi, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah diperkuat pada 1 April 2025 untuk lebih mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM. Keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran akan terus diperkuat, demikian pula akseptasi pembayaran digital akan terus diperluas.

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Sinergi dilakukan dalam 7 (tujuh) area kebijakan, yakni (i) kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam memitigasi gejolak global; (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, (iii) upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM; (iv) dukungan dalam akselerasi transformasi digital Pemerintah; (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan; (vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi; serta (vii) dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

Transformasi Bank Indonesia

Pada triwulan I 2025, transformasi kebijakan terus diperkuat untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia di tengah tantangan dinamika lingkungan strategis yang dihadapi. Penyempurnaan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia termasuk pengaturan lanjutan atas implementasi UU P2SK diwujudkan melalui penerbitan sejumlah Peraturan Bank Indonesia (PBI). Sepanjang triwulan I 2025, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No. 5 Tahun 2025 tentang Kebijakan Moneter, PBI No. 4 Tahun 2025 tentang Kebijakan Sistem Pembayaran, PBI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI)

sebagai bentuk penguatan landasan hukum pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, berbagai ketentuan internal telah diselesaikan yang mencakup ketentuan internal tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI), Kebijakan Moneter, Kebijakan Makroprudensial, Kebijakan Sistem Pembayaran, Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia, serta Kebijakan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). Selain itu, transformasi juga mencakup penguatan kerangka manajemen krisis melalui pengembangan Protokol Manajemen Krisis (PMK) terintegrasi dan pemanfaatan *suptech analytics*. Di area sistem pembayaran, Bank Indonesia mengembangkan BI-Digital Innovation Center (BIDIC) serta mendorong konektivitas lintas negara melalui partisipasi Bank Indonesia dalam Proyek Nexus.

Di area kelembagaan, pada triwulan I 2025, Bank Indonesia memperkuat fondasi kelembagaan melalui penerbitan ketentuan internal tentang Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK). BKK merupakan integrasi kebijakan kelembagaan yang meliputi kebijakan dukungan organisasi, sumber daya, dan tata kelola yang saling melengkapi dan memperkuat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa ketentuan turunan dari BKK telah diterbitkan, yakni ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai manajemen strategis dan program kerja, proses bisnis dan fungsi organisasi, manajemen risiko, audit intern, serta fungsi hukum. Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia juga menyempurnakan landasan hukum pengambilan keputusan melalui ketentuan internal tentang sistem pengambilan keputusan di Bank Indonesia dan peran Anggota Dewan Gubernur. Dari sisi penguatan proses bisnis dan fungsi organisasi, telah dilakukan penyempurnaan organisasi satuan kerja fungsi tata kelola, yang mencakup fungsi hukum, fungsi manajemen risiko, dan fungsi audit intern. Sementara itu, dari sisi transformasi SDM, telah diluncurkan aplikasi HR *Super Apps* sebagai *platform* terintegrasi untuk mempermudah pegawai dalam merencanakan karier, meningkatkan kinerja, mengembangkan kompetensi, dan menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, transformasi digital yang berfokus pada pengembangan *digital business platform*, pusat data, kapabilitas infrastruktur teknologi, serta pemanfaatan data dan AI untuk analisis kebijakan juga semakin diperkuat sepanjang triwulan I 2025.

Capaian Kinerja Bank Indonesia

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia dapat mencapai berbagai target Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tahapan yang sudah direncanakan, didukung berbagai inisiatif transformasi dan respons kebijakan di tengah beratnya tantangan lingkungan strategis global, nasional,

dan kelembagaan. Capaian ini menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh penajaman sejumlah agenda transformasi, baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Selain itu, berbagai upaya penguatan kerangka dan implementasi sistem tata kelola yang baik dan profesional juga turut mendukung pencapaian

kinerja Bank Indonesia. Penerapan kebijakan yang konsisten dan bertata kelola, inovasi yang berkelanjutan, serta eratnya sinergi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sepanjang triwulan I 2025 telah menghasilkan persepsi yang positif dari mitra kerja, termasuk sejumlah pengakuan dan penghargaan internasional.



Komplek Perkantoran Bank Indonesia (Koperbi) Jakarta

BAB 1

KELEMBAGAAN BANK INDONESIA



1.1. Profil Bank Indonesia

Status dan Kedudukan

Keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah diamanatkan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia memasuki babak baru ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada 17 Mei 1999 yang kemudian beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berlaku sejak 12 Januari 2023. Undang-undang ini memperkuat status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain.

Dalam menjalankan independensinya, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk mengutamakan prinsip tata

kelola yang baik dan profesional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Sebagai perwujudan dari tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, Bank Indonesia mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun 2023 selama 21 tahun berturut-turut sejak 2003. Hal ini merupakan pembuktian atas komitmen Bank Indonesia untuk mengelola keuangan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan menyajikan laporan keuangan yang relevan, akuntabel, dan transparan. Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia menyampaikan laporan kinerja kelembagaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden, serta memublikasikannya kepada masyarakat.

Visi

“Menjadi Bank Sentral Digital Terdepan dengan Tata Kelola Kuat, yang Berkontribusi Nyata terhadap Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara Negara Emerging Markets untuk Indonesia Maju.”

MISI

- 01 Mencapai stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 02 Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang Rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 03 Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 04 Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional.
- 05 Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing (valas), termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
- 06 Turut meningkatkan inklusi ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program Bank Indonesia.
- 07 Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Tujuan dan Tugas

Tujuan Bank Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU P2SK, adalah: (i) mencapai stabilitas nilai Rupiah; (ii) memelihara stabilitas Sistem Pembayaran; dan (iii) turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam upaya mencapai tujuan dimaksud, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta (iii) menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Kebijakan moneter Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai Rupiah. Stabilitas nilai Rupiah mencakup kestabilan harga barang dan jasa serta kestabilan nilai tukar Rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar Rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai Rupiah dalam artian inflasi yang rendah dan stabil, serta kestabilan nilai tukar Rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi secara eksplisit dan diumumkan secara transparan untuk memberikan sinyal kepada masyarakat dan pelaku pasar mengenai komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat kepercayaan publik.

Dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memastikan seluruh perangkat pengaturan, lembaga, dan mekanisme pemindahan dana berjalan lancar untuk memenuhi setiap kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Teknologi digital dan inovasi kini telah memungkinkan perkembangan sistem pembayaran yang nyaman, cepat, dan efisien serta membuka lebar peluang inklusivitas ekonomi-keuangan. Tren digitalisasi tersebut mempengaruhi sendi-sendi perekonomian, mengubah pola transaksi masyarakat, baik individu maupun korporasi, dan mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional, tidak terkecuali di sektor keuangan. Hal ini menjadi tantangan kebijakan bagi otoritas, khususnya Bank Indonesia, dalam mencari titik

keseimbangan yang tepat antara upaya mengoptimalkan peluang yang diusung oleh inovasi digital dengan upaya untuk memitigasi risiko. Oleh karena itu, Bank Indonesia menginisiasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia dan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang diharapkan dapat memberikan arah yang jelas, guna memperoleh manfaat dari digitalisasi dengan tetap menjamin terlaksananya mandat Bank Indonesia dalam pengedaran uang, moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; memitigasi dan mengelola risiko sistemik; serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan serta keuangan berkelanjutan. Dengan semakin berkembangnya sistem keuangan, Bank Indonesia terus mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan makroprudensial sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, bersama dengan kebijakan moneter dan kebijakan sistem pembayaran.

1.2. Dewan Gubernur Bank Indonesia

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas: Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan 4 (empat) hingga 7 (tujuh) Deputy Gubernur. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Gubernur menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis. Dalam kaitan ini, RDG dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Setiap anggota Dewan Gubernur mempunyai hak suara yang sama. Pengambilan keputusan oleh Dewan Gubernur di dalam RDG dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menerapkan prinsip kolektif kolegial. Keputusan Dewan Gubernur dalam RDG merupakan keputusan Bank Indonesia dan mengikat seluruh anggota Dewan Gubernur.

Saat ini Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri atas Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan 4 (empat) Deputy Gubernur dengan profil sebagai berikut:



Perry Warjiyo
Gubernur

PERRY WARJIYO menjabat kembali sebagai Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023, dan diambil sumpahnya pada 24 Mei 2023 untuk masa jabatan 2023-2028. Sebelumnya, Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 dan sebagai Deputy Gubernur untuk masa jabatan 2013-2018.

Sebelum menduduki jabatan Deputy Gubernur, Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional. Jabatan ini diembannya setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia sejak 2009. Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada Juli 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di *International Monetary Fund* (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam the *South-East Asia Voting Group* (SEAVG), yang berkedudukan di Washington DC, AS. Perry Warjiyo mempunyai karier yang panjang di Bank Indonesia sejak 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa, dan utang luar negeri.

Perry Warjiyo saat ini juga menduduki posisi sebagai *Chair of Asian Consultative Council – Bank for International*

Settlement (ACC-BIS), *Chairman of Executive Committee* (EC) – *Islamic Financial Service Board* (IFSB), Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), dan Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Selain itu, Perry Warjiyo mewakili Bank Indonesia dan Indonesia dalam Keketuaan *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan *G20 Finance Ministers and Central Bank Governors* (FMCBG) Meeting, serta di IMF, ASEAN, ASEAN+3, *Financial Stability Board* (FSB), *Islamic Development Bank* (IsDB), dan *Islamic International Liquidity Management* (IILM). Selama tahun 2020-2022, Perry Warjiyo aktif menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, di samping sebagai dosen tamu pada sejumlah universitas di dalam dan luar negeri.

Perry Warjiyo juga telah menulis dan memublikasikan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu Internasional. Salah satu bukunya, yaitu *“Central Bank Policy: Theory and Practice”* yang ditulis bersama Dr. Solikin M. Juhro, mendapat pengakuan nasional dan internasional sebagai referensi penting dalam perumusan bauran kebijakan bank sentral.

Perry Warjiyo dilahirkan di Sukoharjo pada tahun 1959. Gelar Sarjana diraih dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1982. Gelar Master dan Ph.D. di bidang Moneter dan Keuangan Internasional diperoleh dari Iowa State University, AS, masing-masing pada tahun 1989 dan 1991.



DESTRY DAMAYANTI menjabat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk periode 2019-2024, dan mengucapkan sumpah jabatan pada 7 Agustus 2019. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024 Destry Damayanti kembali ditetapkan menjadi Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2024-2029, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 7 Agustus 2024. Sebelum menjabat sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner LPS periode 2015-2019. Selain menjabat sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner (*ex-officio*) Bank Indonesia pada LPS sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.

Destry Damayanti mengawali kariernya sebagai peneliti dan pengajar di FEB Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1987-1990. Selanjutnya, Destry Damayanti bekerja di

Kementerian Keuangan selama periode 1992-1997. Pada tahun 1997-2000, Destry Damayanti menjadi ekonom di Citibank yang kemudian diteruskan menjadi *Senior Economic Advisor* Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada tahun 2000 - 2003. Kariernya sebagai ekonom berlanjut sebagai Kepala Ekonom di Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri selama periode 2005-2015 dan sekaligus sebagai Direktur Eksekutif untuk Mandiri Institute.

Selama tahun 2014 - 2015, Destry juga menjabat sebagai Ketua *Task Force* Ketahanan Ekonomi pada Kementerian BUMN. Pada tahun 2015, Destry Damayanti dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019.

Destry Damayanti dilahirkan di Jakarta pada tahun 1963. Gelar Sarjana Ekonomi diraihinya dari Universitas Indonesia dan gelar Master of Science pada *Field of Regional Science* diraihinya dari Cornell University, New York, AS, pada tahun 1992.



DONI PRIMANTO JOEWONO menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 11 Agustus 2020. Selain itu, Doni Primanto Joewono juga dilantik menjadi Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (*Ex-Officio*) Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51/P Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 dan mengucapkan sumpah jabatan pada 20 Juli 2022.

Doni Primanto Joewono memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1991 di Departemen Pengelolaan Moneter dan banyak terlibat dalam membangun sistem pengelolaan moneter, termasuk mempersiapkan terbitnya Obligasi Pemerintah, dan membangun sistem pelaporan Lalu Lintas Devisa. Doni Primanto Joewono pernah ditugaskan sebagai Peneliti Ekonomi Senior (Deputi Direktur) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2005-2008). Kariernya berlanjut dengan memimpin beberapa Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, dimulai di Solo, kemudian di Provinsi DKI Jakarta, dan terakhir di Provinsi Jawa Barat. Selama kariernya di daerah, Doni Primanto Joewono bersama kepala daerah setempat pernah mendapat penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik, yaitu saat di Solo

(2012) dan DKI Jakarta (2017), serta banyak menginisiasi berbagai kegiatan untuk mendorong investasi daerah dan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono mengemban tugas sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2020.

Selama perjalanan kariernya di Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono juga aktif memimpin dan memberdayakan organisasi, yaitu sebagai Ketua Keluarga Alumni FEB Universitas Sebelas Maret (UNS) periode 2016-2021 dan terpilih kembali untuk periode 2021-2026, serta menjadi Wakil Ketua Ikatan Alumni UNS (2021-2024).

Doni Primanto Joewono lahir di Surabaya pada tahun 1965. Pendidikan formalnya ditempuh pada bidang Ekonomi Studi Pembangunan di UNS pada tahun 1988 untuk gelar Sarjana, serta bidang Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di UI pada tahun 2004 untuk gelar Magister. Doni Primanto Joewono mengikuti program kepemimpinan tertinggi di Bank Indonesia - SESPIBI pada tahun 2012 dan Program Pendidikan Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANNAS) pada tahun 2018 serta beragam program eksekutif kepemimpinan dan pengembangan kompetensi moneter dan pasar keuangan di beberapa lembaga internasional (antara lain IMF dan SEACEN).



JUDA AGUNG menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan 2022-2027.

Memulai karier di Bank Indonesia pada tahun 1991, Juda Agung memiliki pengalaman yang panjang melalui sejumlah penugasan, mulai dari bidang kebijakan moneter, makroprudensial, dan manajemen strategis, hingga Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial di Bank Indonesia. Jabatan tersebut diembannya setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif di IMF, mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam SEAVG, berkedudukan di Washington DC, AS.

Sebagai ekonom, Juda Agung telah memublikasikan sejumlah artikel di bidang moneter, finansial, dan perbankan pada berbagai jurnal internasional, antara lain *Applied Economics* dan *Review of International Economics*. Salah satu publikasi yang baru saja diterbitkan oleh Juda Agung adalah buku “Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi.”

Juda Agung lahir di Pontianak pada tahun 1964. Setelah menempuh pendidikan pada bidang Teknologi Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Juda Agung melanjutkan pendidikan di University of Birmingham dan mendapatkan gelar Master di bidang *Money Banking and Finance* pada tahun 1995. Juda Agung kemudian melanjutkan pendidikan di University of Birmingham dan mendapatkan gelar Ph.D. di bidang *Economics* pada tahun 1999.



AIDA S. BUDIMAN menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan sampai tahun 2027. Selain itu, Aida S. Budiman juga dilantik menjadi Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (*Ex-Officio*) Bank Indonesia untuk masa jabatan tahun 2024 hingga 2025, berdasarkan Keputusan Presiden RI No.101/P Tahun 2024 tanggal 11 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisiner LPS.

Aida S. Budiman memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1991, dan selama perjalanan karirnya telah mengumpulkan pengalaman yang luas melalui berbagai penugasan. Sebelum menjabat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi kebijakan strategis di sektor moneter, mengoordinasikan bauran kebijakan Bank Indonesia dan sinergi dengan bauran kebijakan nasional selama periode 2020-2022. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) periode 2018-2022 dan juga Kepala Departemen Internasional periode 2014-2018. Selama memimpin DKEM, Aida S. Budiman berperan dalam penguatan kerangka bauran kebijakan Bank Indonesia,

perumusan sektor prioritas untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, penguatan peran kantor perwakilan Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, serta penguatan peran digitalisasi UMKM pangan dalam mendukung stabilisasi harga.

Aida S. Budiman juga aktif terlibat di berbagai keanggotaan baik pada forum lintas kementerian dan/atau lembaga maupun dalam organisasi profesional, serta mengajar di berbagai diklat Bank Indonesia dan Sesmenlu. Di kancah internasional, Aida S. Budiman sering mewakili Bank Indonesia dalam berbagai sidang internasional dan *working group* untuk perumusan kebijakan internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral, serta pernah bertugas sebagai Wakil Direktur Eksekutif di SEAVG, IMF Washington DC, AS.

Aida S. Budiman lahir di Bogor pada tahun 1965. Setelah menempuh pendidikan pada bidang Sosial-Ekonomi Pertanian Agribisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Aida S. Budiman melanjutkan pendidikan di University of Southern California dan mendapatkan gelar Master di bidang *Economics* pada tahun 1996. Aida S. Budiman kemudian melanjutkan pendidikan di Claremont Graduate University dan mendapat gelar Ph.D. di bidang *Economics* pada tahun 2001.



Filianingsih Hendarta
 Deputy Gubernur

FILIANINGSIH HENDARTA ditetapkan sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, dan diambil sumpahnya pada 18 April 2023 untuk masa jabatan 2023-2028.

Filianingsih Hendarta memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1986. Sebelum menjabat sebagai Deputy Gubernur, Filianingsih berperan sebagai Asisten Gubernur bidang sistem pembayaran yang memimpin transformasi sistem pembayaran nasional. Filianingsih merupakan figur kunci dalam peluncuran Proyek Garuda, yang mengawali eksplorasi desain *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Rupiah Digital. Filianingsih juga memimpin implementasi BSPI 2025, yang bertujuan untuk mempercepat transformasi dan integrasi ekonomi serta keuangan digital guna meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan di Indonesia.

Dengan pengalaman lebih dari 36 tahun di hampir seluruh sektor di Bank Indonesia, Filianingsih telah memimpin berbagai proyek berskala nasional dan internasional, serta mewakili Bank Indonesia di berbagai forum internasional. Atas dedikasi dan prestasinya, ia dipercaya menduduki beberapa posisi strategis, termasuk Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019–2023), Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (2015–2019),

serta Kepala Departemen Pengelolaan Moneter (2013–2015).

Filianingsih Hendarta terlibat aktif dalam berbagai forum lintas Kementerian/Lembaga di tingkat domestik maupun internasional. Di dalam negeri, Filianingsih Hendarta berperan dalam berbagai forum, antara lain Penyusunan Regulasi dan Kelembagaan Sektor Keuangan, Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital dan Elektronifikasi Lintas Kementerian/Lembaga, serta berbagai komite internal Bank Indonesia. Di kancah internasional, Filianingsih Hendarta acapkali mewakili Bank Indonesia dalam berbagai fora, seperti G20, *Bank for International Settlement* (BIS), FSB, IMF, *World Bank*, ECB, dan *Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks* (EMEAP).

Filianingsih Hendarta lahir di Surabaya pada tahun 1963. Setelah menempuh pendidikan pada bidang Hukum di Universitas Airlangga, Filianingsih Hendarta melanjutkan pendidikan di Boston University dan mendapatkan gelar *Master of Business Administration (Economics and Finance)* pada tahun 1992. Filianingsih Hendarta juga pernah aktif terlibat sebagai pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) *Focus Group* Moneter dan Makroprudensial pada tahun 2018 – 2021. Saat ini, Filianingsih Hendarta menjabat sebagai Wakil Ketua 1 – Dewan Kehormatan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga periode tahun 2021–2025.

1.3. Organisasi Bank Indonesia

Struktur Organisasi Bank Indonesia

Per Maret 2025



Keterangan:

¹⁾ Komite adalah organ pendukung pengambilan keputusan yang bertanggung jawab melakukan perumusan rekomendasi kebijakan prinsipil dan strategis yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur

²⁾ Satuan Kerja khusus yang bersifat sementara



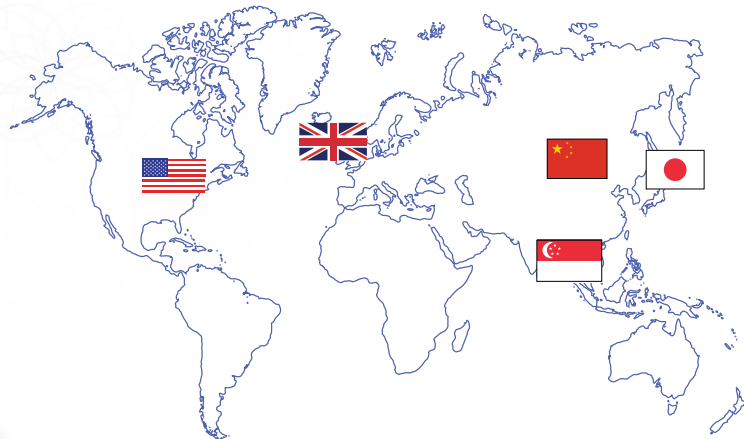
Sebaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI)

Per Maret 2025



KPw BI Luar Negeri

- KPw BI London
- KPw BI New York
- KPw BI Singapura
- KPw BI Tokyo
- KPw BI Beijing



Provinsi
Sulawesi Utara

Provinsi Gorontalo

Provinsi Maluku Utara

Provinsi
Sulawesi Tengah

Provinsi
Sulawesi Barat

Provinsi Papua Barat

Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Maluku

Provinsi Papua

Provinsi
Sulawesi Selatan

WILAYAH SULAMPUA

WILAYAH BALI NUSTRA

Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Bali

- KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan

- KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
- KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah
- KPw BI Provinsi Papua
- KPw BI Provinsi Maluku
- KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara
- KPw BI Provinsi Gorontalo
- KPw BI Provinsi Sulawesi Barat
- KPw BI Provinsi Maluku Utara
- KPw BI Provinsi Papua Barat

1.4. Daftar Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia

Per Maret 2025

KANTOR PUSAT BANK INDONESIA

MONETER

FIRMAN MOCHTAR	Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
EDI SUSIANTO	Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas
RAHMATULLAH	Departemen Pengelolaan Devisa
AGUSTINA D.	Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
IMAM HARTONO	Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

MAKROPRUDENSIAL

SOLIKIN M. JUHRO	Departemen Kebijakan Makroprudensial
Y. BUDIATMAKA	Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market
ANTON DARYONO	Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen
ANASTUTY K.	Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau

SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

DICKY KARTIKOYONO	Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
FARIDA PERANGINANGIN	Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
M. ANWAR BASHORI	Departemen Pengelolaan Uang
YUDI HARYMUKTI	Unit Khusus Pembangunan Sentra Pengelolaan Uang, <i>Data Center</i> , dan <i>Business Resumption Site</i>

PENDUKUNG KEBIJAKAN

YOGA AFFANDI	Departemen Internasional
RIZA TYAS U. H.	Departemen Statistik
HERAWANTO	Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri
TEDDY PIRNGADI	Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
GIRI KOORNIAHARTA P.	Departemen Manajemen Risiko
RAMDAN DENNY PRAKOSO	Departemen Komunikasi

PENDUKUNG ORGANISASI

DODDY ZULVERDI	Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola
IMAM SUBARCAH	Departemen Hukum
IDA NURYANTI	Departemen Sumber Daya Manusia
ENDANG TRIANTI	Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital
DIAH ROSDIANA	Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data
RETNO PONCO WINDARTI	Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber

RIKA S. DEWI	Departemen Keuangan
HARUM SETIAWATI	Departemen Manajemen dan Advisory Pengadaan
FERRY B. TAMPUBOLON	Departemen Audit Intern
BUDIYONO	Departemen Pengelolaan Aset Perkantoran
HILMAN TISNAWAN	Departemen Pengelolaan Aset Perumahan dan Non Perkantoran
EVA ADERIA S.	Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas
CLARITA LIGAYA ISKANDAR	Institut Bank Indonesia

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPW BI) DALAM NEGERI

ARIEF HARTAWAN	Departemen Regional
RUDY BRANDO HUTABARAT	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sumatera Utara
ERWIN GUNAWAN HUTAPEA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Jawa Timur
R. ERWIN SOERADIMADJA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Bali
FADJAR MAJARDI	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan
RIZKI ERNADI WIMANDA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan
AGUS CHUSAINI	KPw BI Provinsi Aceh
MOHAMAD ABDUL MAJID IKRAM	KPw BI Provinsi Sumatera Barat
RONY WIDIJARTO P.	KPw BI Provinsi Riau
WARSONO	KPw BI Provinsi Jambi
RICKY PERDANA GOZALI	KPw BI Provinsi Sumatera Selatan
WAHYU YUWANA HIDAYAT	KPw BI Provinsi Bengkulu
JUNANTO HERDIAWAN	KPw BI Provinsi Lampung
ROMMY SARIU TAMAWIWY	KPw BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
SURYONO	KPw BI Provinsi Kepulauan Riau
ARLYANA ABUBAKAR	KPw BI Provinsi DKI Jakarta
MUHAMAD NUR	KPw BI Provinsi Jawa Barat
RAHMAT DWISAPUTRA	KPw BI Provinsi Jawa Tengah
IBRAHIM	KPw BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
AMERIZA MA'RUF MUSA	KPw BI Provinsi Banten
BERRY A. HARAHAP	KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat
AGUS SISTYO WIDJAJATI	KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur
N. A. ANGGINI SARI	KPw BI Provinsi Kalimantan Barat

YULIANSAH ANDRIAS	KPw BI Provinsi Kalimantan Tengah
BUDI WIDIHARTANTO	KPw BI Provinsi Kalimantan Timur
HASIANDO GINSAR MANIK	KPw BI Provinsi Kalimantan Utara
ANDY PRASMUKO	KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
RONY HARTAWAN	KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah
DONI SEPTADIJAYA	KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara
BAMBANG SATYA PERMANA	KPw BI Provinsi Gorontalo
EKA PUTRA BUDI NUGROHO	KPw BI Provinsi Sulawesi Barat
MOHAMAD LATIF	KPw BI Provinsi Maluku
DWI PUTRA INDRAWAN	KPw BI Provinsi Maluku Utara
FATURACHMAN	KPw BI Provinsi Papua
SETIAN	KPw BI Provinsi Papua Barat
PRABU DEWANTO	KPw BI Lhokseumawe
MUQOROBIN	KPw BI Pematang Siantar
RIZA PUTERA	KPw BI Sibolga
JAJANG HERMAWAN	KPw BI Cirebon
LAURA RULIDA EKA SARI P.	KPw BI Tasikmalaya
MARWADI	KPw BI Tegal
CHRISTOVENY	KPw BI Purwokerto
DWIYANTO CAHYO SUMIRAT	KPw BI Solo
YAYAT CADARAJAT	KPw BI Kediri
GUNAWAN	KPw BI Jember
FEBRINA	KPw BI Malang
ROBI ARIADI	KPw BI Balikpapan

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPW BI) LUAR NEGERI

WAHYU AGUNG NUGROHO	KPw BI New York
I GEDE PUTU WIRA K.	KPw BI London
IMADUDDIN SAHABAT	KPw BI Tokyo
WIDI AGUSTIN S.	KPw BI Singapura
YULIAN WIHANTORO	KPw BI Beijing





BAB 2

LINGKUNGAN STRATEGIS KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA



2.1. Lingkungan Strategis Perekonomian Global dan Nasional

Ketidakpastian global tinggi disertai dengan divergensi pertumbuhan ekonomi dunia yang melebar. Ekonomi global berubah sangat cepat dengan ketidakpastian tinggi akibat kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) yang makin luas. Selain itu, arah kebijakan bank sentral AS juga turut mempengaruhi tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Divergensi pertumbuhan ekonomi dunia melebar. Perekonomian AS diperkirakan tetap kuat ditopang oleh konsumsi rumah tangga seiring upah dan produktivitas yang tinggi serta perbaikan investasi. Sementara itu, ekonomi Eropa, Tiongkok, dan Jepang masih lemah dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat serta kinerja eksternal yang menurun sejalan dengan perekonomian global yang melambat dan dampak dari implementasi kenaikan tarif impor oleh AS. Ekspansi ekonomi India juga tertahan akibat proses konsolidasi fiskal dan investasi yang belum kuat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia untuk keseluruhan 2025 diperkirakan akan tertahan pada angka 3,2%.

Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi. Arah kebijakan Pemerintah dan bank sentral AS berpengaruh pada ketidakpastian pasar keuangan global. Kuatnya ekonomi AS serta dampak kebijakan tarif menahan proses disinflasi di AS dan berdampak pada ekspektasi penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) yang lebih terbatas. Kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong *yield US Treasury* tetap tinggi, meskipun sedikit menurun akibat meningkatnya permintaan investor global terhadap *US Treasury*. Perkembangan tersebut menyebabkan besarnya preferensi investor global untuk menempatkan portofolionya ke AS. Indeks mata uang dolar AS masih tinggi dan menekan berbagai mata uang dunia.

Beratnya tantangan perekonomian global sepanjang triwulan I 2025 dikonfirmasi oleh pernyataan dari sejumlah tokoh dan lembaga internasional. Pernyataan pemimpin European Central Bank (ECB) dan International Monetary Fund (IMF), serta pernyataan resmi dari World Bank, IMF, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa pada triwulan I 2025 perekonomian global masih dibayangi oleh ketidakpastian yang tinggi, perlambatan pertumbuhan, dan meningkatnya fragmentasi perdagangan. Di tengah tekanan inflasi yang masih berlanjut di berbagai kawasan, ketegangan geopolitik dan kebijakan retaliasi turut memperlemah arus perdagangan dan investasi global serta memengaruhi sentimen konsumen dan pelaku usaha. Fragmentasi ekonomi global juga menjadi perhatian utama, karena semakin menyulitkan koordinasi respons kebijakan internasional.

Di tengah semakin tingginya tantangan ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tetap baik. Ekonomi Indonesia triwulan I 2025 masih mampu tumbuh cukup tinggi sebesar 4,87% (yoy), meskipun lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi domestik dan kinerja ekspor. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,89% (yoy) seiring dengan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat yang meningkat selama periode libur tahun baru dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga, termasuk Asian Development Bank (ADB), menyimpulkan bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan I 2025 menghadapi tantangan yang tidak ringan. Perekonomian domestik menghadapi risiko pelemahan daya beli, tekanan terhadap persepsi pasar, serta dampak kenaikan tensi geopolitik dan perang tarif global terhadap ekspor dan arus modal. Untuk menghadapinya, Pemerintah menekankan pentingnya efisiensi, stabilitas, dan sinergi kebijakan untuk menjaga kinerja perekonomian dari dampak rambatan global.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik sehingga mampu mendukung ketahanan eksternal. Surplus neraca perdagangan berlanjut pada Maret 2025 sebesar 4,3 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya sebesar 3,1 miliar dolar AS. Aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik dalam bentuk investasi portofolio sejak awal tahun 2025 hingga akhir Maret 2025 mencatat *net inflows* 1,6 miliar dolar AS, didukung oleh tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia serta ketahanan eksternal yang terjaga baik. Perkembangan tersebut sejalan dengan posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2025 yang tercatat tinggi sebesar 157,1 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia memprakirakan NPI 2025 tetap baik ditopang defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB dan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut.

Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Nilai tukar Rupiah pada akhir triwulan I 2025 tercatat Rp16.560 per dolar AS atau melemah terbatas sebesar 2,81% (ytd) dibandingkan dengan akhir triwulan IV 2024. Pergerakan Rupiah tersebut masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi domestik dalam menjaga stabilitas

perekonomian. Ke depan, nilai tukar Rupiah diperkirakan stabil didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Bank Indonesia terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi, termasuk intervensi terukur di pasar *off-shore* NDF dan strategi *triple intervention* pada transaksi *spot*, DNDF, dan SBN di pasar sekunder. Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter *pro-market* melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret 2025 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. IHK pada Maret 2025 mengalami inflasi sebesar 1,03% (yoy), lebih rendah daripada Desember 2024 sebesar 1,57% (yoy). Rendahnya inflasi Maret 2025 terutama dipengaruhi oleh kelompok *administered prices* yang mengalami deflasi sebesar 3,16% (yoy), meski tidak sedalam deflasi bulan sebelumnya sebesar 9,02% (yoy), terutama dipengaruhi oleh berakhirnya implementasi kebijakan diskon tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya terpasang listrik < 2.200 VA. Sementara itu, inflasi inti tetap terkendali sebesar 2,48% (yoy), sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI-Rate) untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok *volatile food* (VF) tercatat rendah sebesar 0,37% (yoy) didukung oleh kecukupan pasokan komoditas pangan utama dan eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2025 dan 2026.

Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang memadai, *imported inflation* yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Inflasi VF diperkirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penguatan respons kebijakan moneter terus dilakukan, termasuk optimalisasi strategi operasi moneter *pro-market* dalam rangka stabilitas nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Sebagai upaya pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, serta bagian dari strategi mendorong aliran masuk modal asing ke pasar keuangan dalam negeri, instrumen moneter *pro-market* SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan. Hingga 27 Maret 2025, total posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp891,13 triliun, 2,19 miliar dolar AS, dan 315 juta dolar AS. Kepemilikan nonresiden dalam SRBI per tanggal 27 Maret 2025 mencapai Rp234,22 triliun (26,28% dari total *outstanding*). Implementasi *dealer* utama (*primary dealer*) sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan *repurchase agreement* (repo) antarpelaku pasar, sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi. Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder untuk memperkuat operasi moneter yang mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah. Selama tahun 2025 (hingga 31 Maret 2025), Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar Rp75,23 triliun, yaitu melalui pasar sekunder sebesar Rp51,80 triliun dan pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah, sebesar Rp23,43 triliun. Ke depan, berbagai inovasi instrumen yang telah diterbitkan akan dioptimalkan guna terus memperkuat ketahanan eksternal



Press Conference High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) di Jakarta

ekonomi Indonesia dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Transmisi kebijakan moneter tetap baik di tengah kenaikan risiko dari dinamika global. Sejalan dengan penurunan BI-Rate pada Januari 2025 dan operasi moneter yang ditempuh Bank Indonesia, suku bunga pasar uang (IndONIA) bergerak dalam kisaran BI-Rate, yaitu 6,67% pada tanggal 27 Maret 2025. Sementara itu, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan menurun, namun tetap menarik untuk aliran masuk modal asing, yakni dari masing-masing 7,16%; 7,20%; dan 7,27% pada awal Januari 2025 menjadi 6,34%; 6,38%; dan 6,43% per 21 Maret 2025. Imbal hasil SBN juga tetap menarik, meskipun untuk tenor 2 tahun menurun dari 6,96% menjadi 6,69%, sementara untuk tenor 10 tahun sedikit meningkat dari 6,98% menjadi 7,00%. Adapun suku bunga perbankan tercatat rendah ditopang oleh kecukupan likuiditas perbankan sejalan dengan implementasi penguatan KLM serta publikasi transparansi SBDK. Likuiditas yang cukup tersebut mampu meningkatkan efisiensi pembentukan suku bunga perbankan sehingga mendukung penyaluran kredit perbankan. Pada Maret 2025, suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit tercatat masing-masing sebesar 4,77% dan 9,20%, relatif stabil dibandingkan dengan level pada bulan sebelumnya.

Di tengah berbagai dampak perang tarif AS dan potensi perlambatan ekonomi domestik yang dapat mempengaruhi pembiayaan perbankan, kredit perbankan tetap tumbuh positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit pada Maret 2025 tercatat sebesar 9,16% (yoy), lebih rendah dari 10,30% (yoy) pada bulan Februari 2025. Pertumbuhan kredit investasi masih relatif tinggi, yaitu 14,62% (yoy), sedangkan pertumbuhan kredit konsumsi dan kredit modal kerja masing-masing tercatat sebesar 10,31% (yoy) dan 7,66% (yoy). Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit (*lending standard*) dan kondisi likuiditas secara umum masih memadai. Dari sisi permintaan, kontribusi pertumbuhan kredit terutama bersumber dari sektor industri, pertambangan, dan jasa sosial, sementara kontribusi pertumbuhan kredit dari sektor konstruksi dan perdagangan masih terbatas. Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 9,15% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,51% (yoy). Ke depan, berbagai risiko ketidakpastian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi prospek permintaan kredit dan preferensi penempatan aset likuid perbankan. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan akan menuju ke batas bawah kisaran 11-13% pada 2025. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif, termasuk mengoptimalkan KLM, dan memperkuat

implementasi ketentuan Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) untuk mendorong pendanaan perbankan bagi manajemen likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil. Bank Indonesia juga akan terus mempererat koordinasi dengan KSSK untuk mendorong pertumbuhan kredit dalam mendukung pembiayaan ekonomi.

Ketahanan perbankan tetap kuat mendukung stabilitas sistem keuangan. Likuiditas perbankan memadai, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada Maret 2025 yang tinggi sebesar 26,22%. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada Maret 2025 sebesar 25,38% sehingga masih mampu untuk menyerap risiko. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) perbankan tercatat rendah, sebesar 2,17% (bruto) dan 0,80% (neto) pada Maret 2025. Hasil *stress test* yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat, serta ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi domestik dan global yang dapat mengganggu ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan I 2025 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi transaksi, pembayaran digital pada triwulan I 2025 mencapai 10,76 miliar transaksi atau tumbuh 33,50% (yoy) didukung peningkatan seluruh komponen. Volume transaksi aplikasi *mobile* dan internet terus tumbuh masing-masing sebesar 34,51% (yoy) dan 18,89% (yoy). Demikian pula, volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tetap tumbuh tinggi sebesar 169,15% (yoy) didukung peningkatan jumlah pengguna dan *merchant*. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1,07 miliar transaksi atau tumbuh 57,68% (yoy), dengan nilai mencapai Rp2.741,81 triliun. Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tumbuh sebesar 0,69% (yoy) menjadi 2,47 juta transaksi dengan nilai Rp46.281,21 triliun. Sementara dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 15,51% (yoy) menjadi Rp1.240,12 triliun pada triwulan I 2025. Transaksi digital melalui QRIS selama periode Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 2025 juga meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan volume transaksi per pengguna mencapai 111% (yoy), lebih tinggi daripada periode yang sama tahun 2024 sebesar 76% (yoy). Ada pun pertumbuhan UYD selama periode RAFI 2025 mencapai 8,63% (yoy), sedikit lebih tinggi daripada 8,44% (yoy) pada periode sama tahun 2024.

Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

PELUNCURAN KAJIAN STABILITAS KEUANGAN NO. 44

MEMPERKUAT STABILITAS DAN MENJAGA
PERTUMBUHAN DARI DAMPAK RAMBATAN GLOBAL

JAKARTA, 5 MARET 2025

Peluncuran Kajian Stabilitas Keuangan No. 44 "Memperkuat Stabilitas dan Menjaga Pertumbuhan dari Dampak Rambat Global" di Jakarta

tercermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada triwulan I 2025, termasuk selama periode RAFI 2025. Dari sisi struktur industri, interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran terus menguat diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan SPBI serta sistem pembayaran industri. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

2.2. Lingkungan Strategis Kebijakan dan Kelembagaan

Selain dinamika perekonomian global dan nasional di atas, Bank Indonesia juga terus mencermati perubahan lingkungan strategis yang memerlukan penguatan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank sentral dan lembaga publik. Dalam konteks Indonesia, lingkungan strategis yang memerlukan penguatan respons dan transformasi kebijakan dan kelembagaan dimaksud termasuk dalam menghadapi meningkatnya dampak negatif rambat global serta cepatnya digitalisasi dengan sejumlah manfaat dan risikonya.

Perlunya bauran kebijakan bank sentral untuk memitigasi dampak ketidakpastian pasar keuangan global. Seperti dikemukakan di atas, kuatnya mata uang dolar AS dan tingginya *yield US Treasury* berdampak negatif pada negara-negara *Emerging Markets* (EMs), termasuk Indonesia, yaitu terjadinya aliran keluar investasi portfolio asing dan tekanan depresiasi nilai tukar, yang keduanya berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan makroekonomi. Keharusan untuk fokus pada stabilitas inilah yang membatasi kemampuan kebijakan moneter dalam turut mendukung pertumbuhan. Di sinilah pentingnya bauran kebijakan bank sentral, khususnya antara kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial. Dari sisi kebijakan moneter, kebijakan suku bunga untuk pencapaian sasaran inflasi perlu didukung dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar melalui intervensi di pasar valuta asing. Hal ini agar stabilitas Rupiah tetap terjaga dan berdampak positif pada pengendalian inflasi, stabilitas sistem keuangan, dan keberlanjutan fiskal di dalam negeri. Sementara itu, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan bagi pertumbuhan ekonomi serta tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan. Bauran kebijakan bank sentral tersebut perlu dirumuskan ke dalam kerangka kerja dan pengaturan sebagai acuan dalam merumuskan respon yang diperlukan sesuai dengan dinamika perekonomian global dan nasional yang berkembang.

Perlunya bauran kebijakan ekonomi nasional untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dari dampak perlambatan ekonomi global. Seperti dikemukakan di atas, ketidakpastian global meningkat

disertai dengan prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Di sinilah pentingnya bauran kebijakan ekonomi nasional yang mencakup kebijakan fiskal dan sektor riil oleh Pemerintah, kebijakan moneter dan makroprudensial oleh Bank Indonesia, serta kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ditempuh melalui pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan, serta pengelolaan defisit dan pembiayaan fiskal yang terjaga. Sementara itu, koordinasi dalam mendorong pertumbuhan ditempuh melalui pemberian insentif fiskal dari Pemerintah dan insentif likuiditas makroprudensial dari Bank Indonesia pada sektor-sektor prioritas pendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Yang juga sangat penting ditempuh adalah kebijakan transformasi sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk melalui pembangunan infrastruktur konektivitas fisik dan digital, perbaikan iklim investasi untuk peningkatan penanaman modal asing dan dalam negeri, hilirisasi sumber daya alam untuk nilai tambah perekonomian, dan juga hilirisasi pertanian untuk ketahanan pangan.

Perlunya sinergi dalam digitalisasi ekonomi keuangan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Digitalisasi berkembang sangat cepat di Indonesia, khususnya transaksi ekonomi dan keuangan digital secara ritel. Bank Indonesia berperan penting dalam mempercepat digitalisasi ini melalui digitalisasi pembayaran, terutama setelah peluncuran BSPI 2025 pada tahun 2019, yang diperkuat melalui peluncuran BSPI 2030 pada tahun 2024, bersinergi erat dengan Pemerintah, KSSK, dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Cepatnya digitalisasi sistem pembayaran tersebut salah satunya dipicu oleh keharusan penggunaan QRIS sebagai satu-satunya QR transaksi pembayaran di Indonesia, yang sekarang telah pula diperluas dengan kerjasama QR antarnegara. Pada area infrastruktur sistem pembayaran ritel, kehadiran BI-FAST memungkinkan transaksi ritel antar rekening nasabah di perbankan menjadi lebih cepat melalui layanan yang tersedia selama 24/7, yang sebagian besar penggunaannya adalah *merchant* UMKM. Interkoneksi transaksi pembayaran antar pelaku industri juga semakin meningkat dengan penerapan Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP). Demikian pula, pengembangan *platform* pusat data memungkinkan pemrosesan dan analisis terhadap *big data*

menjadi lebih akurat dalam rangka mendukung proses pengambilan yang tepat dan terkalibrasi setiap saat. Di sisi lain, perkembangan digital dan adopsi teknologi tersebut juga disertai berbagai risiko termasuk peningkatan ancaman dan serangan siber di sektor keuangan. Risiko operasional harus diwaspadai dalam rangka menjaga resiliensi layanan sistem pembayaran dan memitigasi potensi kegagalan yang sistemik, termasuk pada sistem keuangan. Penguatan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah, KSSK, dan ASPI perlu terus dilakukan untuk semakin mendorong digitalisasi ekonomi keuangan nasional untuk berkontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Digitalisasi juga memberi peluang dan manfaat bagi proses bisnis kebijakan dan kelembagaan yang lebih efektif, efisien, dan berkepatuhan. Cepatnya perkembangan teknologi digital dan pergeseran demografi pegawai ke generasi milenial dan generasi Z yang semakin besar menuntut Bank Indonesia untuk mempercepat transformasi digital proses bisnis kebijakan dan kelembagaan dengan tetap menjaga tata kelola yang baik dan profesional. Transformasi digital dimaksud ditempuh secara terintegrasi, yang dikenal dengan *Integrated Digital Central Banking* (IDCB). Dalam kaitan ini, digitalisasi proses bisnis dimulai untuk proses bisnis perumusan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dari satuan kerja ke komite dan kemudian ke RDG Bulanan. Proses bisnis perumusan bauran kebijakan yang semula 8 (delapan) tahap dikurangi menjadi hanya 3 (tiga) tahap. Hal ini didukung dengan penguatan proses bisnis di dalam satuan kerja melalui *Digital Workplace* (DWP), dimana para pegawai dapat berinteraksi dan berkolaborasi dalam mempersiapkan bahan yang akan disampaikan ke komite dan RDG secara digital. Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) telah dilakukan untuk analisis dan proyeksi sejumlah indikator kunci perekonomian, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kredit perbankan, dan lainnya. Digitalisasi proses bisnis dilakukan secara *end-to-end*, yaitu dari *input* metadata dan penggunaan AI untuk analisis dan proyeksi sejumlah indikator ekonomi kunci, penyusunan bahan, hingga pembahasan di Komite dan RDG. Digitalisasi proses bisnis secara bertahap akan terus diperluas ke area kebijakan dan kelembagaan lainnya sebagai bagian dari transformasi digital secara menyeluruh dalam mewujudkan visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan.





Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

BAB 3

RESPONS KEBIJAKAN BANK INDONESIA





Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Februari 2025 di Jakarta

3.1. Stance Kebijakan Bank Indonesia

Bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2025 diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan, bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2025 akan diarahkan pada keseimbangan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mencermati ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (*"pro-stability and growth"*). Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (*"pro-growth"*). Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), inklusi ekonomi dan keuangan hijau. Digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi sesuai BSPI 2030 untuk memperkuat industri jasa pembayaran dan mendorong Ekonomi-Kuangan Digital (EKD) nasional, di samping memperluas kerja sama sistem pembayaran antarnegara dan melanjutkan pengembangan Rupiah Digital. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dimaksud didukung oleh akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) sesuai dengan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030 untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, membangun pasar sekunder yang modern dan standar internasional, dan mengembangkan instrumen pembiayaan perekonomian. Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk melalui digitalisasi serta

perluasan akses pasar domestik dan ekspor. Bank Indonesia juga akan terus mempererat sinergi dan koordinasi baik dengan kebijakan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), maupun dengan industri keuangan, dunia usaha, dan asosiasi, untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Bauran kebijakan tersebut sekaligus sebagai pelaksanaan dari amanat UU P2SK yang memperkuat tujuan dan tugas Bank Indonesia. Sesuai UU P2SK, tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tujuan ini dicapai dengan 3 (tiga) tugas, yaitu: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan (iii) menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Lebih lanjut, dukungan Bank Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ditempuh melalui 3 (tiga) hal sebagai berikut. Pertama, melalui kebijakan moneter, untuk mencapai inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang terkendali sebagai prasyarat bagi berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, baik oleh Pemerintah, perbankan, dunia usaha, investor, maupun masyarakat. Kedua, melalui digitalisasi sistem pembayaran, untuk meningkatkan nilai dan volume transaksi Ekonomi-Kuangan Digital (EKD), mendorong perputaran (*velositi*) dan efisiensi pembayaran, serta meningkatkan produktivitas berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, dan didukung pula oleh berkembang sehatnya industri jasa pembayaran nasional. Ketiga, melalui peningkatan kredit/pembiayaan perbankan,

yang sangat diperlukan untuk mendorong pembiayaan perekonomian, dan didukung oleh terpeliharanya stabilitas sistem keuangan (SSK). Untuk mendukung ketiga kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia juga menempuh kebijakan untuk pendalaman PUVA, kebijakan internasional, serta kebijakan untuk mendukung program-program UMKM dan ekonomi- keuangan syariah.

3.2. Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Di bidang moneter, Bank Indonesia selama triwulan I 2025 menurunkan BI-Rate sebanyak satu kali yakni pada Januari 2025 sebesar 25bps menjadi 5,75%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, terjaganya nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk mengendalikan inflasi dalam sasarnya, dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pada Februari dan Maret 2025, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan pada level yang sama, yakni 5,75%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan BI-Rate dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia terus memperkuat strategi OM *pro-market* untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing, dengan: (i) mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valuta asing Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrumen moneter *pro-market*; (ii) menjaga struktur suku bunga instrumen moneter untuk tetap menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik; (iii) memperkuat strategi transaksi *term-repo* dan *swap* valuta asing; dan (iv) memperkuat peran *Primary Dealer* (PD) untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi *repurchase agreement* (repo) antarpelaku pasar. Bank Indonesia juga terus memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi di pasar valuta asing pada transaksi *spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia melanjutkan dukungannya terhadap pelaksanaan

kebijakan kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri sesuai PP No. 8 Tahun 2025, yaitu melalui perluasan instrumen penempatan dan pemanfaatan DHE SDA yang meliputi: (i) Penempatan di instrumen *Term Deposit* (TD) valuta asing DHE s.d. tenor 12 bulan; (ii) Penempatan di instrumen SVBI dan SUVBI s.d. tenor 12 bulan; serta (iii) Pemanfaatan melalui: a) Pengalihan TD Valuta Asing DHE menjadi FX Swap, b) FX Swap dengan underlying TD Valuta Asing DHE, SVBI, dan SUVBI, dan c) TD Valuta Asing DHE, SVBI, dan SUVBI dapat dijadikan agunan kredit Rupiah dari bank.

Di bidang makroprudensial, Bank Indonesia melaksanakan strategi untuk mendorong pertumbuhan kredit/ pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Pada triwulan I 2025, respons kebijakan makroprudensial Bank Indonesia antara lain:

- a) Penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar, dengan:
 - ii) Memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan melalui *refocusing* pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja;
 - ii) Mempertahankan: (i) Rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) sebesar 0%; (ii) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%; (iii) Rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor paling rendah sebesar 0%, berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025; serta (iv) Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%, dan rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%; dan
- b) Penguatan publikasi asesmen transparansi SBDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM.

Di bidang sistem pembayaran, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Pada triwulan I 2025, respons kebijakan sistem pembayaran yang ditempuh antara lain:

- a) Peningkatan resiliensi infrastruktur SPBI;
- b) Penguatan inovasi dan akseptasi layanan pembayaran digital serta inklusi ekonomi dan keuangan UMKM

termasuk literasi dan perlindungan konsumen, melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024;

- c) Pelaksanaan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang berfokus pada aspek pengembangan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri, termasuk penguatan struktur industri, melalui peningkatan implementasi sertifikasi kompetensi di bidang sistem pembayaran;
- d) Perluasan akseptasi digital melalui edukasi kepada *merchant* QRIS terkait penggunaan QRIS antarnegara, edukasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah, serta perluasan digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024; dan
- e) Penyediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, antara lain dengan melanjutkan kerja sama kelembagaan dalam pengedaran uang Rupiah ke daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil) melalui kegiatan kas keliling, kas titipan, dan Ekspedisi Rupiah Berdaulat.

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan

mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program *Asta Cita* Pemerintah. Sinergi dilakukan dalam 7 (tujuh) area kebijakan, yakni (i) kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam memitigasi gejolak global; (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, (iii) upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM; (iv) dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah; (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan; (vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi; serta (vii) dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

Dukungan penuh Bank Indonesia terhadap program-program dalam *Asta Cita* tersebut merupakan wujud penguatan sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah yang sebelumnya ditempuh melalui 5 aspek sinergi sebagaimana disampaikan pada peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2024.

Boks.1: Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2024



Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024 di Jakarta

Bank Indonesia pada 22 Januari 2025 meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024. Laporan ini merupakan bentuk transparansi kebijakan Bank Indonesia kepada publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (7) dari UU No. 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. LPI 2024 mengangkat tema "Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional". LPI



2024 mengulas evaluasi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada 2024, serta arah kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai pada 2025. Pembahasan penting lainnya yang turut diangkat dalam LPI 2024 ialah BPPU 2030 yang merupakan strategi akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, serta Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 sebagai strategi memperkuat transformasi digital nasional.

Gubernur Bank Indonesia menekankan tiga pesan utama pada peluncuran LPI 2024. *Pertama*, Bank Indonesia optimis bahwa capaian positif ekonomi Indonesia 2024 akan terus berlanjut dengan prospek ekonomi ke depan yang lebih baik. Capaian ini tecermin dari inflasi yang terkendali dalam sasaran, stabilitas Rupiah yang terjaga, kredit yang terus tumbuh, dan digitalisasi yang bertambah pesat. Kita harus tetap optimis sekaligus waspada di tengah dunia yang terus bergejolak. *Kedua*, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam hal ini, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan makroprudensial, seperti insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), dan pengembangan UMKM, inklusi keuangan, serta digitalisasi sistem pembayaran termasuk untuk mendukung transaksi keuangan Pemerintah diarahkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, Bank

Indonesia mendukung penuh program-program dalam Asta Cita yang dicanangkan Pemerintah melalui 5 aspek, yaitu: menjaga stabilitas ekonomi, moneter, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan, termasuk memastikan nilai tukar Rupiah stabil sejalan dengan dinamika mata uang regional di tengah tekanan dolar AS yang kuat; memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, termasuk dalam pembelian SBN dari pasar sekunder melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (*bilateral buyback/debt switching*); mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM untuk mengarahkan kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas; mendukung program ketahanan pangan sejalan dengan upaya pengendalian inflasi; serta mendukung digitalisasi sistem pembayaran, antara lain melalui koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam digitalisasi program kesejahteraan sosial, elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah, dan elektronifikasi sektor transportasi.

Ke depan, Bank Indonesia akan melanjutkan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk mengawal dan memastikan perekonomian Indonesia ke depan makin baik, dengan tetap mewaspadai sejumlah tantangan global yang meningkat dengan segala dampak rambatan negatifnya terhadap kinerja perekonomian domestik.



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara

BAB 4

TRANSFORMASI BANK INDONESIA



Bank Indonesia terus memperkuat transformasi yang telah ditempuh sejak tahun 2018 guna memperkuat kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia dalam merespons lingkungan strategis yang berkembang. Selain dinamika perekonomian global dan nasional yang terjadi sepanjang triwulan I 2025, Bank Indonesia perlu mencermati perubahan lingkungan strategis yang memerlukan penguatan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan, termasuk meningkatnya dampak negatif rambatan global serta cepatnya digitalisasi dengan sejumlah manfaat dan risikonya. Ketidakpastian global yang meningkat, disertai dengan prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat memerlukan penguatan sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dari dampak perlambatan ekonomi global. Selain itu, perkembangan digital dan adopsi teknologi yang disertai berbagai risiko termasuk peningkatan ancaman dan serangan siber, perlu senantiasa diwaspadai dalam rangka menjaga resiliensi layanan sistem pembayaran dan memitigasi potensi kegagalan yang sistemik, termasuk pada sistem keuangan. Cepatnya perkembangan teknologi digital dan pergeseran demografi pegawai ke generasi milenial dan generasi Z yang semakin besar, juga telah menuntut Bank Indonesia untuk mempercepat transformasi digital proses bisnis kebijakan dan kelembagaan dengan tetap menjaga tata kelola yang baik dan profesional. Mencermati berbagai lingkungan strategis tersebut, selain melakukan penguatan respons kebijakan, Bank Indonesia mempertajam sejumlah agenda transformasi dan mengimplementasikannya secara bertahap.

Transformasi Bank Indonesia mencakup empat area utama, yaitu Kebijakan, Organisasi dan Proses Kerja, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Kerja, serta Digital. Transformasi Kebijakan mencakup penyempurnaan ketentuan bauran kebijakan utama dan pendukung, serta pengembangan berbagai *blueprint/framework* dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, dengan berlandaskan pada penerapan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional. Di sisi lain, Transformasi Organisasi dan Proses Kerja diarahkan pada penguatan lembaga yang berkinerja optimal dan digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan berbasis efektif, efisien, dan kepatuhan. Sementara itu, Transformasi SDM dan Budaya Kerja ditempuh untuk mendukung pelaksanaan digital *Business Process Reengineering* (BPR) melalui penguatan aspek kepemimpinan SDM Bank Indonesia yang berintegritas, kompeten, profesional, *agile* terhadap perubahan, dan berperilaku mulia. Selanjutnya, Transformasi Digital diarahkan untuk mendukung proses kerja kebijakan maupun kelembagaan yang semakin efektif dan efisien menuju visi sebagai bank sentral digital terdepan.

4.1. Transformasi Kebijakan

Bank Indonesia melanjutkan penguatan bauran kebijakan yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mencapai tujuan sebagaimana amanat UU. Pada triwulan I 2025, tantangan perekonomian nasional yang semakin berat di tengah dinamika perekonomian dunia serta tantangan perubahan lingkungan strategis yang memerlukan penguatan kerangka kerja kebijakan sebagai bank sentral dan lembaga publik, Bank Indonesia melakukan transformasi penguatan kerangka kerja Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) yang terintegrasi dalam mencapai tujuan Bank Indonesia. BKBI akan memperkuat integrasi kerangka kerja perumusan dan pelaksanaan antarkebijakan utama, yang terdiri dari Kebijakan Moneter, Kebijakan Sistem Pembayaran, dan Kebijakan Makroprudensial dengan ditopang oleh kebijakan pendukung. Integrasi ini konsisten dengan pencapaian tujuan Bank Indonesia, yakni mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan kerangka kebijakan dilakukan beriringan dengan *business process re-engineering* (BPR) serta digitalisasi kebijakan dan proses kerja, agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan ke depan menuju *Integrated Digital Central Banking* (IDCB). Hal ini ditempuh guna mewujudkan organisasi dengan proses bisnis yang lebih sederhana, ringkas, dan standar, serta proses kerja yang *agile* dan sejalan dengan kebutuhan di era digital.

Sebagai bagian dari penguatan pengaturan terkait BKBI, pada triwulan I 2025, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan internal tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI). Penyusunan ketentuan ini juga dilengkapi dengan penyempurnaan pengaturan terkait pada masing-masing kebijakan utama, yaitu Kebijakan Moneter, Kebijakan Sistem Pembayaran, dan Kebijakan Makroprudensial, serta optimalisasi tiga kebijakan utama tersebut sebagai bauran kebijakan. Di samping itu, Bank Indonesia juga tengah menyusun penguatan ketentuan kebijakan pendukung yang terdiri dari ekonomi dan keuangan daerah, pasar uang dan pasar valuta asing, inklusi keuangan dan hijau, ekonomi dan keuangan syariah, internasional, serta perlindungan konsumen yang selaras dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang BKBI dimaksud.

4.1.1. Transformasi di Bidang Moneter

1) Reformasi Regulasi Area Moneter

Bank Indonesia memperkuat kerangka kerja kebijakan moneter melalui penyempurnaan pengaturan yang selaras dengan BKBI.

Penyempurnaan ini menjadi landasan hukum dalam mendukung pelaksanaan tugas di bidang moneter sesuai amanat UU Bank Indonesia jo. UU P2SK.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah menerbitkan pengaturan di area moneter yang selaras dengan PBI BKBI, yakni: (i) PBI No. 5 Tahun 2025 tentang Kebijakan Moneter (PBI KMN) dan ketentuan internal dari peraturan dimaksud, serta (ii) ketentuan internal tentang Pengendalian Moneter. Penerbitan pengaturan terkait KMN ditujukan sebagai pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter, acuan utama bagi Bank Indonesia untuk pembentukan ketentuan terkait pelaksanaan kebijakan moneter, serta acuan utama bagi publik terkait pelaksanaan kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Sementara itu, penerbitan ketentuan internal terkait pengendalian moneter dimaksudkan sebagai pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan pengendalian moneter, acuan utama bagi pembentukan ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan pengendalian moneter, serta menjadi acuan bagi satuan kerja dalam pelaksanaan pengendalian moneter.

2) Digitalisasi Proses Bisnis Statistik

Kebutuhan akan data dan informasi yang berkualitas semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan yang semakin dinamis disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Data dan informasi tersebut diperlukan untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan BKBI, memenuhi komitmen penyediaan data dan informasi pada tingkat nasional dan internasional, serta menyediakan data dan informasi yang akurat bagi publik.

Bank Indonesia terus memperkuat proses bisnis statistik secara menyeluruh, mulai dari perolehan, pemrosesan, hingga diseminasi data dan informasi. Sebagai bagian dari agenda transformasi, Bank Indonesia telah menginisiasi digitalisasi proses bisnis statistik dari sisi pengembangan data dan informasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan ketepatan waktu penyediaan data. Selanjutnya, pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah melakukan asesmen dan penyusunan konsep digitalisasi proses bisnis statistik, yang mencakup modernisasi mekanisme perolehan data, digitalisasi proses pengolahan data, digitalisasi diseminasi statistik, serta penguatan *data quality management* dan *metadata management*.

4.1.2. Transformasi di Bidang Makroprudensial

Bank Indonesia juga memperkuat kerangka kerja kebijakan makroprudensial antara lain melalui

penerbitan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan makroprudensial yang sejalan dengan BKBI. Penguatan kerangka kerja kebijakan makroprudensial ditujukan sebagai pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan internal tentang Kebijakan Makroprudensial (KMP) sebagai ketentuan lanjutan dari PBI tentang Kebijakan Makroprudensial yang telah diterbitkan pada 2024. Penerbitan ketentuan internal terkait KMP bertujuan sebagai pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, serta menjadi acuan utama bagi pembentukan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan kebijakan makroprudensial di internal Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia turut memperkuat kerangka kerja pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan melalui pengembangan desain kerangka kerja Protokol Manajemen Krisis (PMK) terintegrasi yang selaras dengan Lalu Lintas Devisa (LLD), BKBI, dan BPPU. Penguatan kerangka kerja dilakukan agar terdapat mekanisme pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan pada aspek kebijakan yang terintegrasi dengan aspek kelembagaan (operasional). Selanjutnya, Bank Indonesia merancang kerangka kerja Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi (PMKT) untuk meningkatkan efektivitas protokol manajemen krisis Bank Indonesia dalam mencegah dan menangani krisis sistem keuangan, khususnya risiko gangguan SSK yang semakin kompleks dan bersifat multidimensi. Kerangka kerja PMKT akan dituangkan dalam pokok-pokok ketentuan internal dan menjadi ketentuan payung bagi pengaturan PMK area kebijakan dan kelembagaan yang terkait dengan protokol keberlangsungan tugas kritikal Bank Indonesia. Pengaturan dimaksud antara lain mencakup kerangka kerja, perumusan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan, serta akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan PMKT.

4.1.3. Transformasi di Bidang Sistem Pembayaran

1) Reformasi Regulasi Area Sistem Pembayaran

Dalam rangka mendukung implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia telah memperkuat aspek pengaturan melalui penerbitan ketentuan yang relevan guna mendukung stabilitas, efisiensi, dan integrasi sistem pembayaran nasional.

Penguatan aspek pengaturan dimaksud juga telah diselaraskan dengan ketentuan BKBI.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Nomor 4 Tahun 2025 dan ketentuan internal tentang Kebijakan Sistem Pembayaran (KSP). Penerbitan peraturan bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem pembayaran dan memperkuat kerangka kerja kebijakan sistem pembayaran sebagai bagian dari BKBI. Pengaturan KSP akan menjadi pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan sistem pembayaran agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia, serta menjadi acuan bagi pembentukan ketentuan Bank Indonesia maupun bagi pihak eksternal dalam pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran.

Kebijakan Sistem Pembayaran didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia. Kebijakan Sistem Pembayaran merupakan bagian dari BKBI yang memiliki keterkaitan dan saling mendukung dengan kebijakan utama lainnya serta kebijakan pendukung. Adapun sasaran kebijakan sistem pembayaran meliputi: i) kecepatan yang cepat, mudah, dan murah; ii) struktur industri penyelenggara jasa sistem pembayaran yang sehat dan efisien; iii) infrastruktur sistem pembayaran yang aman dan stabil; serta iv) ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya. Untuk meningkatkan efektivitas Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan pihak eksternal yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip independensi dalam interdependensi kebijakan.

2) Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran

Bank Indonesia secara berkelanjutan memperkuat infrastruktur sistem pembayaran yang tangguh dan terintegrasi guna mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional. Pengembangan infrastruktur sistem pembayaran terus dilanjutkan untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi, baik di dalam negeri maupun antarnegara, secara lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Infrastruktur sistem pembayaran diimplementasikan melalui penguatan stabilitas, skalabilitas, dan sinergi infrastruktur sistem pembayaran ritel dan *wholesale*; yang antara lain mencakup BI-FAST, *Fast Payment* Industri, pengembangan BI-Payment Clear, pengembangan BI-RTGS Generasi III, serta standarisasi ISO 20022.

Pada triwulan I 2025, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel dan *wholesale* berada pada tahap pengembangan dan penyusunan standar ISO 20022. Pada tahap ini, Bank Indonesia melakukan kajian menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap aspek pengembangan dapat mendukung stabilitas, keamanan, dan efisiensi sistem pembayaran nasional. Selain itu, Bank Indonesia melakukan analisis kebutuhan pasar, pengujian konsep teknis, serta identifikasi risiko dan tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi. Bank Indonesia juga menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan industri guna mendapatkan masukan yang relevan dan membangun sinergi yang lebih kuat dalam mendukung keberlanjutan sistem pembayaran yang andal dan inovatif.

Dari sisi perkembangan transaksi, penggunaan infrastruktur sistem pembayaran ritel terus tumbuh positif, didukung penyediaan dan pengembangan infrastruktur yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Beberapa fitur dalam pengembangan infrastruktur sistem pembayaran tersebut mencakup kepesertaan yang terbuka, opsi penyediaan infrastruktur secara independen maupun bersama (*sharing*), penetapan batas maksimal transaksi sebesar Rp250 juta per transaksi, serta skema harga BI-FAST sebesar maksimal Rp2.500 per transaksi kepada nasabah pengirim dengan biaya Bank Indonesia ke peserta pengirim sebesar Rp19 per transaksi. Perkembangan positif penggunaan infrastruktur pembayaran ritel juga diperkuat dengan kehadiran layanan baru BI-FAST pada akhir 2024, yang meliputi layanan transfer kolektif (*bulk transfer*), pembayaran berdasarkan permintaan (*request for payment*), serta transfer debit langsung (*direct debit*). Pada triwulan I 2025, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1,07 miliar transaksi atau tumbuh 57,68% (yoy), dengan nilai mencapai Rp2.741,81 triliun.

3) Pengembangan Inovasi dan Perluasan Akseptasi

Bank Indonesia terus berupaya untuk mendukung inovasi dan akseptasi di industri sistem pembayaran. Melalui BSPI 2030, Bank Indonesia menginsiasi pembentukan BI-Digital Innovation Center (BIDIC) yang dikembangkan untuk dapat mendorong inovasi dan akseptansi digital secara seimbang dengan perlindungan konsumen, integritas, stabilitas dan persaingan usaha yang sehat. Tujuan ini akan dicapai melalui tiga besaran kebijakan, yaitu: (1) mendorong inovasi layanan pembayaran; (2) memperkuat literasi dan akseptasi digital masyarakat; dan (3) memperkuat

aspek manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Ketiga besaran strategi tersebut akan diimplementasikan dalam wadah yang kolaboratif antara Bank Indonesia dan industri. Inisiatif tersebut merupakan upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan inovasi layanan pembayaran yang diarahkan untuk dapat berlangsung di dalam koridor persaingan usaha yang sehat secara kolaboratif dengan industri.

Pada triwulan I 2025, inisiatif pengembangan inovasi difokuskan pada penyusunan konsepsi dan kerangka kerja BIDIC berdasarkan tiga pilar fungsionalitas yang saling melengkapi. Pertama, *in-depth sandboxing* yang berfungsi sebagai ruang uji coba inovasi secara efektif, memungkinkan pengujian berbagai teknologi dan model bisnis baru dalam ekosistem sistem pembayaran. Kedua, *market intelligence*, yang berperan dalam memantau dan menganalisis dinamika serta tren perkembangan industri ekonomi digital secara menyeluruh. Ketiga, *design thinking*, yaitu proses iteratif yang mencakup kegiatan riset dan asesmen, dilakukan secara kolaboratif bersama pelaku industri, serta melibatkan pakar di bidangnya. Melalui pendekatan ini, BIDIC akan menjalankan peran strategis sebagai pusat pengembangan dan penelitian teknologi dalam sistem pembayaran terkini, yang diharapkan mampu menciptakan *positive feedback loop* dalam mempercepat laju inovasi ekonomi digital, khususnya pada penguatan layanan pembayaran digital nasional.

4) Pengembangan Konektivitas Sistem Pembayaran Lintas Negara

Bank Indonesia terus melanjutkan komitmen untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas melalui kesepakatan kerja sama dengan beberapa bank sentral. Kerja sama dilakukan dalam rangka mewujudkan konektivitas pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif. Kerja sama tersebut juga berpotensi membuka akses pasar bagi para pelaku usaha Indonesia ke kawasan. Bank Indonesia akan terus melakukan perluasan kerja sama *Regional Payment Connectivity* (RPC) dengan negara lainnya. Ke depan, arah strategis dari inisiatif internasional ditujukan untuk mendorong interkoneksi lintas negara beserta perluasannya dalam koridor yang menjamin kepentingan nasional. Inisiatif ini akan diwujudkan melalui dua besaran kebijakan yaitu: (i) memperluas cakupan kerjasama pembayaran antarnegara; dan (ii) mempersiapkan infrastruktur sistem pembayaran

nasional untuk siap terkoneksi antarnegara. Prinsip yang terkandung dalam kerangka RPC akan menjadi landasan bagi inisiatif ini dalam mengimplementasikan kedua besaran kebijakan tersebut.

Pada triwulan I 2025, inisiatif pengembangan konektivitas sistem pembayaran lintas negara difokuskan pada eksplorasi pengembangan *cross-border fast payment*, khususnya terkait partisipasi Bank Indonesia dalam Proyek Nexus. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan konektivitas sistem pembayaran antarnegara yang lebih cepat, murah, mudah, transparan, dan inklusif. Proyek Nexus merupakan inisiatif Bank for International Settlements (BIS) melalui BIS Innovation Hub yang bertujuan untuk meningkatkan pembayaran antarnegara dengan menghubungkan berbagai pembayaran instan domestik (*instant payment systems/IPS*) secara global. Nexus dirancang untuk menstandarisasi metode konektivitas agar IPS domestik dapat terhubung satu sama lain, sehingga memberikan solusi pembayaran antarnegara yang efisien dan terjangkau bagi individu dan pelaku usaha guna meningkatkan partisipasi ekonomi global.

5) Pengembangan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran

Bank Indonesia terus melanjutkan eksplorasi dan eksperimentasi terkait pengembangan infrastruktur data sistem pembayaran untuk memperkuat integritas transaksi dan mendukung perumusan kebijakan. Arah strategis ini ditempuh melalui pengembangan Payment ID, pengembangan sistem *capturing* untuk perolehan data granular, serta BI-Payment Info sebagai infrastruktur publik untuk pemberian layanan pada berbagai *usecase*. Payment ID akan dikembangkan sebagai *unique identifier* untuk mengoptimalkan data granular. Selanjutnya, perolehan data profil dan transaksi granular dilakukan melalui sistem *capturing* yang akan dibangun melalui mekanisme *push* untuk perolehan data periodik dan mekanisme *pull* untuk perolehan data insidental. Adapun pengembangan BI-Payment Info diarahkan sebagai infrastruktur publik yang menyediakan antarmuka dalam pengolahan data granular (*data as a services*).

Upaya pengembangan pusat data sistem pembayaran pada triwulan I 2025 difokuskan pada eksplorasi dan eksperimentasi Payment ID. Pada tahap ini, Bank Indonesia tengah menyusun konsepsi, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, dan melakukan pendalaman atas landasan hukum dalam ekperimentasi Payment ID. Pemanfaatan Payment ID

setidaknya akan mencakup tiga fungsi, yaitu sebagai: (i) kunci identifikasi untuk membentuk data profil pelaku sistem pembayaran, (ii) kunci otentifikasi data dalam pemrosesan transaksi, serta (iii) kunci unik dalam proses agregasi data profil individu dengan data transaksional granular. Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam mendukung integrasi dan konsolidasi data transaksi secara nasional, sekaligus memperkuat pengawasan dan keamanan sistem pembayaran di era digital. Dengan identifikasi transaksi yang lebih presisi, otoritas dapat melakukan deteksi lebih dini terhadap potensi *fraud*, mengidentifikasi pola transaksi tidak wajar, serta memitigasi risiko sistemik secara lebih efektif. Ke depan, *Payment ID* akan menjadi bagian dari arsitektur sistem pembayaran nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta sejalan dengan prinsip interoperabilitas, inklusivitas, dan keamanan.

4.1.4. Transformasi di Bidang Kebijakan Pendukung

1) Reformasi Regulasi Area Kebijakan Pendukung

a) Ketentuan mengenai Kebijakan PUVA

Bank Indonesia terus memperkuat pengaturan, pengembangan, dan pengawasan PUVA melalui reformasi pengaturan di PUVA yang sejalan dengan amanat UU P2SK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penguatan kewenangan dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan PUVA tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mewujudkan PUVA yang modern dan maju sebagaimana dimuat dalam BPPU 2030. PUVA yang modern dan maju akan berkontribusi dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, yang selanjutnya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi nasional.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah menyusun arah baru dalam pendalaman reformasi pengaturan PUVA melalui penerbitan ketentuan internal tentang Kebijakan PUVA yang mengatur kerangka kerja kebijakan PUVA. Ketentuan internal terkait PUVA disusun secara *principle-based*, sehingga diharapkan lebih adaptif (*agile*) terhadap dinamika pasar dan kebijakan Bank Indonesia, serta selaras dengan kebutuhan industri (*industry friendly*), mengakomodasi inovasi dengan memperhatikan aspek digitalisasi, inklusif dan mendukung keuangan berkelanjutan, serta memenuhi *international best practices*.

Selain ketentuan internal tentang Kebijakan PUVA, Bank Indonesia menerbitkan beberapa ketentuan internal lain terkait PUVA sebagai ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 6 Tahun 2024 tentang PUVA. Ketentuan pelaksanaan dimaksud mencakup ketentuan terkait *dealer* utama PUVA penyelesaian transaksi bilateral dalam mata uang lokal, serta lembaga pendukung dan profesi penunjang PUVA.

b) Ketentuan mengenai Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia (DIBI)

Perumusan kebijakan Bank Indonesia yang efektif, kredibel, dan akuntabel menuntut ketersediaan data dan informasi yang komprehensif, tepercaya, akurat, mutakhir, serta mudah diakses. Penyediaan data dan informasi yang berkualitas didukung oleh perumusan dan implementasi kebijakan data dan informasi dengan tata kelola yang baik dan profesional melalui kerangka kebijakan terpadu.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan internal tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia (DIBI). Ketentuan internal tentang Kebijakan DIBI melengkapi PBI Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia (PBI DIBI) dengan pengaturan terkait kerangka kerja kebijakan yang bertata kelola dalam mendukung perumusan dan implementasi kebijakan data dan informasi Bank Indonesia, yang didasarkan pada prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia yang baik dan profesional. Tujuan pengaturan kebijakan DIBI dalam peraturan ini adalah untuk: i) menjadi pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan DIBI agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam UU; ii) menjadi acuan bagi pembentukan ketentuan pelaksanaan terkait DIBI; dan iii) menjadi acuan bagi internal Bank Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan DIBI. Kebijakan DIBI dilaksanakan untuk mencapai sasaran ketersediaan data dan informasi yang berkualitas guna memenuhi: i) kebutuhan perumusan dan pelaksanaan BKBI; ii) komitmen nasional dan internasional; dan iii) penyediaan data dan informasi bagi publik. Pelaksanaan kebijakan DIBI didasarkan pada prinsip dasar relevansi, mengacu pada standar profesional dan praktik yang terbaik, berbasis teknologi yang tepat, perlindungan data dan informasi, serta koordinasi dan sinergi.



Rapat Koordinasi Stabilitas Ekonomi dan Ketahanan Sektor Keuangan antara Bank Indonesia (BI) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta

2) Pengembangan Infrastruktur Pasar Keuangan

Bank Indonesia terus mendukung upaya Pembentukan Kelembagaan dan Pengembangan *Central Counterparty* (CCP) untuk Transaksi Suku Bunga dan Nilai Tukar di PUVA. CCP merupakan infrastruktur pasar keuangan yang menyediakan jasa kliring, penjaminan, dan manajemen risiko untuk transaksi antar bank di PUVA. Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan penyelenggara CCP yaitu PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk memastikan pengembangan CCP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar internasional *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI) yang dikeluarkan CPMI-IOSCO. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung tata kelola dan manajemen risiko CCP yang komprehensif. Pengembangan CCP dilakukan dengan memperhatikan aspek 3I (interkoneksi, interoperabilitas dan integrasi) dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya. Bank Indonesia terus melakukan koordinasi dengan penyelenggara CCP, perbankan, dan penyedia *electronic trading platform* untuk mengembangkan konektivitas sistem CCP yang *straight through processing* (STP), termasuk dengan BI-RTGS dan BI-SSSS yang merupakan sistem setelmen dana dan surat berharga. Di samping itu, Bank Indonesia juga berkoordinasi erat bersama OJK dalam mengimplementasi pengaturan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar antar bank yang tidak dikliringkan melalui CCP (*Non-Centrally Cleared Derivative* atau NCCD) dan *capital requirement* bank atas eksposur bank terhadap CCP yang diterbitkan oleh OJK.

Pada triwulan I tahun 2025, Bank Indonesia mendorong upaya pengembangan CCP dengan

didukung pihak terkait seperti KPEI selaku penyelenggara CCP dan Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO). Merujuk *roadmap* pengembangan CCP sebagaimana tercantum dalam BPPU 2030, pengembangan CCP dilakukan pada tiga aspek utama, yaitu penyempurnaan sistem dan aspek operasional CCP, perluasan jenis transaksi yang dapat difasilitasi oleh CCP, serta penguatan kelembagaan CCP. Penyempurnaan sistem antara lain melalui pengembangan modul *Tri-Party Agent* (TPA) repo oleh KPEI untuk memperluas layanan CCP pada transaksi repo serta pengembangan interkoneksi CCP oleh KPEI dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya seperti sistem transaksi antar pelaku pasar. Penyempurnaan aspek operasional CCP dilakukan melalui penyempurnaan pedoman akuntansi transaksi yang dikliringkan di CCP, berkoordinasi dengan APUVINDO. Perluasan jenis transaksi yang dapat difasilitasi oleh CCP mencakup transaksi repo, seiring dengan penyiapan layanan TPA repo oleh KPEI. Dari sisi kelembagaan CCP, penguatan dilakukan melalui koordinasi dengan otoritas global untuk memperoleh status *recognized* CCP dari otoritas global yang meliputi otoritas di Eropa, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang.

Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas operasional CCP dalam mendukung stabilitas dan efisiensi pasar keuangan Indonesia. Upaya ini juga merupakan bagian dari penguatan infrastruktur pasar keuangan di PUVA, yang bertujuan mengakselerasi pendalaman PUVA, serta mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter guna meningkatkan kapasitas pembiayaan perekonomian nasional.

Ke depan, seiring dengan rencana implementasi pengaturan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar antar bank yang tidak dikliringkan melalui CCP atau *Non-Centrally Cleared Derivative* (NCCD) dan ketentuan *capital requirement* bank atas eksposur bank ke CCP yang diterbitkan oleh OJK, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan. Dalam hal ini, Bank Indonesia mendorong KPEI sebagai penyelenggara CCP untuk memperluas anggota kliring yang saat ini masih terbatas pada 8 (delapan) bank.

4.2 Transformasi Kelembagaan

Pada tahun 2025, Bank Indonesia terus melanjutkan penguatan kerangka Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK) sebagai bentuk penerapan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, serta dukungan kelembagaan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sebagaimana mandat UU P2SK. Penguatan kerangka BKK merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh elemen kelembagaan Bank Indonesia mampu mendukung pencapaian tujuan institusi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip kepatuhan. Selanjutnya, penguatan kerangka BKK diwujudkan melalui reformasi regulasi berupa penyusunan ketentuan internal tentang BKK dan ketentuan turunan lainnya di area kelembagaan.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan internal tentang BKK yang mengintegrasikan kebijakan dukungan organisasi, kebijakan sumber daya, dan kebijakan tata kelola. Ketiga lingkup kebijakan kelembagaan tersebut saling melengkapi dan memperkuat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia. Penerapan BKK dilakukan melalui strategi 3P, yaitu perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap masing-masing kebijakan di area kelembagaan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Ketentuan internal tentang BKK disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan BKK dan pembentukan peraturan terkait pelaksanaan BKK. Di samping itu, ketentuan internal tentang BKK juga disusun sebagai acuan untuk mengintegrasikan keseluruhan proses BKK dengan BKBI, sehingga dapat menyelaraskan strategi jangka menengah dan tahunan antara area kelembagaan dan area kebijakan.

Sejalan dengan itu, sepanjang triwulan I 2025, Bank Indonesia melakukan penajaman agenda transformasi di area kelembagaan yang mencakup 3 area, yaitu: (i) Organisasi dan Proses Kerja; (ii) SDM dan Budaya Kerja; dan (iii) Digital. Transformasi Kelembagaan diarahkan pada penguatan organisasi yang optimal, digitalisasi proses kerja yang efektif dan efisien, serta pengembangan SDM yang berintegritas, kompeten, dan adaptif. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat proses kerja kebijakan dan kelembagaan guna mewujudkan visi sebagai bank sentral digital terdepan melalui *Digital Business Process Reengineering* (BPR).

4.2.1. Transformasi Organisasi dan Proses Kerja

Pada area Organisasi dan Proses Kerja, fokus transformasi diarahkan untuk penguatan kerangka Bauran Kebijakan Kelembagaan Bank Indonesia dan penyempurnaan ketentuan kelembagaan, termasuk pengaturan lanjutan atas implementasi UU P2SK. Upaya ini didukung oleh *streamlining* proses bisnis dan proses kerja berbasis digital. Hal ini ditempuh guna mewujudkan organisasi dengan proses bisnis yang lebih sederhana, ringkas, dan standar, serta proses kerja yang *agile* dan sejalan dengan kebutuhan di era digital.

1) Reformasi Regulasi di area Organisasi dan Proses Kerja

Reformasi regulasi pada area Organisasi dan Proses Kerja merupakan langkah transformatif yang dilakukan untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan efisiensi proses bisnis di Bank Indonesia. Langkah ini ditempuh untuk memastikan organisasi dan proses kerja di Bank Indonesia senantiasa dapat beradaptasi dengan dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks. Reformasi regulasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan maupun pelaksanaan tugas pada area organisasi dan proses kerja dapat berjalan secara optimal.

a) Ketentuan turunan Bauran Kebijakan Kelembagaan

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan turunan BKK. Ketentuan turunan dimaksud terdiri dari ketentuan internal terkait: (i) manajemen strategis dan program kerja; (ii) manajemen proses bisnis dan fungsi organisasi; (iii) manajemen risiko; (iv) manajemen audit interen; dan (v) manajemen fungsi hukum. Penerbitan ketentuan ini melengkapi penguatan ketentuan terkait sumber daya, yang mencakup manajemen sumber daya keuangan dan pengelolaan kekayaan, yang telah diterbitkan pada 2024. Penguatan landasan hukum di area kelembagaan ditujukan untuk memastikan integrasi antarfungsi di area kelembagaan guna mencapai sasaran BKK dengan dukungan organisasi yang efektif, penggunaan sumber daya yang efisien dan tata kelola kelembagaan yang berkepatuhan. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia juga melakukan penguatan aspek *governance* melalui integrasi tata kelola. Integrasi ini dilakukan melalui penyempurnaan organisasi tiga satuan kerja yang menjalankan fungsi tata kelola dan penyusunan asesmen tata kelola

terintegrasi yang akan difokuskan pada area-area yang memiliki risiko tinggi.

b) Ketentuan mengenai Sistem Pengambilan Keputusan di Bank Indonesia dan Peran Anggota Dewan Gubernur (SPK)

Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik dan profesional, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan internal terkait proses pengambilan keputusan di Bank Indonesia dan peran Anggota Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan internal terkait Sistem Pengambilan Keputusan di Bank Indonesia dan Peran Anggota Dewan Gubernur sebagai landasan dalam setiap proses pengambilan keputusan di Bank Indonesia. Ada pun keputusan di Bank Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu Kebijakan Prinsipil dan Strategis, Implementasi Kebijakan Prinsipil dan Strategis, dan Kebijakan yang Tidak Dinyatakan Prinsipil dan Strategis. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara adaptif dan *streamlined* melalui penerapan prinsip 3S (Simplifikasi, Standarisasi, dan Sistemisasi). Selain itu, dalam ketentuan tersebut juga diatur mengenai peran Anggota Dewan Gubernur baik dalam Rapat Dewan Gubernur dan Komite, sebagai pengarah program strategis dan program transformasi, maupun sebagai koordinator pelaksanaan tugas operasional satuan kerja, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, keahlian, pengalaman, kapasitas, dan keseimbangan beban tugas dan wewenang Anggota Dewan Gubernur.

2) Penguatan dan Penyempurnaan Organisasi Bank Indonesia

Bank Indonesia melakukan penguatan strategi organisasi sebagai bagian dari upaya menjalankan mandat UU Bank Indonesia yang terakhir diubah dengan UU P2SK. Sejalan dengan penguatan strategi tersebut, penyempurnaan organisasi Bank Indonesia dilakukan dengan memperhatikan kerangka strategi masing-masing area (*strategy driven*), dengan tetap menjaga kesinambungan organisasi dengan proses bisnis satuan kerja, adopsi praktik terbaik (*best practice*), serta memanfaatkan dukungan infrastruktur dan teknologi sesuai kebutuhan. Seluruh upaya ini dilandaskan pada prinsip 3S (Simplifikasi, Standardisasi, dan Sistemisasi) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia secara efektif, efisien, dan berkepatuhan.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan organisasi satuan kerja fungsi tata kelola yang mencakup fungsi hukum, fungsi manajemen risiko, dan fungsi audit intern. Penguatan organisasi pada tiga fungsi tersebut sebagai wujud komitmen Bank Indonesia untuk memperkuat sistem tata kelola yang selama ini telah berjalan baik agar dapat mengawal pelaksanaan tugas dan wewenang serta pencapaian tujuan Bank Indonesia secara lebih efektif, efisien, taat asas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan mandat UU P2SK, khususnya dalam Pasal 58, yang menegaskan bahwa Bank Indonesia wajib mengutamakan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional. Penguatan integrasi tata kelola ini juga mengacu pada *best practices* tata kelola di berbagai bank sentral di dunia yang meliputi asesmen kecukupan ketentuan, pengambilan keputusan yang jelas dan sesuai kewenangan (*check & balance*), serta kepatuhan atas implementasi ketentuan (*compliance*).

Lebih lanjut, Bank Indonesia melakukan penguatan fungsi organisasi untuk mendukung pelaksanaan koordinasi dan dukungan operasional pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia di Komplek Perkantoran Bank Indonesia (KOPERBI) IKN. Langkah ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2022 yang mengamanatkan Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga negara yang termasuk dalam kepindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada triwulan I 2025, optimalisasi mekanisme koordinasi pelaksanaan tugas unit kerja Bank Indonesia di KOPERBI IKN terus dilakukan. Selain itu, Bank Indonesia juga melanjutkan penugasan SDM yang berkantor di KOPERBI IKN secara berkala dan menyelaraskan *timeline* pemindahan SDM sesuai dengan rencana persiapan pemindahan Ibu Kota Negara serta memperhatikan kesiapan infrastruktur dasar yang diperlukan. Seluruh langkah penguatan fungsi organisasi Bank Indonesia dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, serta *check and balance* guna menjamin pelaksanaan tugas yang akuntabel dan transparan.

3) Business Process Re-engineering (BPR)

Sejalan dengan visi organisasi sebagai bank sentral digital terdepan, penyempurnaan *Digital Workplace* (DWP) terus dilakukan. Hal tersebut ditempuh melalui penajaman proses bisnis, evaluasi kebutuhan, pengembangan *platform*, dan pengujian untuk meningkatkan efektivitas proses pengambilan

keputusan melalui eliminasi redundansi dan digitalisasi proses dengan tetap mengedepankan tata kelola, serta kolaborasi proses kerja antar satuan kerja/unit kerja sejalan dengan prinsip *one input, one process, dan multi purposes*.

Melanjutkan pengembangan *Digital Workplace* yang selaras dengan konsepsi *Integrated Digital Central Bank* (IDCB), pada triwulan I 2025 dilaksanakan implementasi konsepsi DWP terbaru ('New DWP') pada RDG Bulanan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan hasil pengembangan New DWP mampu memfasilitasi proses kolaborasi materi di berbagai tahapan dan pengambilan keputusan, serta pemanfaatan informasi dari pusat data. Hasil evaluasi akan menjadi input pengembangan pada tahapan berikutnya. Sebagai bagian dari manajemen perubahan agar pemanfaatan DWP berjalan optimal, dilakukan juga sosialisasi, pembaruan dokumen pedoman, infografis, dan pengkinian *frequently asked question* (FAQ) secara berkala, serta ketersediaan tim layanan dalam hal dibutuhkan *troubleshooting* bersama pengguna. Pengembangan DWP juga diselaraskan dengan berbagai penyempurnaan ketentuan terkait, diantaranya ketentuan mengenai BKBI dan ketentuan mengenai SPK. Ke depan, pengembangan DWP akan terus dilanjutkan sesuai kebutuhan pada area-area lainnya.

4.3. Transformasi SDM dan Budaya Kerja

Pelaksanaan digital BPR juga didukung penguatan *aspek people* melalui penguatan kepemimpinan, pengembangan *new capabilities*, serta penguatan *employee value proposition* (EVP). Transformasi SDM dilakukan melalui penerapan sistem kerja unggul di era digital yang didukung oleh fasilitas fisik dan digital untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal. Sistem kerja ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja di seluruh lini organisasi. Selain itu, sistem kerja unggul di era digital diharapkan dapat memperkuat EVP Bank Indonesia yang pada akhirnya berdampak positif terhadap upaya memenuhi SDM dengan talenta terbaik dan menciptakan suksesi kepemimpinan yang berkelanjutan.

1) Penguatan Strategi Perencanaan SDM dan Suksesi Kepemimpinan

Bank Indonesia terus mendorong SDM yang berkinerja tinggi dan berakhlak mulia guna mewujudkan visi menjadi bank sentral digital terdepan. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia mengoptimalkan strategi pengelolaan SDM yang didukung oleh *Digital Business Process* (DBP). Hal ini diharapkan dapat menghasilkan SDM yang unggul

baik dari sisi kompetensi teknis maupun kompetensi perilaku. Pengelolaan SDM juga diarahkan untuk menciptakan calon pemimpin Bank Indonesia yang profesional, dengan memiliki aspek 3-Smart, yaitu: berkompetensi (*book smart*), berpengalaman (*street smart*), dan berperilaku mulia (*spiritual smart*).

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah menyusun perencanaan SDM termasuk strategi pemenuhannya. Perencanaan SDM dimaksud juga mempertimbangkan optimalisasi formasi SDM sebagai dampak implementasi digitalisasi proses bisnis di Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia telah menyusun konsepsi kebijakan dan pedoman Manajemen Karier dalam rangka akselerasi pencapaian aspek 3-Smart yang akan dituangkan dalam ketentuan internal Manajemen Karier, pedoman teknis Manajemen Karier dan pedoman teknis Pemenuhan Internal untuk mengakomodir DBP Manajemen Karier, serta skema pemenuhan SDM internal yang baru. Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Bank Indonesia telah melakukan sosialisasi kepada pegawai salah satunya melalui Program DIKSI (Diskusi Manajemen Karier, Kompetensi, Kinerja, dan *Sharing Insight*) baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.

2) Penguatan Strategi Pemenuhan SDM

Bank Indonesia terus memperkuat pemenuhan SDM berkualitas melalui transformasi strategi rekrutmen dan penguatan manajemen karier, di tengah disrupsi inovasi era digital yang memengaruhi pola ketenagakerjaan dan kebutuhan keahlian baru. Upaya ini ditujukan untuk memastikan tersedianya SDM yang adaptif, memiliki kepemimpinan kuat, serta mampu bekerja secara optimal dalam menghadapi tantangan digitalisasi.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia terus melakukan penguatan strategi pemenuhan SDM melalui penyusunan pokok-pokok perubahan dalam rangka memperkuat *Employee Value Proposition* (EVP) 3.0. EVP 3.0 menjadi salah satu prioritas transformasi kebijakan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan *engagement* pegawai Bank Indonesia yang meliputi program remunerasi kompetitif pemeliharaan kesehatan dengan fokus pada kesehatan fisik, dan pensiun tenang dengan fokus pada program pensiun berkah. Penguatan ini akan dituangkan dalam bentuk ketentuan terkait remunerasi pegawai. Komitmen Bank Indonesia terhadap penguatan EVP juga kembali mendapat pengakuan internasional melalui perolehan Stevie Awards 2025 dalam kategori *Innovation in Human*

Resources Management, Planning and Practice. Di sisi implementasi, pemenuhan SDM melalui rekrutmen eksternal telah dilaksanakan sesuai perencanaan antara lain melalui jalur Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manajer (PCPM), *Multi Level Entry* (MLE), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan Tenaga Kerja *Outsourcing* (TKO). Sementara itu, pemenuhan SDM internal sebagai dampak dari penyempurnaan organisasi juga terus dilanjutkan secara bertahap untuk mendukung pelaksanaan tugas di satuan kerja.

3) Pengembangan Kapabilitas Digital SDM Bank Indonesia

Pengembangan kapabilitas digital bagi SDM merupakan bagian penting dari Transformasi SDM dan Budaya Kerja di Bank Indonesia. Kapabilitas ini diperlukan untuk mendukung digitalisasi proses kerja dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan kapabilitas digital yang kuat, SDM dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas, mendorong efisiensi, dan memperkuat daya saing kelembagaan di era digital.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah membentuk desain dan modul pembelajaran berbasis konsepsi kurikulum Bank Sentral Digital, termasuk kurikulum digital untuk mendukung digitalisasi proses analisis indikator utama BKBI dan proses analisis pada *OM Pro Market*. Program pembelajaran didukung oleh narasumber ahli di bidang *data analytics* dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia serta infrastruktur pembelajaran yang memadai. Pada modul *on boarding* untuk pegawai baru, disediakan *bootcamp* digital guna membangun pemahaman awal mengenai peran dan fungsi bank sentral digital. Infrastruktur pembelajaran diperkuat melalui Learning Management System (LMS) dan *Digital/Cyber Library* yang terus dikembangkan, antara lain melalui pengayaan modul *e-learning* dari internal Bank Indonesia maupun mitra kerja. Sistem ini memungkinkan proses pembelajaran pegawai dilakukan secara fleksibel, kapan saja dan di mana saja, sehingga lebih optimal dan adaptif terhadap kebutuhan pembelajaran berkelanjutan. Selain itu, Bank Indonesia juga mengembangkan kapabilitas lanjutan untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang *data science*, *data analytics*, dan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pelaksanaan tugas bank sentral, serta memperluas penguasaan terhadap ekonomi dan keuangan hijau sebagai bagian dari penguatan peran strategis Bank Indonesia di era transformasi digital dan keberlanjutan.

Bank Indonesia telah meluncurkan *HR Super Apps Tahap 1* pada 18 Januari 2025. *HR Super Apps*, yang diluncurkan bersamaan dengan kegiatan Festival Budaya Kerja, merupakan *platform* integratif untuk mempermudah pegawai dalam merencanakan karier, meningkatkan kinerja, mengembangkan kompetensi, dan menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Inisiatif ini merupakan bentuk akselerasi pencapaian profil SDM *3-Smart* dan penguatan sistem manajemen SDM. Pengembangan *HR Super Apps Tahap 1* dilakukan dengan menggunakan *data analytics Human Capital Report* (HCR) melalui pemetaan atas metadata manajemen karier, manajemen kinerja, pengembangan kompetensi, dan perencanaan SDM. Ke depan, pengembangan fitur *HR Super Apps* akan terus dilakukan mencakup informasi kepegawaian, kesehatan, kompetensi, serta integrasi fitur *chatbot* untuk mendukung *employee experience* secara menyeluruh dan mendukung proses pengambilan keputusan kebijakan SDM. Atas inovasi ini, *HR Super Apps* meraih penghargaan *Stevie Awards 2025* untuk kategori *Innovative Use of Technology in Human Resources*.

4.4. Transformasi Digital

Transformasi digital Bank Indonesia terus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan transformasi kebijakan dan kelembagaan guna tercapainya visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan. Transformasi Digital dilakukan melalui perwujudan tiga visi inovasi digital yang meliputi: (i) pengembangan digitalisasi di area Sistem Pembayaran dan Pendalaman Pasar Uang (*integrated digital payment system and finance*); (ii) pengembangan digitalisasi pendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, serta SDM (*integrated digital central bank*); serta (iii) peningkatan kapabilitas teknologi dan pengamanan secara *end-to-end* (*integrated digital technology*).

1) Pengembangan *Integrated Digital Payment System and Finance*

Bank Indonesia terus melakukan digitalisasi di area sistem pembayaran dan pendalaman pasar uang. Digitalisasi sistem pembayaran dilakukan melalui pengembangan *retail payment* melalui sistem New BI-FAST dan *wholesale payment* melalui sistem BI-RTGS Gen III. Digitalisasi sistem pendalaman pasar uang dilakukan melalui pengembangan sistem BI-SSSS Gen III.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia tengah melakukan upaya pengembangan *integrated digital payment system and finance* melalui beberapa inisiatif. Inisiatif dimaksud mencakup (i) pengembangan New BI-

FAST terkait dengan aspek pemisahan *account inquiry*, *clearing*, dan *settlement*, serta peningkatan performa dan ketahanan dari sistem BI-FAST eksisting; (ii) pengembangan sistem BI-RTGS Gen III terkait dengan optimalisasi likuiditas hingga adopsi standarisasi ISO 20022; serta (iii) pengembangan sistem BI-SSSS Gen III terkait dengan penyempurnaan proses kliring, *hybrid account* hingga standarisasi ISO 20022. Proses pengembangan sistem tersebut berada pada tahap penyusunan konsepsi perancangan, baik dari sisi aspek bisnis, layanan, maupun aspek teknologi digital.

2) Pengembangan *Integrated Digital Central Bank* (IDCB)

Bank Indonesia terus melanjutkan pengembangan digitalisasi *Decision Making Process* (DMP) dan BPR di area perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, serta pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu pengembangan IDCB juga tengah memanfaatkan data dan AI sebagai katalisator dalam transformasi proses bisnis.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia tengah melakukan upaya pengembangan IDCB melalui beberapa inisiatif, yaitu pengembangan DWP Perumusan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan RDG Bulanan, dan pengembangan DWP Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan RDG Mingguan. Proses pengembangan IDCB telah selesai pada tahap penyusunan konsepsi perancangan di area aspek bisnis, layanan, dan teknologi digital. Selain itu, pemanfaatan data dan AI, diperkuat dengan penambahan 9 analisis indikator terkait Operasi Moneter dalam layanan penyediaan data rutin mengacu pada *Advanced Release Calendar* (ARC) yang digunakan pada RDG Mingguan.

Bank Indonesia terus memperluas inovasi data berbasis AI/ML di sektor Moneter, Makroprudensial, dan Sistem Pembayaran. AI dan ML tersebut dikembangkan oleh *engineer*, *data scientist*, serta *economist* Bank Indonesia mengacu pada prinsip VITAL (*Visualizing the outcomes*, *Theory understood*, *Algorithm fitted*, dan *Learn the meaning*) agar terintegrasi optimal dalam proses bisnis. Pada triwulan I 2025, pemanfaatan AI/ML dalam proses pengambilan keputusan pada area Moneter dilakukan melalui pengembangan model proyeksi nilai tukar yang akan disajikan dalam bahan RDG serta *network analytics* untuk mengidentifikasi perilaku pasar di pasar uang dan pasar valuta asing. Model proyeksi dimaksud dikembangkan antara lain untuk mendukung penyusunan proyeksi inflasi (*core* dan *volatile food*), PDB (komponen konsumsi rumah tangga, perumahan dan perlengkapan, serta transport dan komunikasi), nilai tukar, *yield USD*, serta *portfolio inflows*. Pada area Makroprudensial, AI/ML berperan

untuk membantu penyusunan *near-term forecast* (NTF) yang meliputi beberapa indikator utama yaitu kredit total, kredit konsumsi, kredit modal kerja, *non performing loan*, *interest coverage ratio*, suku bunga kredit, *Yield SBN 10 Tahun*, *capital expenditure*, dana pihak ketiga, rasio AL/DPK, suku bunga deposito, dan kredit perumahan rakyat. Hasil NTF tersebut digunakan untuk melengkapi cakupan asesmen makroprudensial berbasis AI/ML. Sementara itu, pada area Sistem Pembayaran, AI dapat menganalisis data dalam skala besar (*big data*) seperti analisis transaksi berbasis simpanan, berbasis uang elektronik, dan berbasis kartu kredit, termasuk interkoneksi antarpelaku transaksi.

3) Pengembangan *Integrated Digital Technology*

Bank Indonesia terus memperkuat infrastruktur teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas aset Teknologi Digital (TD) dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Upaya pengembangan ditempuh melalui adopsi berbagai teknologi terkini, penguatan, serta peningkatan infrastruktur teknologi yang tersedia saat ini. Pengembangan kapabilitas teknologi juga dilakukan di area Pusat Data melalui digitalisasi pengolahan data (*data factory*), eksperimentasi inovasi data, serta eksplorasi teknologi data dan pengembangan solusi teknologi Pusat Data.

Pada Triwulan I 2025, Bank Indonesia menyelesaikan penyusunan konsepsi desain infrastruktur teknologi pendukung guna memodernisasi pembangunan KOPERBI dan merancang solusi pemantauan untuk meningkatkan mutu layanan operasional atas aplikasi serta infrastruktur digital yang sudah berjalan. Bank Indonesia juga memperkuat data center dengan menambah fasilitas pendukung berstandar internasional, sekaligus terus meningkatkan dan memperbesar kapasitas perangkat teknologi digital. Sebagai bagian dari penguatan Pusat Data, Bank Indonesia memperluas digitalisasi pengolahan data agar informasi mengalir secara *straight through processing*, dari sumber data hingga menjadi *actionable insight* yang didukung dengan AI/ML. Untuk memperkuat kapabilitas pusat data, Bank Indonesia mengembangkan *platform* pusat data secara bertahap, termasuk Portal Data yang sedang disiapkan agar hasil pengolahan data dapat diakses oleh internal maupun eksternal Bank Indonesia. Portal Data dimaksud melengkapi infrastruktur data yang sudah ada seperti *Data Lake*, *Catalog*, *Preparation*, *Visualization*, dan *Virtualization Tools*, dan didukung oleh teknologi AI yang membantu analisis menyusun narasi *nowcasting* serta *forecasting*.





Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

BAB 5

CAPAIAN KINERJA BANK INDONESIA



Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia dapat mencapai berbagai target Indikator Kinerja Utama (IKU) didukung program transformasi dan respons kebijakan di tengah beratnya tantangan lingkungan strategis global, nasional, dan kelembagaan. Capaian ini menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh penajaman sejumlah agenda transformasi, baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Selain itu, berbagai upaya penguatan kerangka dan implementasi sistem tata kelola yang baik dan profesional juga turut mendukung pencapaian kinerja Bank Indonesia. Penerapan kebijakan yang konsisten dan bertata kelola, inovasi yang berkelanjutan, serta eratnya sinergi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sepanjang triwulan I 2025 telah menghasilkan persepsi yang positif dari mitra kerja, termasuk sejumlah pengakuan dan penghargaan internasional.

Pencapaian kinerja Bank Indonesia sepanjang triwulan I 2025 tecermin pada capaian IKU Bank Indonesia dalam 12 Program Strategis (PS) sebagai berikut:

PS 01 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus berupaya untuk memperkuat respons kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global yang berubah cepat dengan ketidakpastian

tinggi akibat kebijakan tarif AS dan pembalikan aliran portfolio asing yang berdampak pada pelemahan nilai tukar negara-negara *Emerging Market Economies* (EMEs), termasuk Indonesia. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia terus berupaya untuk mendorong efektivitas transmisi kebijakan moneter. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui penguatan *framework* bauran kebijakan ekonomi dan moneter yang mendukung efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia. Penguatan *framework* pengelolaan moneter juga diintegrasikan dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar sesuai fundamental untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

1) Inflasi inti yang rendah dan stabil pada kisaran sasarannya

Pada triwulan I 2025, inflasi inti terkendali sebesar 2,48% (yoy), sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan (BI-Rate) dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok *volatile food* (VF) tercatat sebesar 0,37% (yoy) didukung oleh kecukupan pasokan komoditas pangan utama dan eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional



Rapat Koordinasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Pangan antara Bank Indonesia dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta

Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Sementara itu, kelompok *administered prices* tercatat deflasi sebesar 3,16% (yoy), terutama dipengaruhi oleh implementasi kebijakan diskon tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya terpasang listrik < 2.200 VA.

Bank Indonesia mengarahkan kebijakan moneter untuk memastikan inflasi terjaga dalam kisaran sasaran dan nilai tukar terjaga stabil dengan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada Januari 2025, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga kebijakan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, terdaganya nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk mengendalikan inflasi dalam sasarannya, dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga akhir triwulan I 2025, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% sebagai bentuk konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali sesuai sasaran. Bank Indonesia juga memperkuat sinergi dan koordinasi pengendalian inflasi dengan Pemerintah pusat dan daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan implementasi GNPIP di berbagai daerah, serta melakukan koordinasi pengendalian inflasi bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas). Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan BI-Rate lebih lanjut dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar Rupiah, prospek inflasi, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi.

2) Terjangkarnya ekspektasi inflasi sesuai dengan target inflasi

Ekspektasi inflasi tetap terkendali didukung oleh konsistensi bauran kebijakan. Hasil survei *Consensus Forecast* (CF) yang dirilis pada Maret 2025 menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi untuk akhir periode 2025 (*end of period*/EoP) berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$, yakni sebesar 2,6% (yoy), atau lebih rendah daripada hasil survei CF pada Februari 2025 sebesar 2,9% (yoy). Selain itu, berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha pada triwulan I 2025, responden memprakirakan rata-rata inflasi nasional tahun 2025 sebesar 2,96% (yoy), atau berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2025 sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Sejalan dengan itu, hasil Survei Perdagangan Eceran pada Maret 2025 menunjukkan bahwa ekspektasi harga untuk tiga bulan dan enam bulan yang akan datang diperkirakan melandai. Prakiraan tersebut tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Juni dan September 2025 yang masing-masing tercatat sebesar 146,4 dan 153,1, lebih rendah

daripada periode sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 148,3 dan 155,5.

Bank Indonesia secara konsisten menetapkan suku bunga kebijakan moneter secara *forward looking* dan *pre-emptive* untuk mengarahkan ekspektasi inflasi dalam dua tahun ke depan tetap terkendali sesuai sasaran. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia pada Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan suku bunga kebijakan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%. Kebijakan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, terdaganya nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk mengendalikan inflasi dalam sasarannya, serta perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pada Februari dan Maret 2025, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% sebagai bentuk konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam sasarannya, dengan inflasi inti yang diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran. Bank Indonesia terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan BI-Rate dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar Rupiah.

3) Tercapainya suku bunga pasar uang sesuai dengan suku bunga kebijakan yang ditetapkan Rapat Dewan Gubernur

Bank Indonesia mengendalikan suku bunga antara lain melalui penetapan suku bunga kebijakan, pelaksanaan Operasi Moneter kontraksi dan ekspansi, serta penguatan proyeksi likuiditas harian. Pada triwulan I 2025, sejalan dengan pengendalian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, suku bunga pasar uang (IndONIA) bergerak dalam kisaran BI-Rate, yaitu 6,67% pada tanggal 27 Maret 2025. Sementara itu, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9 dan 12 bulan pada tanggal 21 Maret 2025 masing-masing sebesar 6,34%, 6,38%, dan 6,43%, menurun dibandingkan hasil lelang 27 Desember 2024 masing-masing sebesar 7,18%, 7,21%, dan 7,30%.

Penurunan suku bunga SRBI tersebut sejalan dengan penurunan BI-Rate dengan tetap mendorong efektivitas SRBI sebagai instrumen operasi moneter yang *pro-market*. Langkah ini juga mendukung penguatan struktur suku bunga untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan mendorong aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, pengendalian tingkat suku bunga dilakukan melalui penguatan

strategi transaksi *term repo* dan *swap* valuta asing yang kompetitif untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan.

Bank Indonesia terus mengoptimalkan instrumen OM *pro-market* melalui penerbitan SRBI untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter, memperdalam pasar uang, dan mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah. Penerbitan SRBI disambut baik oleh investor serta dapat menarik aliran masuk modal asing. Sejak 17 Mei 2024, lelang SRBI dilaksanakan melalui *dealer* utama di PUVA. Penguatan implementasi *dealer* utama diperkuat melalui pemenuhan kewajiban *dealer* utama di pasar uang antara lain transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi *repurchase agreement* (*repo*) antarpelaku pasar. Bank Indonesia juga melakukan optimalisasi instrumen SRBI melalui asesmen terkait *pricing yield* yang lebih baik, fitur SRBI yang lebih *market friendly*, dan perluasan basis investor nonresiden. Sampai dengan triwulan I 2025, total *outstanding* SRBI mencapai Rp891,13 triliun. Sementara itu, total volume transaksi di pasar sekunder mencapai Rp531 triliun atau 60% dibanding *outstanding* SRBI akhir tahun. Kepemilikan nonresiden tercatat mencapai Rp234,22 triliun atau 26,28% dari *outstanding* SRBI. Kenaikan kepemilikan nonresiden yang terjadi di triwulan I 2025 dipengaruhi eskalasi tensi perang dagang global.

4) Tercapainya stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental perekonomian

Pada triwulan I 2025, nilai tukar Rupiah relatif stabil di tengah tingginya ketidakpastian global akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang makin luas. Kebijakan tarif impor berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi AS yang lebih lambat di tengah meningkatnya pemberian insentif fiskal, sementara laju penurunan inflasi AS tidak secepat yang diperkirakan. Dengan perkembangan ini, nilai tukar Rupiah pada akhir triwulan I 2025 (hingga 27 Maret 2025) melemah sebesar 2,89% (ptp) dibandingkan dengan level nilai tukar akhir Desember 2025. Secara umum, perkembangan nilai tukar Rupiah sedikit lebih baik daripada mata uang *emerging market* lainnya, seperti Lira Turki yang melemah sebesar 7,38%. Nilai tukar Rupiah yang terkendali juga tecermin pada relatif stabilnya Rupiah terhadap kelompok mata uang negara-negara berkembang mitra dagang utama Indonesia serta nilai tukar Rupiah yang lebih kuat daripada kelompok mata uang negara-negara maju di luar dolar AS. Tetap stabilnya nilai tukar Rupiah tersebut sejalan dengan konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia.

Ke depan, nilai tukar Rupiah diperkirakan stabil didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Bank Indonesia terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi, termasuk strategi *triple intervention* pada transaksi *spot*, DNDF, dan SBN di pasar sekunder. Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi OM *pro-market* melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

5) Tercapainya kecukupan cadangan devisa yang memenuhi standar internasional dan sesuai target yang ditetapkan Rapat Dewan Gubernur

Pada triwulan I 2025, posisi cadangan devisa mencapai 157,1 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,46 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Posisi tersebut lebih tinggi daripada posisi akhir 2024 yang mencapai 155,7 miliar dolar AS. Peningkatan posisi cadangan devisa merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia yang senantiasa mengedepankan nilai yang terjaga (*preserved value*) dalam pengelolaan cadangan devisa. Bank Indonesia juga senantiasa melakukan penguatan strategi pengelolaan cadangan devisa dan optimalisasi proses bisnis melalui digitalisasi, sebagai bagian dari penguatan efektivitas dan efisiensi dalam menjaga kecukupan cadangan devisa.

Strategi pengelolaan cadangan devisa juga turut didukung oleh penguatan instrumen moneter berbasis valuta asing melalui penerbitan SVBI dan SUVBI. SVBI merupakan surat berharga valuta asing jangka pendek berbasis konvensional, sedangkan SUVBI adalah instrumen berbasis prinsip syariah. Keduanya menggunakan *underlying* berupa surat berharga valuta asing milik Bank Indonesia, dengan tenor antara 1 hingga 12 bulan dan suku bunga atau imbal hasil yang menyesuaikan kondisi pasar (*market rate*). SVBI dan SUVBI dapat diperjualbelikan di pasar sekunder oleh investor domestik maupun asing. Sampai dengan akhir triwulan I 2025, lelang SVBI telah dilakukan sebanyak 12 kali dengan total nominal penerbitan mencapai 4,57 miliar dolar AS dan posisi *outstanding* sebesar 2,19 miliar dolar AS. Di pasar sekunder, SVBI mencatatkan nilai perdagangan sebesar 12,98 juta dolar AS, termasuk transaksi dengan pelaku nonresiden. Sementara itu, SUVBI

telah dilelang sebanyak 35 kali sejak awal peluncuran, dengan total penerbitan sebesar 3,39 miliar dolar AS dan posisi *outstanding* sebesar 315 juta dolar AS.

Untuk mendukung kesinambungan pembangunan dan ketahanan ekonomi di Indonesia serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk melalui kecukupan dan pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 3 tahun 2025 tentang Perubahan atas PBI No. 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (DHE DPI) pada 1 Maret 2025. Penerbitan ketentuan ini bertujuan untuk mendukung implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA). Penerbitan peraturan tersebut dilakukan sebagai upaya penyelarasan dukungan Bank Indonesia terhadap penyesuaian kebijakan DHE SDA oleh Pemerintah, terutama pada aspek penambahan instrumen penempatan dan pemanfaatan DHE SDA, penyelarasan ketentuan mengenai instrumen sejalan dengan perubahan PP, dan pengaturan lebih lanjut ketentuan PP mengenai penukaran DHE SDA ke dalam Rupiah. PBI tersebut juga diterbitkan untuk menyelaraskan ketentuan mengenai dukungan Bank Indonesia dalam pengawasan implementasi PP DHE SDA.

Selanjutnya, Bank Indonesia terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka pengelolaan cadangan devisa dan koordinasi dengan bank sentral lain di kawasan melalui program Kerjasama Keuangan Internasional (KKI). Beberapa KKI yang dimiliki Bank Indonesia antara lain *Local Currency Bilateral Swap Agreement* (LCBSA) dengan Bank Negara Malaysia dan Monetary Authority of Singapore, serta *Bilateral Currency Swap Agreement* dengan People's Bank of China. Kerja sama dengan lembaga keuangan internasional juga dilakukan melalui pelaksanaan Forum Investasi Tahunan yang bertujuan untuk melakukan asesmen dan menyusun proyeksi pasar keuangan global dan cadangan devisa, serta membangun *networking* untuk mendalami praktik terbaik dalam pengelolaan cadangan devisa.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia terpilih sebagai pemenang Reserve Manager of The Year 2025 oleh *Central Banking Award* yang merupakan *publisher* terkemuka di kalangan bank sentral. Kemenangan tersebut diperoleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian positif terhadap transformasi *framework* pengelolaan cadangan devisa 4.0 yang

memungkinkan Bank Indonesia lebih adaptif dalam menyesuaikan perubahan dinamika pasar keuangan sekaligus mendukung operasi moneter. Ke depan, Bank Indonesia memandang jumlah cadangan devisa akan tetap memadai untuk melaksanakan kebijakan moneter dan memenuhi kewajiban internasional di tengah tantangan ekonomi dan pasar keuangan global.

PS 02 Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan asesmen, rekomendasi, dan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah (Pusat dan Daerah), di tengah dinamika tingginya ketidakpastian global dan berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik pada level nasional maupun regional. Hasil dari sinergi tersebut berkontribusi pada inflasi yang terkendali di dalam rentang sasaran nasional serta transaksi berjalan yang sehat dan mendukung stabilitas eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sasaran pencapaian *high income country*.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

6) Terjalinnya koordinasi dengan Pemerintah untuk mendukung pengendalian inflasi

Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat, Daerah, dan mitra strategis lainnya terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi melalui TPIP dan TPID, termasuk melalui penguatan program GNPIP, untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasarannya. Respons kebijakan moneter Bank Indonesia yang konsisten dengan mandat, dan sinergi antarpihak melalui TPIP dan TPID, serta pelaksanaan GNPIP yang terus diperkuat telah mendukung inflasi IHK pada triwulan I 2025 tetap terjaga dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$.

Sepanjang triwulan I 2025, berbagai upaya sinergi terus dilakukan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam pengendalian inflasi, terutama inflasi pangan, sehingga mendukung inflasi *volatile food* terjaga pada level rendah. Koordinasi pengendalian inflasi pangan

diterapkan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia bersama K/L anggota TPIP, serta berbagai mitra strategis telah melaksanakan *High Level Meeting* (HLM) TPIP pada 31 Januari 2025, yang menyepakati 3 (tiga) langkah strategis untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$.² Sinergi kebijakan pengendalian inflasi melalui HLM TPIP dilaksanakan dalam rangka memperkuat komitmen dan mengakselerasi implementasi program pengendalian inflasi secara *targeted*, masif, dan terintegrasi. HLM TPIP menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk mengatasi tantangan pengendalian inflasi sepanjang 2025.

Menindaklanjuti kesepakatan dalam HLM TPIP, Bank Indonesia bersama TPIP dan TPID wilayah Jawa berkolaborasi lebih lanjut untuk memperkuat ekosistem pengendalian inflasi pangan di daerah melalui penyelenggaraan GNPIP Wilayah Jawa 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 21 Februari 2025 di Yogyakarta yang mengusung tema Sinergi Menjaga Ketersediaan Pasokan untuk

Mendukung Pengendalian Inflasi Pangan dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan. GNPIP wilayah Jawa mengusung beberapa program strategis yang akan mengakselerasi hilirisasi dan ketahanan pangan dalam mendukung Asta Cita Pemerintah. Pertama, peningkatan produksi komoditas pangan strategis dengan intensifikasi pertanian melalui penggunaan bibit unggul, penyediaan sarana prasarana, dan pemanfaatan *digital farming*. Kedua, mendukung penyediaan pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Kerja sama Antar Daerah (KAD) dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) terkait. Ketiga, penguatan peran *off taker* (BUMD/BUMDes Pangan) untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan antarwaktu dan antarwilayah melalui penguatan kelembagaan dan aspek permodalan.

Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen untuk tetap memperkuat sinergi bersama TPIP, TPID, dan mitra strategis lainnya dalam mendukung upaya pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan melalui penguatan implementasi GNPIP, khususnya dalam upaya mendorong peningkatan pasokan pangan dan penguatan komunikasi kebijakan untuk menjaga ekspektasi inflasi.

2 Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Boks 2 *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Tahun 2025.

Boks.2: High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Tahun 2025



High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) di Jakarta

Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk memperkuat sinergi dan koordinasi guna mengendalikan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) agar tetap dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2025. Komitmen bersama tersebut disepakati dalam *High*

Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada 31 Januari 2025, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan diikuti oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Perdagangan, Wakil

Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, dan pejabat eselon I dan/atau setingkat perwakilan dari Kementerian/Lembaga anggota TPIP.

Penguatan sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia merupakan lanjutan keberhasilan pencapaian pada 2024 sehingga inflasi IHK 2024 terjaga dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. HLM TPIP tahun 2025 menghasilkan 3 (tiga) langkah strategis untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$. Ketiga langkah tersebut terdiri dari: (i) menjaga inflasi 2025 pada kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) menjaga inflasi harga bergejolak (*volatile food*) dalam kisaran 3,0-5,0%; serta (iii) memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 melalui upaya: (a) memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); (b) meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah; (c) menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah, terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit; (d) memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan; serta (e) memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.

Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 ditetapkan sebagai upaya untuk memastikan capaian inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran sebesar $2,5 \pm 1\%$ pada

tahun 2025-2027 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Peta Jalan ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi panduan pelaksanaan strategi pengendalian inflasi di seluruh TPID dalam menyusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2025-2027, yang sesuai dengan karakteristik dan tantangan pengendalian inflasi di masing-masing daerah, sehingga semakin mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ke depan, TPIP akan terus memperkuat sinergi kebijakan melalui implementasi berbagai inovasi program yang telah dirumuskan dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027, termasuk kebijakan Paket Stimulus Ekonomi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Fokus sinergi terutama pada strategi memastikan kesinambungan pasokan dan meningkatkan kelancaran distribusi. Dalam kaitan ini, sinergi erat Bank Indonesia bersama Pemerintah dalam TPIP-TPID terus diperkuat, termasuk dalam implementasi program GNPIP di berbagai daerah guna mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga. Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat efektivitas upaya pengendalian inflasi tersebut, TPIP selanjutnya akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 pada Agustus 2025 dengan tema "Produktivitas Untuk Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga".

7) Terjalinnya sinergi kebijakan moneter-fiskal untuk menjaga stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi

Bank Indonesia dan Pemerintah terus melanjutkan sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia bersinergi bersama Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, antara lain dalam pembahasan mengenai realisasi dan prospek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. Bank Indonesia menyampaikan beberapa pandangan mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar Rupiah, dan inflasi, serta respons BKBI tahun 2025, guna mendukung asesmen APBN TA 2025 Kementerian Keuangan serta menjaga kesinambungan bauran kebijakan moneter dan fiskal.

Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, Bank Indonesia secara intersif bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, antara lain melalui pelaksanaan pembelian Surat Utang Negara (SUN)

dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) secara bilateral (*bilateral buyback*). Langkah ini tidak hanya mendukung upaya Pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi Bank Indonesia dalam memperkuat sinergi kebijakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Di samping itu, kontribusi Bank Indonesia juga diberikan melalui penguatan aspek penatausahaan SUN. Hal tersebut diwujudkan, salah satunya melalui penunjukan agen penatausaha SUN JPY secara *Multi Issuance* untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses penerbitan SBN valuta asing, koordinasi terkait penguatan aspek pencatatan kepemilikan SUN USD dan SUN EUR, serta penguatan asesmen dan analisa pengelolaan SBN valuta asing melalui penyampaian laporan penatausahaan SBN valuta asing secara berkala kepada Kemenkeu.

PS 03 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas yang mendukung penciptaan lapangan kerja sejalan dengan Asta Cita. Bank Indonesia juga mengimplementasikan kebijakan dan surveilans makroprudensial secara *forward looking* dan inovatif untuk mendukung kondisi stabilitas sistem keuangan (SSK) yang terjaga dengan intermediasi yang tumbuh tinggi dan inklusif. Implementasi kebijakan tersebut dimaksudkan untuk turut menjaga SSK melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan dengan tetap memitigasi dan mengelola risiko sistemik, serta mendorong inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

8) Tercapainya pertumbuhan kredit/pembiayaan yang optimal dalam kisaran target sesuai dengan prakiraan makroekonomi dan siklus keuangan

Pada triwulan I 2025, pertumbuhan kredit perbankan tercatat sebesar 9,16% (yoy). Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit (*lending standard*) dan kondisi likuiditas perbankan masih memadai, meskipun terdapat beberapa bank yang menghadapi kendala dalam meningkatkan pendanaan untuk penyaluran kredit. Dari sisi permintaan, kontribusi pertumbuhan kredit terutama didukung oleh sektor industri, pertambangan, dan jasa sosial. Sementara itu, kontribusi pertumbuhan kredit oleh sektor konstruksi dan perdagangan masih terbatas. Ke depan, berbagai risiko ketidakpastian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi prospek permintaan kredit dan preferensi penempatan aset likuid perbankan.

Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif, termasuk mengoptimalkan KLM dan memperkuat

implementasi ketentuan Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) untuk mendorong pendanaan perbankan bagi manajemen likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil. Bank Indonesia juga akan terus mempererat koordinasi dengan KSSK untuk mendorong pertumbuhan kredit dalam mendukung pembiayaan ekonomi. Hingga minggu kedua Maret 2025, Bank Indonesia telah memberikan insentif KLM sebesar Rp291,8 triliun, masing-masing kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp125,7 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp132,8 triliun, Bank Pemerintah Daerah (BPD) sebesar Rp27,9 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp5,4 triliun. Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan kepada sektor-sektor jadi prioritas yakni pertanian, *real estate*, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan, manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau. Selain itu, Bank Indonesia juga mempertahankan rasio CCyB sebesar 0%, RIM pada kisaran 84-94%, rasio *Loan to Value* (LTV)/*Financing to Value* (FTV) paling tinggi sebesar 100% dan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor paling rendah 0%, Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5% dan rasio PLM syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%, serta melanjutkan Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) untuk memperkuat pengelolaan pendanaan perekonomian. Bank Indonesia juga senantiasa mengevaluasi pencapaian Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dalam rangka mendukung pembiayaan inklusif. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif dan mempererat sinergi dengan Pemerintah, KSSK, perbankan, serta dunia usaha agar dapat mendukung peningkatan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dukungan kebijakan makroprudensial yang longgar dan *pro-growth* merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan termasuk mendorong intermediasi sesuai dengan siklus keuangan. Hal ini diulas secara mendalam pada buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No. 44 edisi Februari 2025 yang diluncurkan pada 5 Maret 2025 di Jakarta.

BOKS.3: Peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 44

Peluncuran Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No. 44 di Jakarta

Pada 5 Maret 2025, Bank Indonesia meluncurkan buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 44 (KSK 44), Februari 2025, dengan tema "Memperkuat Stabilitas dan Menjaga Pertumbuhan dari Dampak Rambat Global". Peluncuran buku KSK tersebut dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Judo Agung, dan turut dihadiri oleh mitra strategis utama Bank Indonesia, termasuk ADG Bank Indonesia terdahulu, Ketua Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, serta perwakilan Pimpinan dan Pejabat dari otoritas terkait, lembaga keuangan, akademisi, ekonom, dan lembaga internasional.

Buku KSK 44 menggambarkan kondisi stabilitas sistem keuangan pada 2024 yang tetap terjaga dan mendukung kinerja ekonomi Indonesia agar tetap bertumbuh. Kondisi tersebut turut ditopang dengan tingkat inflasi yang berada di dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga baik, di tengah berbagai ketidakpastian ekonomi global yang meningkat. Sejalan dengan itu, intermediasi perbankan juga tumbuh didukung faktor penawaran yang tecermin pada minat penyaluran kredit dan kecukupan kapasitas pembiayaan oleh perbankan dan Industri Keuangan NonBank.

Bank Indonesia fokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial tetap diarahkan *pro-growth*

dan longgar untuk mendorong intermediasi sesuai dengan siklus keuangan melalui penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial atau dikenal KLM. Mulai 1 April 2025, penguatan KLM yang sebelumnya ditetapkan 4% dari DPK, ditingkatkan menjadi 5% per 1 April 2025 dengan potensi tambahan likuiditas lebih dari Rp80 Triliun Rupiah, sehingga secara total tambahan likuiditas yang berasal dari insentif KLM menjadi Rp375 Triliun. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong kredit perbankan ke sektor riil, terutama ke sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi dalam penciptaan lapangan kerja, yang sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Dukungan kebijakan makroprudensial juga dilakukan melalui sinergi Bank Indonesia dengan kebijakan Kementerian/Lembaga yang saat ini difokuskan pada dua sektor utama, yaitu perumahan dan pertanian, termasuk hilirisasi dan ketahanan pangan.

Peluncuran buku KSK 44 diharapkan dapat menjadi referensi bagi mitra strategis untuk memahami kondisi terkini stabilitas sistem keuangan Indonesia sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dirumuskan, membangun kepercayaan pelaku sektor keuangan terhadap sistem keuangan, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia sebagai otoritas Makroprudensial.

9) Terjaganya risiko likuiditas perbankan

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia turut mendukung terjaganya ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Perbankan terpantau mampu melanjutkan intermediasi dengan tetap menjaga likuiditas. Hal ini tecermin pada indikator rasio Alat Likuid per Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang mencapai 26,22%. Perkembangan tersebut sejalan dengan berlanjutnya akselerasi penyaluran kredit dan aktivitas pasar uang yang diperkuat oleh *stance* kebijakan OM *pro-market*. Ke depan, Bank Indonesia akan terus menjaga kecukupan likuiditas sehingga dapat menopang penyaluran kredit/pembiayaan perbankan secara optimal serta memperkuat sinergi dengan KSSK untuk memitigasi berbagai risiko ekonomi akibat dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global yang berpotensi mengganggu ketahanan sistem keuangan domestik.

Bank Indonesia senantiasa mendorong intermediasi yang optimal melalui pelaksanaan *surveilans* dan pengawasan yang mendukung pencapaian sasaran kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia melakukan penguatan pengawasan terhadap sistem keuangan secara terintegrasi dengan menggunakan pendekatan *Dynamic Systemic Risk Surveillance* (DSRS) yang mengintegrasikan hasil pengawasan pada pilar makroprudensial, moneter-market, dan sistem pembayaran yang diperoleh dari *offsite supervision*. Pengawasan DSRS dilakukan terhadap seluruh elemen sistem keuangan, baik individual maupun industri, termasuk infrastruktur yang mendukung kelancaran sistem keuangan yang dapat berpengaruh terhadap potensi terjadinya risiko sistemik. Pengawasan juga dilaksanakan melalui sinergi dengan otoritas terkait yang dilakukan baik melalui tukar menukar informasi maupun koordinasi kegiatan pemeriksaan. Selain itu, pengembangan *suptech* terus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka memperkuat pengawasan sistem keuangan dengan memperhatikan Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS).

Pada Triwulan I 2025, Bank Indonesia telah melakukan pengembangan lanjutan *suptech analytics* untuk mengidentifikasi risiko pada sistem keuangan. Pengembangan *suptech analytics* yang dilakukan antara lain mencakup alat proyeksi arus kas perbankan berdasarkan perilaku historis dengan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI), *network analysis* untuk mengidentifikasi dan memantau perkembangan struktur dan interkoneksi pelaku pasar keuangan dan penyedia jasa sistem pembayaran, serta pengembangan *suptech* lanjutan terhadap *early warning*

tools dalam mendeteksi potensi tekanan likuiditas melalui penyempurnaan model untuk meningkatkan akurasi interpretasi dalam pengawasan sistem keuangan. Pengembangan *suptech* juga dilakukan terhadap *behavior analysis* yang dapat mendukung asesmen terhadap proyeksi pertumbuhan kredit bank dalam kondisi *baseline* maupun berdasarkan hasil *stress testing* sebagai salah satu upaya pencapaian kredit yang optimal. Pengembangan *suptech analytics* dimaksud diharapkan dapat berkontribusi dalam proses identifikasi risiko sistemik dan pemantauan perilaku entitas dalam sistem keuangan serta asesmen terintegrasi. Selain itu, telah dilakukan pengembangan lanjutan *surveillance mobile application* yang terintegrasi dengan DWP sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efisien.

10) Pangsa kredit yang inklusif dan/atau hijau

Bank Indonesia terus mendorong pembiayaan kepada UMKM dalam rangka mendorong inklusi ekonomi dan keuangan. Mempertimbangkan pentingnya peran perbankan dalam pembiayaan UMKM, Bank Indonesia berupaya mendorong kontribusi bank secara optimal melalui kebijakan RPIM sebesar 33,57% dan pemberian insentif KLM kepada bank penyalur kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas, termasuk kepada Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan pencapaian RPIM bank serta pembiayaan ultramikro (UMi). Peran IKNB, terutama Perusahaan Pembiayaan dan Fintech, dalam mendorong inovasi pembiayaan kepada UMKM melalui kanal digital turut menjadi katalisator peningkatan RPIM. Di tengah berbagai upaya tersebut, pada triwulan I 2025, kredit UMKM tumbuh melambat, yaitu sebesar 2,51% (yoy). Dari sisi *supply*, perlambatan pada kredit UMKM dipengaruhi oleh upaya bank menjaga kualitas kredit di tengah risiko kredit UMKM yang masih tinggi, meski masih di bawah *threshold* 5%. Pembiayaan UMKM oleh Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB) juga tumbuh melambat, terutama dipengaruhi perlambatan pada pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan (PP). Dari sisi *demand*, perlambatan pembiayaan UMKM dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat khususnya kelas menengah-bawah.

PS 04 Memperkuat sinergi kebijakan serta pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk



Press Conference Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Triwulan I 2025 di Jakarta

menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan perekonomian di tengah peningkatan tekanan di pasar keuangan global seiring ketidakpastian ekonomi global dan risiko geopolitik dunia yang masih tinggi. Bank Indonesia juga melakukan penguatan sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas lain dalam rangka mendukung ketersediaan likuiditas bagi perbankan serta mendorong pertumbuhan kredit yang seimbang dan berkualitas. Selain itu, sinergi kebijakan dan pengawasan dilakukan untuk mendorong peningkatan pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan, termasuk pencegahan dan penanganan krisis.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan serta pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

11) Terjalannya sinergi kebijakan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan kredit/pembiayaan yang optimal dalam kisaran target

Bank Indonesia terus bersinergi dengan OJK untuk mendukung intermediasi yang seimbang dan berkualitas melalui harmonisasi kebijakan dan pengaturan. Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia bersama OJK melakukan harmonisasi untuk penyesuaian beberapa pengaturan, seperti KLM dan DHE SDA, serta bersama-sama mengevaluasi implementasi kebijakan RPIM.

Mulai 1 Januari 2025, cakupan sektor dan realokasi besaran insentif KLM diperkuat guna mempercepat intermediasi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya, pada Maret 2025 dilakukan penyempurnaan ketentuan KLM dengan menambahkan insentif khusus bagi pembiayaan perumahan berdaya ungkit tinggi serta merelokasi insentif antarsektor, sekaligus memastikan KLM diimplementasikan secara *targeted*, alokatif, distributif dengan tetap mendukung pembiayaan inklusif dan hijau, serta selaras dengan kebijakan Pemerintah untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ada pun penyempurnaan ketentuan dimaksud berlaku efektif pada 1 April 2025. Proses harmonisasi ketentuan KLM dilakukan baik melalui forum koordinasi maupun pemberian tanggapan tertulis terhadap rancangan ketentuan, sehingga dapat diperoleh pandangan yang lebih luas dari aspek mikroprudensial sehingga transmisi kebijakan dapat lebih efektif dalam mendorong intermediasi yang seimbang dan berkualitas.

Selain itu, Bank Indonesia juga menyesuaikan ketentuan DHE SDA sebagai respons atas implementasi PP DHE SDA. Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK terkait implementasi ketentuan PP DHE SDA dari aspek pengaturan dan pengawasan. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan OJK dan LPS mengenai rencana perluasan LBUT sebagai dampak dari penyesuaian ketentuan DHE SDA tersebut.

Selanjutnya, pada triwulan I 2025, Bank Indonesia melaksanakan evaluasi RPIM secara berkala untuk memantau pencapaian RPIM perbankan pada 2024 dan target RPIM perbankan di tahun 2025. Koordinasi Bank Indonesia selaku penerbit ketentuan RPIM dengan OJK selaku pengawas mikroprudensial penting untuk dilakukan guna memastikan efektifitas implementasi RPIM, realisasi RPIM tercapai secara nasional, dan kebijakan RPIM memberi dampak dalam mendorong pembiayaan inklusif.

12) Terjalannya sinergi Kebijakan untuk mendukung ketahanan sistem keuangan, termasuk pencegahan dan penanganan krisis

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi lintas otoritas sektor keuangan melalui KSSK. Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia bersama lembaga anggota KSSK menyelenggarakan Rapat Berkala KSSK I 2025 pada 17 April 2025. Rapat KSSK pertama di tahun 2025 tersebut diawali dengan rangkaian *focus group discussion* (FGD) bersama *chief economist* lembaga KSSK dan perbankan, *policy dialogue* lintas K/L, dan dilanjutkan dengan Pertemuan Tingkat Deputi pada 15 April 2025. Rangkaian pertemuan tersebut ditujukan untuk *sharing* pandangan mengenai *outlook* perekonomian, menyamakan persepsi mengenai kondisi perekonomian dan sektor keuangan terkini, serta harmonisasi kebijakan di masing-masing lembaga dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Rapat KSSK I 2025 menyepakati bahwa Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia dalam kondisi terjaga, didukung oleh kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang stabil. Selain itu, rapat KSSK juga menyepakati perkembangan tindak lanjut penyusunan ketentuan/peraturan pelaksana dari UU P2SK di sektor keuangan, program kerja rutin tahunan Sekretariat KSSK dalam rangka memperkuat Protokol Manajemen Krisis (PMK)/koordinasi KSSK dan peningkatan kapasitas masing-masing lembaga. Bank Indonesia bersama lembaga anggota KSSK juga bersinergi dalam menindaklanjuti hasil Simulasi Krisis Nasional (Simkrisnas) tahun 2024 untuk menyempurnakan kerangka PMK KSSK, terutama dalam konteks penilaian kondisi krisis sistem keuangan dan penyampaian rekomendasi kepada Presiden dalam hal ditengarai terjadi krisis sistem keuangan.

13) Terjalannya sinergi Kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya keuangan yang inklusif dan hijau

Bank Indonesia turut memperkuat koordinasi dengan mitra kerja dalam rangka mendukung pengembangan

ekonomi dan keuangan berkelanjutan. Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemkeno), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Dewan Ekonomi Nasional, serta pelaku industri (perbankan) dan lembaga riset independen, melakukan pembahasan awal mengenai inisiatif pengembangan Kalkulator Hijau v2.0 untuk penyempurnaan Kalkulator Hijau v1.0. Didasari oleh kebutuhan penyampaian laporan keberlanjutan oleh entitas ekonomi sesuai dengan *International Financial Reporting Standard* (IFRS) terkait *Sustainability Reporting Standard*, diperlukan kalkulator hijau yang dapat membantu entitas ekonomi menghitung emisi gas rumah kaca (GRK) *scope 3* (berdasarkan rantai ekonomi).² Penyempurnaan kalkulator hijau akan dilengkapi dengan penghitungan emisi GRK secara *indirect* agar sejalan dengan perkembangan global.

Bank Indonesia sebagai *ex-officio* di Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK-IAI) juga terlibat aktif dalam penyusunan standar pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan. Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia terlibat aktif dalam pembahasan dan penyusunan Draf Eksposur Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (DE PSPK) tentang Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan (PSPK 1) dan PSPK tentang Pengungkapan Terkait Iklim (PSPK 2) yang merupakan bagian dari Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) untuk pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan. Standar ini diharapkan dapat menjadi panduan awal bagi entitas pelapor dalam menyusun laporan keberlanjutan yang sejalan dengan praktik internasional, serta meningkatkan kualitas dan keterbandingan informasi iklim dan lingkungan di sektor keuangan nasional.

Dalam rangka penguatan sinergi kebijakan antar K/L, Bank Indonesia aktif dalam melakukan diskusi dengan K/L terkait, termasuk pelaku industri, akademisi, dan lembaga riset independen untuk mendorong penerapan keuangan berkelanjutan. Sinergi kebijakan dilakukan a.l. dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMN 2025-2029, kebijakan inovasi pembiayaan berkelanjutan UMKM dalam ekonomi biru, strategi pembiayaan

² Kalkulator v1.0 sudah dapat digunakan oleh entitas ekonomi namun dengan cakupan sektor yang masih berfokus pada *scope 1*, khususnya dari penggunaan beberapa bahan bakar utama dan *scope 2* atau pemakaian sumber energi langsung (pemakaian listrik PLN)



Peluncuran QRIS TAP di Pusat Perbelanjaan di Jakarta

berkelanjutan bagi UMKM dalam ekonomi biru, dan konsep *impact investment* dalam mendukung ekonomi hijau, serta dengan Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) di bawah kewenangan Bank Indonesia terkait pengaturan penerapan keuangan berkelanjutan.

PS 05 Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta perlindungan konsumen, untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Di tengah tingginya ketidakpastian global dan tantangan keamanan siber akibat akselerasi teknologi digital, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan sistem pembayaran untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sejalan dengan program Asta Cita. Bank Indonesia terus melakukan penguatan dan implementasi kebijakan sistem pembayaran dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran, termasuk dalam pengelolaan uang Rupiah. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai stabilitas Sistem Pembayaran melalui digitalisasi Sistem Pembayaran untuk efisiensi transaksi dan ekosistem EKD, terselenggaranya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan andal, serta tersedianya uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, pengelolaan uang Rupiah, dan percepatan ekonomi keuangan digital untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

14) Transaksi Sistem Pembayaran ritel yang cepat, mudah, murah, berkualitas, dan terpercaya

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia mendorong perkembangan transaksi, pengguna, dan *merchant* sistem pembayaran agar terus berakselerasi dan melampaui target. Total pengguna QRIS secara keseluruhan tercatat sebanyak 56,2 juta. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah *merchant* QRIS menjadi 38,1 juta. Akselerasi QRIS juga terus berlanjut dengan kenaikan volume transaksi mencapai 169,15% (yoy) dan nominal transaksi mencapai 148,22% (yoy), sehingga sampai dengan triwulan I 2025 volume transaksi QRIS mencapai 2,62 miliar transaksi.

Dalam mendukung perkembangan transaksi pembayaran digital tersebut, Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi instrumen dan kanal sistem pembayaran untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital serta penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Upaya ini dilakukan antara lain melalui (i) perluasan kerjasama QRIS antarnegara dengan India, Korea, Jepang, dan Tiongkok; (ii) pemanfaatan teknologi QRIS TAP; (iii) penyesuaian kebijakan tarif MDR QRIS dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui penyesuaian skema harga QRIS untuk kriteria *merchant* Badan Layanan Umum (BLU) dan *Public Service Obligation* (PSO) dari 0,4% menjadi 0%; serta (iv) perluasan akseptasi QRIS melalui sosialisasi secara *targeted* kepada komunitas prioritas dan bersinergi dengan inisiatif lainnya.

Pelaksanaan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia turut memberi dukungan terhadap keberhasilan program Asta Cita Pemerintah. Hal

ini ditempuh antara lain melalui program perluasan QRIS Antarnegara pada berbagai destinasi pariwisata dan wisatawan mancanegara, literasi keuangan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI), perluasan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah, serta peluncuran inovasi QRIS tanpa pindai (QRIS TAP). Inisiatif strategis QRIS TAP berbasis teknologi *Near Field Communication* (NFC)

ditujukan untuk meningkatkan adopsi pembayaran digital, khususnya dalam transaksi pada moda transportasi umum. Implementasi QRIS TAP diharapkan dapat menghadirkan layanan pembayaran yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi, sehingga turut mendukung efisiensi transaksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Boks.4: Peluncuran QRIS TAP



Peluncuran QRIS TAP di Stasiun MRT, Bundaran HI, Jakarta

Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan QRIS TAP pada 14 Maret 2025 sebagai terobosan baru dalam sistem pembayaran digital. Inovasi ini memungkinkan pembayaran digital nirsentuh dengan mendekatkan *smartphone* ke terminal pembayaran. Peluncuran QRIS TAP dilaksanakan di Stasiun MRT Bundaran HI oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta, Ketua ASPI, pimpinan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP), serta pimpinan operator transportasi yang mengimplementasikan QRIS TAP.

QRIS TAP hadir sebagai solusi pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal guna mendukung digitalisasi layanan publik dan transaksi ritel. QRIS TAP berbasis teknologi NFC akan meningkatkan kecepatan dan kenyamanan transaksi nirsentuh bagi masyarakat. Implementasi QRIS TAP akan memperluas ekosistem pembayaran digital yang inklusif serta mendukung program Asta Cita pemerintah.

Implementasi QRIS TAP akan dilakukan secara bertahap hingga akhirnya dapat digunakan secara luas di kanal-kanal moda transportasi, layanan publik, dan *merchant* lainnya. Pada tahap awal, QRIS TAP dapat digunakan di beberapa lokasi layanan transportasi, parkir, rumah sakit, serta ritel dan UMKM, antara lain Stasiun MRT Bundaran HI dan Stasiun MRT Lebak Bulus, Transjakarta (terbatas pada Royaltrans), DAMRI (terbatas pada JR Connexion Jabodetabek), *merchant* parkir, serta beberapa rumah sakit, yaitu RSUD Tarakan, RSCM Kencana, dan RSPAD Gatot Subroto Paviliun Kartika. Pada tahap selanjutnya, perluasan implementasi akan dilakukan ke seluruh stasiun MRT, Transjakarta, LRT Jakarta dan Jabodebek, *ticketing* DAMRI, KRL (rute Jabodetabek dan Jogja – Solo), Teman Bus, serta perluasan secara berkelanjutan pada *merchant* lainnya.

Sejalan dengan dukungan terhadap Asta Cita dalam penyediaan infrastruktur transportasi yang murah bagi masyarakat, pengguna QRIS TAP tidak



Peluncuran QRIS TAP di Stasiun MRT, Bundaran HI, Jakarta

dikenakan biaya transaksi. Biaya dikenakan kepada *merchant* berupa *Merchant Discount Rate* (MDR) yang ditetapkan untuk kategori Badan Layanan Umum (BLU) dan *Public Service Obligation* (PSO) sebesar 0%, sementara *merchant* kategori lain dikenakan MDR QRIS sesuai skema yang berlaku. Pemberlakuan skema tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan penggunaan QRIS TAP di sektor transportasi.

Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka memperluas akseptasi QRIS TAP serta pengembangan inovasi sistem pembayaran secara berkelanjutan, yang sejalan dengan arah navigasi BSPI 2030. QRIS TAP diharapkan dapat menjadi katalis percepatan digitalisasi ekonomi serta mendukung terwujudnya pembayaran digital yang inklusif, aman, dan murah bagi layanan publik.

15) Ketersediaan Rupiah untuk mendukung *sovereignty* Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menjamin ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, dan kualitas yang prima di seluruh wilayah NKRI. Sebagai manifestasi upaya tersebut, pada triwulan I 2025 Bank Indonesia memperkuat kegiatan layanan kas kepada perbankan dan masyarakat. Hal tersebut ditempuh dalam rangka menjaga ketersediaan uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk di wilayah 3T.

Sebagai wujud komitmen dalam menjaga ketersediaan uang yang layak edar, Bank Indonesia melakukan kegiatan pengolahan dan pemusnahan terhadap uang tidak layak edar, termasuk melalui kegiatan meracik. Terkait hal ini, Bank Indonesia menginisiasi pengolahan limbah racik uang kertas (LRUK) dengan metode *Waste to Energy* (WTE) atau disebut sebagai program Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) yang lebih ramah lingkungan. Pada Triwulan I 2025, kegiatan tersebut telah mencakup kerja sama pemanfaatan LRUK selain untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), antara lain antara Bank Indonesia dan PT PLN Nusantara Power untuk penggunaan

LRUK sebagai bahan bakar alternatif dalam proses untuk menghasilkan energi listrik.

Bank Indonesia juga terus berkomitmen untuk menyediakan ULE bagi masyarakat pada tingkat standar kelayakan uang Rupiah (*soil level*). Bank Indonesia meningkatkan kualitas pelaksanaan Survei Tingkat Kelayakan Uang (STKU) melalui penguatan metodologi survei terkait desain kuesioner dan sebaran *sampling* responden yang akan digunakan untuk mengukur *soil level* uang pecahan besar (UPB) dan uang pecahan kecil (UPK). STKU untuk periode Semester I tahun 2025 akan dilaksanakan pada tanggal 10-25 Mei 2025.

Khusus untuk wilayah 3T, Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas layak edar melalui kas keliling, distribusi ke kas titipan, dan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) yang dilaksanakan di 24 wilayah 3T. ERB merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam kegiatan layanan kas di wilayah 3T. Selain melakukan kegiatan layanan kas, ERB juga dirangkaikan dengan kegiatan kampanye "Cinta, Bangga, Paham Rupiah (CBP)" untuk memberikan edukasi kepada masyarakat

agar tidak merusak Rupiah dengan melipat, mencoret, menstapler, meremas, atau membasahi uang Rupiah. Kegiatan dimaksud diharapkan dapat ikut menjaga ketersediaan Uang Layak Edar (ULE) di seluruh wilayah NKRI. Di samping itu, sejalan dengan dilaksanakannya perayaan Idul Fitri, pada

triwulan I 2025 Bank Indonesia turut berupaya untuk memastikan ketersediaan uang tunai sebesar Rp180,9 triliun untuk diedarkan ke seluruh wilayah Indonesia melalui Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2025.

BOKS.5: Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2025



Kick Off Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2025 di Jakarta

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Bank Indonesia kembali menggelar program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2025. Dengan tema “Menjaga Rupiah di Bulan Penuh Berkah”, kegiatan ini berlangsung sejak 3 sampai dengan 27 Maret 2025 di seluruh Indonesia. Melalui sinergi bersama perbankan, pemerintah daerah, dan mitra strategis, SERAMBI menghadirkan layanan penukaran uang, edukasi cinta rupiah, dan kampanye pembayaran digital guna memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan aman dan nyaman. Tingginya kebutuhan uang tunai menjelang Idul Fitri menjadi latar belakang utama pelaksanaan SERAMBI 2025. Tahun ini, Bank Indonesia merealisasikan kebutuhan uang sebesar Rp161,3 triliun melalui pelaksanaan 6.897 titik layanan penukaran uang di seluruh Indonesia, mulai dari rumah ibadah hingga pasar tradisional.

Sebagai inovasi, Bank Indonesia mengoptimalkan penggunaan website PINTAR (Penukaran dan Tarik Uang Rupiah). Melalui PINTAR, masyarakat dapat melakukan pemesanan jadwal dan lokasi penukaran secara *online*, sehingga proses menjadi lebih tertib, nyaman, dan mengurangi antrean panjang.

Penggunaan PINTAR ini menjadi wujud komitmen Bank Indonesia dalam memberikan layanan berbasis digital yang lebih ramah dan efisien bagi masyarakat.

Selain layanan penukaran, SERAMBI juga menjadi momentum untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas uang rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, serta mendorong masyarakat untuk mulai memanfaatkan pembayaran digital sebagai alternatif transaksi. SERAMBI 2025 tidak hanya menjadi tradisi tahunan, tetapi juga merupakan langkah strategis Bank Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang rupiah dalam jumlah dan nominal yang sesuai bagi masyarakat. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan teknologi melalui website PINTAR, program ini memastikan distribusi uang berjalan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat pecahan, terutama menghadapi lonjakan kebutuhan di bulan Ramadan dan Idul Fitri.

Ketersediaan uang tunai yang cukup dan terdistribusi merata menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat. Lebih dari itu, SERAMBI juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

dalam menggunakan dan merawat uang rupiah dengan bijak, sekaligus mendorong adaptasi layanan keuangan digital di tengah perkembangan sistem pembayaran nasional. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Bank Indonesia optimis dapat memberikan dampak

nyata bagi masyarakat, memperkuat ekosistem pembayaran tunai dan non-tunai yang sehat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap uang rupiah sebagai alat transaksi yang sah.

16) Terwujudnya industri jasa Sistem Pembayaran yang memenuhi Standard Kompetensi, Manajemen Risiko dan Infrastruktur Teknologi (KMI)

Bank Indonesia terus berupaya mewujudkan industri sistem pembayaran agar senantiasa memenuhi standar kompetensi manajemen risiko dan infrastruktur teknologi (KMI) yang terjaga dengan baik. Pemenuhan standar-standar tersebut merupakan landasan utama dalam menjaga keamanan, keandalan, serta integritas operasional layanan sistem pembayaran, yang selanjutnya berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Stabilitas ini menjadi prasyarat penting dalam menjaga kepercayaan publik serta mendukung kelancaran aktivitas perekonomian secara umum. Dalam rangka memastikan terpenuhinya industri jasa SP yang sehat, pada triwulan I 2025 Bank Indonesia terus mendorong pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia PSP untuk memastikan bahwa seluruh personel yang terlibat memiliki kapabilitas dan kompetensi yang sesuai.

Hal ini dilakukan melalui serangkaian koordinasi antara Bank Indonesia dengan mitra kerja di area sistem pembayaran. Bank Indonesia melakukan koordinasi erat antara lain dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Forum Komunikasi Direksi Operasional Perbankan (FKDOP), Lembaga Sertifikasi Profesi Sistem Pembayaran Indonesia (LSP SPI), dan Ikatan Bankir Indonesia (IBI). Upaya ini ditujukan untuk memastikan standar kompetensi PSP selaras dengan perkembangan industri sistem pembayaran dan kebijakan Bank Indonesia. Selanjutnya, pada Februari 2025 Bank Indonesia juga melakukan koordinasi pembahasan pedoman Pelindungan Konsumen di bidang Sistem Pembayaran (PBK SP) melalui Forum Lembaga Pelindungan Konsumen (Forum LPK), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ASPI, IBI, Perbarindo, APJATIN, ASBANDA, APVA, ICC Indonesia, APPUI, dan AFTECH. Pembahasan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat pelindungan konsumen, memperjelas peran masing-masing pelaku, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem sistem pembayaran nasional.

17) Infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia yang aman dan andal

Tingkat kestabilan dan tingkat ketersediaan layanan infrastruktur sistem pembayaran, baik untuk transaksi nilai besar maupun ritel, tetap terjaga. Secara umum, tingkat kestabilan dan ketersediaan layanan seluruh sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, yaitu BI-RTGS, SKN Bank Indonesia dan BI-FAST, hingga saat ini berjalan dengan baik dalam melayani kebutuhan transaksi masyarakat. BI-FAST merupakan perwujudan komitmen Bank Indonesia dalam melakukan modernisasi infrastruktur ritel yang bersifat *national driven*, memiliki fitur *real-time*, dan beroperasi tanpa henti (24/7), serta memungkinkan transfer dana dengan biaya rendah. Pada Triwulan I 2025, Bank Indonesia mengadakan pelatihan kepada Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) untuk meningkatkan pemahaman peserta agar semakin dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa pembayaran yang lebih baik.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan surveilans pada area sistem pembayaran, Bank Indonesia juga melakukan *close monitoring* secara rutin terhadap PSP agar mereka tidak menggunakan layanan sistem pembayaran untuk memfasilitasi aktivitas ilegal, khususnya perjudian *online*, melalui pelaksanaan *cyber patrol*. *Cyber patrol* merupakan patroli yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka mempercepat identifikasi *website* dan/atau rekening yang terindikasi terlibat dalam perjudian online, untuk kemudian dikomunikasikan kepada PJP/PIP terkait secara rutin. Selanjutnya, PJP/PIP melakukan verifikasi terhadap *website* dan/atau rekening tersebut serta menindaklanjutinya melalui penutupan/pemblokiran rekening dan melaporkan *website* tersebut ke Kementerian terkait untuk dilakukan penutupan.

18) Terwujudnya kebijakan dan program pelindungan konsumen nasional

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen. Peningkatan literasi konsumen dilakukan

secara masif dan terkoordinasi antara lain melalui *Kick Off Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (GEBER PK)* Tematik Bulan Ramadan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2025 yang dihadiri oleh perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Asosiasi *Fintech* Indonesia, asosiasi perbankan (Himpunan Bank Milik Negara/HIMBARA, Perhimpunan Bank Nasional/PERBANAS, dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah/Asbanda), serta seluruh Penyedia Jasa Pembayaran. Pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan untuk: (i) meningkatkan tidak hanya *awareness* dan kewaspadaan masyarakat, namun juga perubahan sikap dan perilaku masyarakat menjadi konsumen yang *well-literate*; (ii) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapat pelindungan melalui penguatan mekanisme penanganan, melalui *soft launching* Web Portal Pengaduan Konsumen Bank Indonesia (Web PKBI); serta (iii) memfasilitasi *collaborative sharing* antara Otoritas dan Penyelenggara melalui Forum SIGUNA (Diskusi Regular Pelindungan Konsumen untuk Indonesia) yang menjadi wadah bagi Bank Indonesia dan penyelenggara untuk diskusi serta *sharing* materi dan isu pelindungan konsumen beserta mitigasi dan solusinya.

PS 06 Memperkuat sinergi kebijakan, pengawasan, dan pelindungan konsumen antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Sinergi dalam digitalisasi ekonomi keuangan nasional memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di tengah akselerasi teknologi digital dengan sejumlah manfaat dan risikonya. Bank Indonesia terus melakukan penguatan sinergi kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas lain untuk mendorong akselerasi inovasi sistem pembayaran sehingga berjalan seimbang dengan kemampuan ekosistem dalam mengelola risiko dan melindungi konsumen. Perkembangan *fintech* dan *e-commerce* membuka peluang bagi banyak *start-up* dan pelaku non-bank untuk menghadirkan solusi pembayaran yang lebih cepat, aman, dan efisien. Oleh karena itu, kolaborasi antara Bank Indonesia, asosiasi, dan industri menjadi kunci untuk mendorong percepatan ekonomi dan keuangan digital (EKD), termasuk dalam rangka pengelolaan uang Rupiah. Selain itu, sinergi juga dilakukan dalam rangka pengawasan ekonomi dan keuangan digital serta penerapan prinsip Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT). Hal ini dilakukan guna mewujudkan: (i) efisiensi transaksi dan ekosistem EKD; (ii) terselenggaranya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan andal; serta (iii) tersedianya uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

19) Terjalinnnya sinergi dalam rangka mendukung percepatan ekonomi dan keuangan digital

Pada Triwulan I 2025, Bank Indonesia terus mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD). Upaya ini dilaksanakan melalui sinergi yang erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam berbagai program elektronifikasi yang mencakup elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), sektor transportasi, serta penyaluran bantuan sosial, dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik serta ekosistem EKD yang inklusif.

Bank Indonesia berkoordinasi erat dengan kementerian/lembaga terkait dalam wadah Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Koordinasi antar lembaga pada triwulan I 2025 difokuskan untuk mengakselerasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah (pemda), penyaluran bantuan sosial, serta pengembangan dan implementasi QRIS TAP pada moda transportasi. Dari sisi digitalisasi transaksi pemda, capaian elektronifikasi pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan positif, dimana sebanyak 495 pemda (90,7% dari total 546 pemda) telah berada pada tahap digital. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan sinergi antara Bank Indonesia, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah dalam mendorong adopsi transaksi non-tunai dan integrasi sistem keuangan daerah. Sementara itu, pada elektronifikasi moda transportasi, inisiatif QRIS TAP telah dapat digunakan pada transportasi umum, seperti MRT Jakarta, Transjakarta, dan Damri. Implementasi QRIS TAP di sektor transportasi umum diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi

penggunaan uang tunai, serta mendukung integrasi sistem pembayaran yang lebih luas.

20) Terjalinnya sinergi dalam rangka mendukung Pengelolaan Uang Rupiah (PUR)

Bank Indonesia memperkuat sinergi dengan Pemerintah di bidang PUR sebagaimana amanat UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sinergi dilakukan antara lain melalui FGD Forum Mata Uang Rupiah (FOMARU) pada tanggal 17 Januari 2025. Kegiatan FOMARU tersebut melibatkan Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan/DJPb-PKN, Biro Hukum-Sekretariat Jenderal Kemenkeu, dan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro-Badan Kebijakan Fiskal/BKF-PKEM. Ada pun yang menjadi topik pembahasan di dalam FOMARU antara lain tentang perekonomian terkini dan perkembangan uang kartal, arsitektur APBN 2025, arah kebijakan sistem pembayaran, dan perkembangan digitalisasi sistem pembayaran regional berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan FOMARU, Bank Indonesia akan menyusun evaluasi Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) 2025 s.d. 2028 dengan memperhatikan beberapa aspek seperti kebijakan fiskal, moneter, dan perkembangan digitalisasi. Evaluasi ECU dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun berjalan. Melalui evaluasi ECU tersebut Bank Indonesia diharapkan memiliki angka estimasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

21) Terjalinnya sinergi terkait penerapan prinsip Anti Pencurian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dan pengawasan Sistem Pembayaran (SP)

Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Komitmen ini selaras dengan visi BSPI 2025, yang telah dilanjutkan dengan BSPI 2030, yaitu menjamin keseimbangan antara inovasi sistem pembayaran dengan integritas sistem keuangan melalui penerapan Prinsip APU/PPT/PPSPM. Sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia turut berperan aktif dalam pelaksanaan berbagai rencana aksi *Mutual Evaluation by the Financial Action Task Force* (ME FATF). Salah satu langkah utama adalah penguatan kerja sama internasional dengan otoritas mitra mengenai penerapan Prinsip APU/PPT, yang juga sejalan dengan upaya pengelolaan risiko yang berpotensi merusak integritas sistem keuangan. Bank

Indonesia terus berkolaborasi dengan kementerian terkait dalam penerapan prinsip APU/PPT, khususnya dalam pemenuhan Strategi Nasional (Stranas) TPPU dan TPPT.

Bank Indonesia terus bersinergi dengan K/L dalam rangka penerapan prinsip APU-PPT serta pengawasan Sistem Pembayaran. Pelaksanaan sinergi tersebut dilakukan melalui 2 (dua) kali koordinasi dan menghasilkan 2 (dua) kesepakatan yang telah ditindaklanjuti, yaitu: (i) kesepakatan dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) berupa Bank, serta (ii) kesepakatan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait *joint audit* terhadap PSP berupa Lembaga Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dalam rangka melengkapi hasil pengawasan tidak langsung terkait APU PPT, serta pengawasan dan surveilans terhadap PSP berupa LSB dan KUPVA BB yang diindikasikan memiliki layanan SP yang digunakan untuk transaksi ilegal, termasuk *judi online*.

22) Terjalinnya sinergi terkait Pelindungan Konsumen

Bank Indonesia senantiasa memperkuat sinergi dengan K/L terkait antara lain Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Digital dalam rangka memperkuat implementasi pelindungan konsumen. Berdasarkan hasil koordinasi dengan K/L pada triwulan I tahun 2025, telah dilaksanakan edukasi Pelindungan Konsumen, yaitu: (i) edukasi di Polda Bali sebagai hasil koordinasi dengan Kementerian Perdagangan pada tanggal 6 Februari 2025, dengan tingkat pemahaman peserta 4,65; (ii) edukasi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Hong Kong secara daring pada 16 Maret 2025 dengan tingkat pemahaman peserta 4,65; serta (iii) edukasi kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara luring di 3 kota, yakni Malang, Tulungagung, dan Ponorogo pada 17-19 Maret 2025 dengan tingkat pemahaman peserta 4,82. Pelaksanaan kegiatan edukasi kepada penegak hukum di Polda Bali, sebagai tindak lanjut koordinasi dengan Kemendag diharapkan dapat mendorong peningkatan pemahaman penegak hukum mengenai pelindungan konsumen di bidang perdagangan dan sistem pembayaran. Selain itu, pelaksanaan edukasi kepada PMI merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bank Indonesia dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dalam rangka meningkatkan pemahaman PMI terkait pelindungan konsumen di bidang sistem pembayaran.

PS 07 Mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valuta asing untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi

Bank Indonesia terus memperkuat strategi OM *pro-market* guna menarik aliran masuk portofolio asing sekaligus mendorong pendalaman PUVA di tengah ketidakpastian ekonomi global, penguatan USD, dan peningkatan *yield* UST yang memicu pembalikan aliran portofolio asing. Bank Indonesia melakukan pengembangan dan pendalaman PUVA yang modern, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas sebagai dasar untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi nasional.

Pada triwulan I 2025 Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valuta asing untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

23) Terlaksananya pengembangan produk dan harga untuk mendukung likuiditas di pasar sekunder

Bank Indonesia melanjutkan upaya pengembangan produk dan harga melalui reformasi pengaturan, penguatan sinergi dan koordinasi, serta sosialisasi. Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan terkait produk, *pricing*, dan pelaku PUVA sebagai bagian dari reformasi pengaturan. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang telah diterbitkan, yaitu: (i) PADG No. 2 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab Menggunakan Rupiah dan Dirham melalui Bank pada 31 Januari 2025; (ii) PADG No. 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PADG No. 23/12/PADG/2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Malaysia Menggunakan Rupiah dan Ringgit melalui Bank pada 27 Maret 2025; (iii) PADG No. 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PADG No. 22/34/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Thailand Menggunakan Rupiah dan Baht melalui Bank pada 27 Maret 2025; dan (iv) PADG No. 9 Tahun 2025 tentang Lembaga pendukung PUVA pada 27 Maret 2025. Selain itu, telah diterbitkan pula ketentuan internal mengenai *dealer* utama untuk mengatur tata cara persetujuan, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi *dealer* utama PUVA.

Reformasi pengaturan PUVA diiringi dengan upaya Bank Indonesia untuk terus mengoptimalkan pengembangan berbagai instrumen moneter *pro-market*. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing serta mendukung aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing terus dilanjutkan dengan fokus pada aspek *product*, *pricing*, pelaku, dan infrastruktur (3P+1I) dalam rangka mewujudkan pasar uang Rupiah dan valuta asing yang modern, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas melalui pengembangan instrumen-instrumen sebagai berikut:

a) Pengembangan Instrumen Repo

Pada triwulan I 2025, Rata-Rata Harian (RRH) *outstanding* repo sebesar Rp86,6 triliun, atau mengalami peningkatan dibandingkan posisi pada triwulan sebelumnya yang mencapai Rp70,6 triliun. Hal ini sejalan dengan perkembangan RRH transaksi repo yang pada triwulan I 2025 meningkat menjadi sebesar Rp16,9 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp14,9 triliun. Lebih lanjut, pangsa jumlah pelaku repo terhadap total perbankan tercatat turut mengalami peningkatan menjadi sebesar 75% pada triwulan I 2025 dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 71%. RRH transaksi repo dengan *underlying* SRBI masih relatif terbatas, tercatat sebesar Rp3,6 triliun atau 21,7% dari total transaksi repo pada triwulan I 2025. Sementara itu, *spread* kuotasi *bid-ask* transaksi repo semakin menyempit pasca implementasi *dealer* utama PUVA yang menunjukkan pembentukan harga di pasar repo semakin efisien dan tersedia dalam berbagai tenor. Kebijakan Bank Indonesia untuk mengimplementasikan *dealer* utama PUVA telah berhasil mendorong peningkatan transaksi repo menjadi pada tenor 2 minggu s.d. 1 bulan dan memperkuat likuiditas transaksi SRBI dengan sisa jangka waktu 3 bulan. Hal ini mendorong peningkatan efisiensi pembentukan harga dan kurva imbal hasil repo dan SRBI yang dapat digunakan sebagai referensi bagi pelaku pasar.

b) Pengembangan Instrumen DNDF

Bank Indonesia terus mengembangkan DNDF sebagai salah satu instrumen lindung nilai (*hedging*) di pasar valuta asing dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar sejalan dengan arah strategi pengembangan PUVA pada BPPU 2030. Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia

melakukan sosialisasi *targeted* kepada korporasi potensial yang memiliki eksposur valuta asing besar untuk mendorong pemanfaatan lindung nilai termasuk DNDF. Rangkaian sosialisasi dan koordinasi juga dilakukan dengan APUVINDO untuk meningkatkan pemahaman terkait *regulatory reform* transaksi di pasar valuta asing, termasuk penguatan pengaturan DNDF. Selanjutnya, Bank Indonesia akan kembali melakukan sosialisasi *targeted* kepada pelaku potensial dan lembaga pendukung transaksi DNDF pada semester II 2025.

Sejalan dengan inisiatif dalam BPPU 2030, upaya pengembangan DNDF juga akan diintegrasikan dengan strategi pengelolaan moneter dan pengembangan PUVA melalui implementasi *dealer* utama. DNDF merupakan instrumen valuta asing potensial yang akan dikembangkan untuk implementasi *dealer* utama di pasar valuta asing. Melalui berbagai upaya pengembangan DNDF oleh Bank Indonesia, transaksi DNDF menunjukkan perkembangan yang positif pada triwulan I 2025. Rata-rata harian (RRH) transaksi DNDF di *market* tercatat sebesar USD 232 juta pada triwulan I 2025 atau meningkat dibandingkan RRH pada tahun 2024 sebesar USD 165 juta. Peningkatan pemanfaatan DNDF tersebut didorong oleh peningkatan kebutuhan lindung nilai valuta asing oleh para pelaku pasar khususnya pelaku asing sejalan dengan peningkatan *capital inflow* serta sebagai dampak dari implementasi inisiatif pengembangan DNDF yang dilakukan Bank Indonesia.

c) Reformasi Suku Bunga Rupiah

Bank Indonesia berupaya memastikan kelancaran proses transisi reformasi suku bunga rupiah di pasar domestik. Bank Indonesia selaku *administrator* dari *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) telah mengumumkan penghentian secara permanen publikasi JIBOR yang akan efektif pada tanggal 1 Januari 2026. Penetapan tanggal penghentian publikasi JIBOR tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku pasar untuk menggunakan acuan suku bunga rupiah yang berbasis transaksi, yaitu IndONIA.

Selanjutnya di tahun 2025, inisiatif terkait transisi JIBOR akan diarahkan untuk memperkuat kesiapan pelaku pasar untuk menghadapi penghentian permanen JIBOR. Bank Indonesia, *National Working Group on Benchmark Reform* (NWGBR), dan APUVINDO secara intensif akan melaksanakan komunikasi

dan sosialisasi guna membantu pelaku usaha dan seluruh mitra kerja memahami proses reformasi referensi suku bunga rupiah dari JIBOR menuju IndONIA, termasuk penyiapan *fallback language* pada kontrak keuangan *existing* yang masih menggunakan JIBOR. Pada Triwulan I 2025, upaya diarahkan untuk mempersiapkan pelaku pasar agar dapat melakukan transisi kontrak keuangan eksisting melalui *re-papering* kontrak dan *fallback language* yang masih menggunakan JIBOR dengan suku bunga pasar alternatif, antara lain *Compounded IndONIA*, IndONIA Index, dan/atau suku bunga lain yang disepakati oleh pelaku pasar. Persiapan transisi JIBOR dilakukan oleh Bank Indonesia kepada pelaku pasar secara bilateral (*coaching clinic*) melalui sosialisasi kepada publik, dan FGD bersama Bank Kontributor JIBOR mengenai Pembentukan Suku Bunga JIBOR pada 24 Januari 2025. Di samping itu, Bank Indonesia bekerjasama dengan otoritas terkait dan pelaku pasar juga menginisiasi upaya pengembangan pasar OIS dalam rangka pembentukan *forward looking term rate*.

d) Pengembangan Produk PUVA berdasarkan prinsip syariah

Bank Indonesia terus berupaya mengembangkan produk PUVA berdasarkan prinsip syariah yang *pro market* untuk mendukung manajemen likuiditas dan mendorong peningkatan pembiayaan syariah serta pendalaman pasar keuangan syariah. Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia menyusun berbagai asesmen dan/atau kajian antara lain terkait: (i) perluasan investor Sukuk BI, (ii) Term Deposit Valuta asing syariah, (iii) pengembangan transaksi lindung nilai syariah, (iv) pengembangan transaksi repo syariah, (v) *Policy Note* mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Ahli Syariah Pasar Uang, dan (vi) *Issue Note* mengenai *Alternate Reference Rate* (ARR) Syariah.

Dalam rangka akselerasi pengembangan PUVA syariah, Bank Indonesia membentuk Kelompok Kerja (KK) PUVA Syariah yang beranggotakan otoritas dan pelaku industri. *Output* dan *deliverables* KK PUVA Syariah terdiri dari penyusunan kajian, pedoman, dan rekomendasi dalam rangka akselerasi pengembangan product dan pricing PUVA syariah. KK PUVA Syariah berfokus pada: (i) Repo Syariah; (ii) Inovasi Produk PUVA Syariah; (iii) Evaluasi Lindung Nilai Syariah, dan (iv) pengembangan *alternate reference rate* (ARR) syariah. Penyusunan kajian dan

rekomendasi turut melibatkan otoritas lain dan industri sehingga pengembangan produk dapat selaras dengan kebutuhan industri (*pro-market*).

24) Sinergi Bank Indonesia dengan otoritas terkait dalam pelaksanaan kewenangan pengaturan, pengawasan, serta pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Bank Indonesia melanjutkan upaya pengembangan infrastruktur pasar keuangan berkoordinasi dengan otoritas terkait dan industri dalam rangka mendukung pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko pasar keuangan. Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia bersinergi dengan K/L dalam memonitor dan mengevaluasi pengembangan infrastruktur pasar keuangan. Bank Indonesia juga senantiasa memperkuat koordinasi dengan otoritas, K/L, industri, dan asosiasi untuk mengakselerasi pengembangan PUVA, termasuk PUAS.

Selanjutnya, Bank Indonesia telah melaksanakan pemeriksaan PUVA berkoordinasi dengan OJK dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Pemeriksaan PUVA didahului dengan penyusunan mekanisme tukar menukar informasi antara Bank Indonesia dan OJK dalam rangka memastikan kedua pihak memiliki informasi yang sama terhadap lembaga keuangan atau bank yang akan diperiksa. Koordinasi dengan OJK kembali dilaksanakan setelah pemeriksaan dilakukan melalui penyampaian informasi terkait hasil pemeriksaan oleh Bank Indonesia. Ke depan, tantangan pengawasan PUVA semakin meningkat seiring dengan bertambahnya objek dan cakupan pemeriksaan terkait infrastruktur pasar keuangan (CCP) dan pasar FX Futures seiring berpindahnya pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Bank Indonesia.

Boks.6: Penandatanganan BAST dan NK Bappebti, Bank Indonesia, dan OJK



Penandatanganan BAST dan NK antara Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia di Jakarta

Bank Indonesia, OJK, dan Bappebti telah melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (NK) perihal peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan dari Bappebti kepada OJK dan Bank Indonesia pada 10 Januari 2025.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2024, UU PPSK mengamanatkan pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, serta derivatif keuangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK meliputi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto, dan

derivatif keuangan di pasar modal. Sementara itu, pengalihan ke Bank Indonesia meliputi derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

Penandatanganan BAST BI-Bappebti dilakukan oleh Kepala DPPK Bank Indonesia, Donny Hutabarat dan Plt. Kepala Bappebti, Kemendag, Tommy Andana. Penandatanganan NK BI-Bappebti dilakukan oleh Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti dan Plt. Kepala Bappebti Kemendag, Tommy Andana. Kegiatan penandatanganan turut disaksikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar.



Penandatanganan BAST dan NK antara Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia di Jakarta

Sebagai implementasi konkret, akan dibentuk *Working Group* BI-Bappebti untuk menyusun koordinasi teknis dan strategis, dengan fokus pada aspek perizinan, pelaporan data dan informasi, serta pengawasan dan perlindungan konsumen. Upaya ini akan dilengkapi dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama, penyusunan pokok pengaturan derivatif PUVA serta aspek strategis lainnya yang mencakup penguatan SDM dan Organisasi, penguatan kompetensi pelaku dan kerjasama dengan pihak lain.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola sektor keuangan. Penandatanganan BAST dan Nota Kesepahaman antarlembaga terkait tidak hanya menandai dimulainya masa transisi kelembagaan, tetapi juga menegaskan komitmen Bank Indonesia, OJK, dan Bappebti dalam menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan dan tantangan global.

Bank Indonesia juga melanjutkan sinergi dengan Kemenkeu, OJK, dan LPS dalam koridor Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) guna mendorong pembiayaan perekonomian serta koordinasi pengawasan pasar keuangan dalam rangka pengelolaan risiko pasar keuangan. Koordinasi antara Bank Indonesia dan anggota FK-PPPK terus dilakukan terkait kebijakan dan tindak lanjut pengawasan PUVA, termasuk sinergi pelaksanaan pemeriksaan terhadap perbankan dalam rangka penguatan implementasi kebijakan pendalaman pasar keuangan. Sinergi lainnya yang dilakukan yakni berupa: (i) *Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA)* Bappenas terkait pengembangan pembiayaan *blue economy*, (ii) *Workshop Nasional Strategi Pendanaan Berkelanjutan untuk UMKM dalam Kawasan Konservasi* yang diselenggarakan Bappenas; (iii) *Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI)* dalam rangka kerjasama *capacity building long term hedging*.

Bank Indonesia melanjutkan upaya pengembangan pelaku Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA) bekerja sama dengan APUVINDO dalam rangka mewujudkan pelaku PUVA yang kompeten, berintegritas, aktif, dan kolaboratif. APUVINDO, selaku *Self-Regulatory Organization (SRO)* PUVA. APUVINDO

merepresentasikan seluruh pelaku PUVA dan menjadi mitra strategis Bank Indonesia dalam mendukung implementasi kebijakan pengembangan PUVA dan operasi moneter. APUVINDO juga aktif mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui koordinasi penyelenggaraan sertifikasi profesi tresuri, penerbitan ketentuan teknis termasuk kode etik pasar, serta pelaksanaan program penguatan kompetensi pelaku PUVA. Selain itu, APUVINDO terus mendorong pemenuhan kewajiban sertifikasi tresuri sesuai jenjang jabatan dan pendaftaran tresuri dealer ke Bank Indonesia sesuai mandat UU PPSK dan PBI PUVA. Dalam mendukung upaya tersebut, Association Cambiste International Financial Market Association (ACI FMA) Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi profesi tresuri secara berkelanjutan melaksanakan ujian dan program *refreshment* guna memastikan kompetensi pelaku PUVA tetap terjaga.

Di tingkat global, Bank Indonesia aktif berperan dalam Global Foreign Exchange Committee (GFXC) sebagai *associate member* guna mendorong pengembangan PUVA yang kredibel dan berintegritas. Pada Desember 2024, Bank Indonesia berpartisipasi dalam pertemuan dua tahunan GFXC yang membahas

pengkinian FX Global Code ('The Code') dan isu terkini di pasar keuangan global. Pembaruan kode etik tersebut mencakup penguatan transparansi data transaksi serta mitigasi dan pemantauan risiko setelmen, dengan versi terbaru diterbitkan pada 24 Januari 2025. Sebagai tindak lanjut, Bank Indonesia bersama APUVINDO akan memperbarui *Market Code of Conduct* (MCoC) sebagai panduan kode etik pasar nasional yang selaras dengan 'The Code'. APUVINDO juga akan berperan sebagai *public register* bagi surat pernyataan komitmen (*statement of commitment*) terhadap kode etik pasar, sebagai bentuk pengakuan dan komitmen nyata pelaku PUVA dalam menerapkan praktik terbaik. Inisiatif ini turut diperkuat melalui peluncuran official website APUVINDO untuk memfasilitasi pengelolaan komitmen secara digital. Di sisi lain, dalam penguatan kualitas pelaku pasar uang syariah, Bank Indonesia mendorong sertifikasi tresuri syariah melalui koordinasi dengan ACI FMA Indonesia dan Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA). Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia bersama IIGMA, APUVINDO, dan ACI-FMA telah menyusun modul ajar dan modul uji untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut, sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman instrumen OM syariah dan kode etik pasar syariah secara menyeluruh.

25) Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) Bank Indonesia yang aman dan andal

Bank Indonesia mengembangkan IPK secara terarah dengan memperhatikan strategi pengembangan IPK pada BPPU 2030. Strategi tersebut ditujukan untuk mencapai visi BPPU 2030 terkait pengembangan IPK, yakni mengembangkan dan memperkuat infrastruktur PUVA yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi (3I) sehingga andal, efisien, dan aman. Cakupan pengembangan IPK sebagaimana visi BPPU 2030 dilakukan pada sisi *front-end*, *middle-end*, sampai *back-end*.

Bank Indonesia terus mempersiapkan implementasi *Electronic Trading Platform Multimatching Systems* (ETP MMS) di sisi *front-end* untuk terintegrasi dengan CCP di sisi *middle-end* sesuai tahapan pengembangan produk dan layanan. Hal ini memungkinkan pelaku pasar keuangan bertransaksi terotomasi secara menyeluruh dan *seamless* (*Straight Through Process*) sehingga meminimalkan adanya intervensi manual. Bank Indonesia melanjutkan koordinasi dengan calon penyelenggara ETP MMS sebagai sarana transaksi dan CCP sebagai sarana kliring dan manajemen risiko untuk menciptakan efisiensi pemrosesan transaksi yang pada akhirnya dapat menciptakan pendalaman pasar keuangan di Indonesia yang modern dan maju.

Selain itu, Bank Indonesia juga telah melaksanakan FGD yang dilakukan secara intensif dengan calon penyelenggara ETP MMS, CCP, dan pelaku pasar, guna memastikan implementasi ETP MMS dapat berjalan optimal. Integrasi ETP dan CCP tahap pertama akan difokuskan pada instrumen DNDF dan akan dilanjutkan untuk repo. Penambahan dan perluasan produk akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan volume transaksi dan kesiapan industri.

Dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUVA, Bank Indonesia juga tengah mempersiapkan pengaturan teknis penyelenggaraan ETP MMS. Adanya pengaturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan pendalaman PUVA yang modern dan maju. Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan infrastruktur PUVA untuk memastikan agar ETP MMS dan CCP diselenggarakan dengan memenuhi prinsip keandalan, efisiensi, dan keamanan serta selaras dengan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku, yakni *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI) dan ISO 20022.

PS 08 Merumuskan kebijakan dan implementasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah serta memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus mendorong peningkatan inklusi ekonomi keuangan dan ekonomi keuangan syariah, termasuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, serta penguatan perlindungan konsumen di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan perlunya upaya untuk mendukung perbaikan daya beli masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai kontribusi Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sepanjang triwulan I 2025 Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan melaksanakan program Bank Indonesia serta memperkuat sinergi untuk meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, keuangan berkelanjutan, dan perlindungan konsumen, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

26) Kontribusi Bank Indonesia dalam mendorong pembiayaan syariah serta akses keuangan bagi UMKM dan pelaku usaha syariah

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia melanjutkan berbagai inisiatif untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah, termasuk pembiayaan

hijau, melalui sinergi dan kolaborasi dengan K/L terkait serta pelaku industri keuangan syariah, baik dari sektor komersial maupun sosial. Inovasi produk perbankan syariah terus didorong dengan mengedepankan keunikan model bisnis berbasis prinsip syariah, salah satunya melalui pengembangan skema *investment account*. Pengembangan ini dilakukan melalui kolaborasi erat dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Kementerian Keuangan, khususnya dalam menggali potensi insentif fiskal guna mendukung implementasi *investment account* pada perbankan syariah. Menandai penguatan sinergi dan koordinasi nasional dalam

mendorong pembiayaan syariah, Bank Indonesia menyelenggarakan *Kick-Off Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2025* pada 21 Februari 2025. termasuk peluncuran Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI). Kegiatan ini menjadi tonggak awal dari rangkaian inisiatif BPS yang akan dilaksanakan sepanjang tahun, mencakup berbagai bentuk kolaborasi dengan K/L terkait serta pelaku industri keuangan syariah. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat peran intermediasi perbankan syariah, yang tecermin dari pertumbuhan pembiayaan syariah sebesar 9,15% (yoy) pada triwulan I 2025.

Boks.7: Peluncuran Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2024, Kick Off Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2025 & *Sharia Economic and Financial Outlook (ShEFO)* 2025



Kick Off Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2025, Peluncuran Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2024 & Sharia Economic and Financial Outlook (ShEFO) 2025 di Jakarta

Dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) di Indonesia, sekaligus meningkatkan transparansi dan komunikasi kebijakan ekonomi syariah, Bank Indonesia meluncurkan KEKSI 2024, pada 21 Februari 2025. Peluncuran KEKSI sekaligus untuk memberikan data dan informasi yang relevan untuk mendukung pengembangan sektor eksyar. Dengan tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional”, KEKSI 2024 mengulas capaian dan strategi pengembangan Eksyar sepanjang tahun 2024, serta prospek dan arah kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan Eksyar pada 2025.

Sepanjang 2024, kinerja eksyar Indonesia terus menunjukkan tren positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian tersebut tidak terlepas dari performa sektor unggulan *halal value chain* (HVC) yang terus tumbuh dan menopang lebih dari 25% ekonomi nasional, didorong oleh kinerja sektor Makanan-

Minuman Halal dan Fesyen Muslim, Pariwisata Ramah Muslim, dan Pertanian. Capaian intermediasi perbankan syariah juga mencatat pertumbuhan positif tecermin dari pembiayaan perbankan syariah yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,87%(yoy) pada Desember 2024 dan kinerja keuangan sosial syariah yang tumbuh 4,7% (yoy), serta Indeks Literasi Eksyar 2024 yang meningkat menjadi 42,84% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 28,01%.

Bank Indonesia berkomitmen mendukung pengembangan eksyar melalui bauran kebijakan BI. Pada 2025, kebijakan eksyar akan ditempuh sejalan dengan dukungan Bank Indonesia pada Asta Cita melalui tiga strategi. **Pertama**, penguatan operasi moneter syariah diantaranya dari sisi instrumen, pelaku pasar, dan regulasi untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang dan pasar valuta asing syariah (PUVA), selaras dengan penerbitan BPPU 2030 yang juga mencakup pengembangan pasar uang syariah. **Kedua**,



Penyerahan Buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2024 di Jakarta

BI menjaga kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bank umum syariah untuk mendorong peningkatan likuiditas perbankan syariah, masing-masing sebesar 7,5% dan 3,5%, lebih longgar daripada kewajiban pada bank umum konvensional masing-masing sebesar 9% dan 5%. Selain itu, perbankan syariah juga turut memperoleh manfaat dari instrumen Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). **Ketiga**, penguatan ekosistem HVC melalui program pendampingan, pemberdayaan, maupun peningkatan literasi produk halal diharapkan mampu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif.

Peluncuran KEKSI 2024 dilaksanakan bersamaan dengan *kick off* Bulan Pembiayaan Syariah 2025 dan seminar nasional Sharia Economic and Financial Outlook (ShEFO) 2025. Kegiatan ini merupakan kolaborasi BI bersama OJK, Kementerian Keuangan RI, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), serta berbagai pemangku kepentingan eksyar nasional. Kolaborasi erat menjadi wujud nyata sinergi eksyar untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap keuangan syariah yang inklusif dan hijau, Bank Indonesia juga menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi sepanjang triwulan I 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain melalui Festival Keluarga Indonesia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Seminar *Sharia Economic and Financial Outlook* 2025, TOT Da'i & Da'iyah, Pesantren Kilat Ramadan dan Festival Ramadhan Istiqlal. Tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan dalam rangkaian kegiatan tersebut tergolong baik, yaitu 5,2 atau di atas target tingkat pemahaman peserta edukasi sebesar 4. Sejalan dengan komitmen terhadap pengembangan ekonomi keuangan hijau, Bank Indonesia juga aktif menyusun berbagai kajian pengembangan ekonomi hijau yang disampaikan pada serangkaian kegiatan seminar internasional, antara lain *International Conference on Innovative Pathways to Green Growth* di Bali serta diseminasi pada seminar *The*

Effect of Green Human Capital in Green Economic Growth: Indonesia as a Case Study dalam seminar internasional di Oita, Jepang.

27) Terlaksananya program ekonomi keuangan inklusif dan hijau

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia senantiasa mengembangkan berbagai inisiatif dalam mencapai inklusi ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan. Inisiatif tersebut ditujukan untuk mengakselerasi UMKM naik kelas dan berdaya saing meliputi serangkaian program, antara lain: i) UMKM Go Ekspor; ii) UMKM Go Digital; iii) UMKM yang menerapkan *digital farming*; iv) UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan; v) UMKM yang masuk dalam *database* UMKM potensial. Dukungan akselerasi UMKM berdaya saing secara kontinu dilakukan melalui fasilitasi perluasan akses pasar untuk meningkatkan omzet dan komitmen *business matching* ekspor, serta fasilitasi akses pembiayaan.

Upaya ini telah menghasilkan 6.489 UMKM yang berdaya saing.

Sebagai upaya mendorong UMKM Go Ekspor, Bank Indonesia melakukan serangkaian kegiatan berupa penyusunan pedoman, seleksi UMKM, dan pemetaan UMKM. Pelaksanaan program UMKM Go Ekspor dilakukan melalui pemetaan UMKM dalam rangka promosi perdagangan internasional dan domestik mengacu pada panduan persiapan UMKM Go global. Hasil dari pemetaan tersebut dijadikan acuan penyelenggaraan kurasi nasional untuk produk UMKM komoditas makanan dan minuman olahan, kopi, wastra, dan produk turunan di wilayah Sumatra, Jawa, dan Kawasan Timur Indonesia. Selanjutnya hasil kurasi ini akan digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan UMKM peserta promosi perdagangan, baik di dalam maupun luar negeri. Dukungan akselerasi ekspor UMKM secara kontinu dilakukan oleh Bank Indonesia, baik melalui fasilitasi keikutsertaan UMKM pada kegiatan promosi perdagangan domestik dan internasional maupun melalui keikutsertaan dalam Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional. Pada triwulan I 2025 telah dilaksanakan beberapa program promosi perdagangan, antara lain event *Food and Hotel Asia: Food & Beverage* (FHA F&B) tahun 2025 di Singapura, *Specialty Coffee Expo* (SCE) di New York, dan *Foodex 2025* di Jepang, serta event promosi perdagangan di dalam negeri yaitu *Indonesia International Furniture Expo* (IFEX) 2025 di Jakarta.

Bank Indonesia turut melaksanakan program fasilitasi UMKM dalam rangka mendukung terwujudnya peningkatan akses pembiayaan kepada UMKM. Fasilitasi UMKM dilaksanakan secara menyeluruh melalui peningkatan literasi pencatatan keuangan usaha secara digital dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK), penyediaan/update database profil UMKM potensial dibiayai (BISAID), dan pelaksanaan fasilitasi *business matching* pembiayaan yang diwujudkan melalui Gerakan "AKUBISA" – Akses Keuangan UMKM melalui *Business Matching* (BM) dan literasi untuk peningkatan daya saing. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah melaksanakan edukasi dan sosialisasi SIAPIK kepada 185 trainers yang dilaksanakan dengan konsep *Training of Trainer* (ToT) bekerja sama dengan KPwDN dan Perguruan Tinggi di wilayah Jakarta dan DIY Yogyakarta. Bank Indonesia juga telah menyusun konsep pelaksanaan acara dalam rangka mendorong pencapaian BM yang akan dilaksanakan dalam rangka Karya Kreatif Indonesia (2025). Di samping itu, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan K/L dalam rangka

koordinasi KUR yang menghasilkan kesepakatan berupa komitmen *Business Matching* (BM) pembiayaan kepada UMKM.

Dalam rangka mencapai inklusi ekonomi dan keuangan berkelanjutan dari sisi Pelaku Usaha Syariah (PUS), Bank Indonesia juga melakukan pemberdayaan dan pengembangan ekosistem produk halal pada 3 (tiga) sektor utama, yaitu makanan dan minuman halal (*halal food*), *modest fashion*, dan pariwisata ramah muslim. Pada sektor makanan dan minuman halal, Bank Indonesia melakukan pengembangan ekosistem rantai nilai halal yang berfokus pada upaya mendukung stabilitas harga serta meningkatkan intermediasi guna menjaga inflasi dan stabilitas sistem keuangan. Pengembangan ekosistem makanan dan minuman halal pada sektor hulu, khususnya di bidang pertanian dilakukan melalui sejumlah *pilot project* dalam kerangka Program INFRATANI (*Integrated Farming with Information Technology and Society*) dan Program DESA BERDIKARI (Berdaya, Kreatif, Religi, dan Inspiratif). Pesantren juga dilibatkan dalam pengembangan ekosistem *halal food* dalam Program Kemandirian Ekonomi Pesantren berbasis Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang diarahkan pada komoditas pertanian penyumbang inflasi utama, yaitu cabai, bawang merah, dan ayam pedaging. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga melakukan pengembangan yang berfokus pada penguatan kapasitas pelaku usaha syariah pada produksi dan pengolahan produk halal (hilirisasi dengan menyelenggarakan program Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan memfasilitasi kolaborasi antar pelaku usaha syariah di sektor makanan dan minuman halal dengan memberikan dukungan langsung melalui program pemberdayaan, pelatihan, dan pendampingan serta fasilitasi akses pasar. Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah melakukan persiapan untuk kurasi anggota IKRA tahun 2025 yang dikoordinasikan dengan seluruh KPwDN BI.

Bank Indonesia juga melakukan pengembangan sektor *modest fashion* juga dilakukan Bank Indonesia dalam mendorong inklusi ekonomi-keuangan dan keuangan berkelanjutan. Pengembangan dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas produksi serta perluasan akses pasar domestik dan global guna meningkatkan transaksi penjualan dan omzet pelaku usaha, yang pada akhirnya akan memperkuat kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan untuk perluasan usaha. Pengembangan dilakukan melalui berbagai program, antara lain IKRA

Indonesia sektor *modest fashion* dan penyelenggaraan Indonesia *International Modest Fashion Festival* (IN2MOTIONFEST) dalam berbagai event nasional dan internasional. Sampai dengan triwulan I 2025, Bank Indonesia telah melaksanakan persiapan untuk kurasi anggota IKRA 2025 serta *showcasing* pada kegiatan Muslim Fashion Festival (MUFFEST) 2025 sebagai rangkaian dari acara IN2MOTIONFEST. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong *branding* Indonesia sebagai pusat *modest fashion* dunia sehingga terjadi percepatan penetrasi pasar produk *modest fashion* Indonesia.

Pada sektor Pariwisata Ramah-Muslim (PRM), Bank Indonesia juga berperan dalam pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan berkelanjutan. Pemberdayaan Pokdarwis dilakukan secara sistematis melalui pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan kapasitas manajerial dan pemahaman mereka tentang potensi serta strategi pengembangan bisnis wisata, sesuai dengan prinsip pariwisata ramah muslim. Pada triwulan I 2025 Bank Indonesia telah melaksanakan Program Pokdarwis di Desa Wisata Sungai Batang, Sumatera Barat, dan Desa Wisata Bilebante, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Bank Indonesia telah melakukan koordinasi dan diskusi bersama dengan Perhimpunan Pengusaha Halal Indonesia (PPHI) serta melakukan survei dampak Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2023 kepada mitra kerja pariwisata guna memperkuat latar belakang perlunya survei tersebut dilakukan kembali pada tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan *awareness* pemerintah daerah sekaligus memberikan apresiasi dan pengakuan kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mengembangkan PRM di daerahnya.

- 28) Terjalinnnya kesepakatan/program/koordinasi dengan otoritas/asosiasi/komunitas/lembaga nasional dan internasional dalam ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, baik konvensional maupun syariah

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah melakukan serangkaian koordinasi dengan K/L dan mitra kerja terkait sebagai upaya dalam mendukung ekonomi-keuangan inklusif hijau termasuk penguatan ekosistem industri halal. Koordinasi dilakukan secara masif dan terstruktur antara lain melalui kerja sama yang erat dalam pelaksanaan Kegiatan Inklusi dan Literasi Keuangan yang diselenggarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 3–4 Februari 2025 di Provinsi Sumatera Utara.

Selama triwulan I 2025, sejumlah tindak lanjut telah dilakukan atas kesepakatan antara Bank Indonesia dan berbagai lembaga terkait untuk mendukung ekonomi-keuangan inklusif hijau termasuk penguatan ekosistem industri halal. Di antaranya adalah pengembangan *Dashboard* Pusat Data ZISWAF Terintegrasi bersama Badan Wakaf Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan basis data terpadu sebagai landasan penyusunan strategi akselerasi pengembangan ZISWAF. Selain itu, Bank Indonesia telah melakukan koordinasi dalam penyusunan roadmap pengembangan amal usaha Muhammadiyah sebagai bagian dari upaya penguatan ekosistem rantai nilai halal. Pengembangan skema pembiayaan inovatif juga menjadi perhatian, tecermin dari penyusunan kajian Bank Indonesia bersama KNEKS dan Kementerian Keuangan mengenai konsep *Sharia Economic Development Fund* yang akan dikelola oleh Islamic Social and Microfinance Vehicle (ISMV) atau lembaga pemerintah. Guna memperkuat kapasitas kelembagaan, Bank Indonesia juga bersinergi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam kegiatan *capacity building* dan penyusunan opini syariah terkait tugas-tugas Bank Indonesia, seperti instrumen SUKBI, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan PUVAS.

PS 09 Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerjasama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan internasional untuk mendukung stabilitas makroekonomi, sistem pembayaran, dan sistem keuangan nasional di tengah dinamika lingkungan strategis global dan peningkatan ketidakpastian kebijakan ekonomi negara maju. Melalui kebijakan internasional yang strategis dan proaktif seperti mendorong transaksi berbasis mata uang lokal, memperkuat jaring pengaman keuangan internasional, menjaga kepercayaan lembaga internasional melalui pengelolaan persepsi positif terhadap perekonomian nasional dan menjalin sinergi kerja sama global, Bank Indonesia turut menjaga perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah tantangan global. Komitmen ini tak hanya mendukung stabilitas makroekonomi, sistem pembayaran, dan sistem keuangan, namun juga mengukuhkan posisi Indonesia sebagai mitra penting dan strategis dalam arsitektur keuangan dunia.

Sepanjang triwulan I 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerja sama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

29) Terjaganya persepsi positif lembaga internasional, lembaga pemeringkat, dan investor global terhadap perekonomian Indonesia

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global yang meningkat, Bank Indonesia terus melakukan berbagai strategi yang proaktif dan kredibel untuk menjaga persepsi positif lembaga internasional dan pemeringkat terhadap perekonomian Indonesia. Di bawah kepemimpinan Bank Indonesia sebagai Sekretariat *Investor Relation Unit* (IRU) Nasional, pengelolaan persepsi positif ekonomi Indonesia berhasil dikawal dengan baik dengan tujuan utama untuk mendorong peningkatan arus masuk modal asing melalui investasi portofolio (*Portfolio Investment* - PI) dan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment* - FDI). Pengelolaan persepsi positif ekonomi Indonesia yang baik ditunjukkan oleh afirmasi *rating* dari lembaga pemeringkat Fitch pada level BBB dengan *outlook* stabil serta hasil *periodic review* Moodys pada level Baa2 dengan *outlook* stabil. Afirmasi ini menunjukkan keyakinan internasional terhadap stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga, didukung oleh kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Selain itu, Bank Indonesia melakukan penguatan *investor outreach* dilakukan melalui penyelenggaraan *Investor Conference Call* (ICC) serta temu investor dalam format grup dan bilateral baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk memperkuat persepsi positif investor global terhadap perekonomian Indonesia. Sepanjang triwulan I 2025, Bank Indonesia berhasil merespons berbagai hal yang menjadi fokus investor global dan menjaga persepsi positif investor di tengah peningkatan ketidakpastian ekonomi global dan berbagai risiko ekonomi domestik. Respons tersebut dilakukan melalui komunikasi dan *engagement* yang intensif dan rutin dengan lembaga pemeringkat dan investor asing di antaranya melalui penyelenggaraan ICC bulanan sebanyak 3 kali dengan narasumber dari Bank Indonesia serta ICC triwulanan dengan narasumber dari Bank Indonesia

dan Kementerian Keuangan. Di samping itu, Bank Indonesia juga melakukan *engagement* dengan berbagai investor utama global melalui kegiatan temu investor secara *targeted*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. KPwLN juga menyelenggarakan berbagai temu investor di wilayah kerja masing-masing secara bulanan yang telah terlaksana sebanyak 46 kali sepanjang Januari sampai dengan Maret 2025.

30) Terjalinnnya sinergi kebijakan dan kerja sama internasional untuk mendukung kebijakan utama secara optimal

Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama *Local Currency Transaction* (LCT) dengan bank sentral mitra. Kerja sama LCT merupakan salah satu inisiatif yang ditempuh untuk diversifikasi mata uang dalam transaksi bilateral antarnegara untuk memperkuat ketahanan sektor eksternal dengan stabilitas nilai tukar yang meningkat. Dalam mendorong implementasi LCT, Bank Indonesia menerapkan strategi: (i) *refocusing* melalui penajakan intensifikasi cakupan kerja sama dengan negara mitra saat ini (*existing*) serta ekstensifikasi perluasan kerja sama dengan negara mitra baru; dan (ii) *restrategizing* melalui pelaksanaan sosialisasi 3T (*Targeted*, Terintegrasi, Terencana), termasuk melalui koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional LCT. Strategi ini berhasil meningkatkan capaian nilai transaksi LCT dan jumlah pelaku LCT secara signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga triwulan I 2025, nilai transaksi dan jumlah pelaku LCT tercatat mengalami peningkatan masing-masing menjadi sebesar 5,35 miliar USD, dan 19.755 pelaku usaha, dibandingkan triwulan I tahun 2024 yang sebesar 2,32 miliar USD dan 10.578 pelaku usaha.

Bank Indonesia terus mendorong penerapan LCT bekerja sama dengan beberapa otoritas mitra. Upaya ini antara lain ditempuh dengan mempercepat kesepakatan kerangka kerja sama LCT dengan Uni Arab Emirat pada Januari 2025. Penguatan kerangka kerja sama LCT Indonesia dengan UAE dilakukan melalui koordinasi teknis antar bank sentral kedua negara yang melibatkan perbankan dalam kerangka *Joint Working Group* (JWG) LCT Indonesia - Uni Emirat Arab (UAE) sebagai wadah *sharing experience* terkait tantangan dan peluang LCT, serta sinergi untuk mendorong implementasi LCT di kedua negara. Penerapan LCT UAE akan terus didorong melalui peran aktif Bank ACCD untuk menjangkau nasabah dan memperkuat peran JWG dalam mendorong implementasi strategi LCT. Selain itu, implementasi

LCT Malaysia dan Thailand juga diperkuat dengan penambahan Bank ACCD dengan mempertimbangkan dari rekomendasi bank sentral negara mitra.

Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank of Thailand (BOT) telah menyepakati harmonisasi Pedoman Operasional Kerangka Kerja Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (*Local Currency Transaction Framework Operational Guidelines/LCTF OG*) pada 17 Februari 2025. Kesepakatan antara BI-BNM-BOT tersebut memperluas cakupan transaksi lintas batas, dari yang sebelumnya mengatur perdagangan barang, jasa dan investasi langsung, selanjutnya akan mencakup pula transaksi investasi portofolio. Langkah ini menunjukkan komitmen ketiga negara untuk mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi regional. Penyelarasan ini mengonsolidasikan beberapa pedoman bilateral sehingga proses transaksi akan lebih efisien dan transparan, baik untuk lembaga keuangan maupun penggunanya. Perluasan cakupan transaksi juga akan memberi kesempatan yang lebih besar bagi para investor untuk bertransaksi dalam mata uang lokal dan memitigasi risiko nilai tukar. Dari sisi ketentuan, untuk mendukung harmonisasi LCTF OG, Bank Indonesia telah menerbitkan PADG Nomor 5 Tahun 2025 tentang perubahan atas PADG No. 23/12/PADG 2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Malaysia menggunakan Rupiah dan Ringgit melalui Bank, dan PADG Nomor 6 Tahun 2025 tentang perubahan atas PADG No. 22/34/PADG 2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Thailand menggunakan Rupiah dan Baht melalui Bank yang telah berlaku sejak 27 Maret 2025.

Di sisi domestik, Bank Indonesia juga memperkuat sinergi dengan K/L melalui Rapat Koordinasi Tingkat Teknis Satgas Nasional LCT. Pada triwulan I 2025, telah diselenggarakan rangkaian kegiatan rapat koordinasi tingkat teknis pada 20 Februari 2025 bersama anggota Komite Kerja (KK) II di bidang perbankan dan pasar keuangan, serta pada 21 April 2025 bersama dengan anggota KK III di bidang perluasan penggunaan LCT dalam transaksi pembayaran antarnegara. Secara umum K/L menyepakati besaran usulan rencana strategis dan program kerja mengacu pada Nota Kesepahaman Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Transaksi Indonesia dengan Negara Mitra sesuai kewenangan dan peran masing-masing. Dalam kaitan ini, usulan program kerja selanjutnya akan dibahas dan disepakati pada pertemuan Komite Kerja

tingkat Deputi yang rencananya akan dilaksanakan pada Semester I 2025, sebelum dilaksanakannya pertemuan Dewan Pengarah yang direncanakan akan dilaksanakan pada Semester II 2025.

Sebagai bentuk Kerja Sama Keuangan Internasional (KKI) lainnya, Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI). Penguatan kerja sama antara lain dilakukan melalui penguatan elemen perjanjian BCSA BI-PBOC dan BCSA BI-RBA. Bank Indonesia dan the People's Bank of China (PBOC) sepakat memperbarui perjanjian bilateral pertukaran mata uang lokal atau BCSA untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Perjanjian ditandatangani oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur PBOC, Pan Gongsheng, serta mulai berlaku sejak 31 Januari 2025. Kerja sama BCSA memungkinkan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai CNY400 miliar (ekuivalen USD55 miliar) dengan nilai Rupiah yang setara. Di samping itu, Bank Indonesia dan the Reserve Bank of Australia (RBA) menyepakati pembaruan perjanjian *swap* bilateral dalam mata uang lokal BCSA. Kesepakatan ini melanjutkan kerja sama kedua bank sentral yang telah berjalan sejak Desember 2015. Kerja sama ini memungkinkan pertukaran mata uang lokal masing-masing negara hingga senilai AUD10 miliar (ekuivalen USD6,2 miliar) dengan nilai Rupiah yang setara. Perjanjian BCSA BI-PBOC dan BI-RBA merepresentasikan peran penting kerja sama internasional yang dilakukan Bank Indonesia dalam mendukung program Asta Cita, khususnya menjaga ketahanan sektor eksternal melalui upaya pemenuhan kecukupan cadangan devisa serta berkontribusi pada stabilitas keuangan kedua negara.

Bank Indonesia terus melakukan penguatan koordinasi dan sinergi bersama K/L dalam rangka pengelolaan persepsi positif dan fasilitasi kegiatan promosi investasi dan perdagangan. Penguatan dilakukan dengan mengoptimalkan tiga pilar, yaitu: i) rancangan strategi promosi investasi dan perdagangan yang diselaraskan dengan Asta Cita (antara lain kegiatan promosi fokus pada sektor prioritas, meningkatkan lapangan kerja dan kewirausahaan, dan industri kreatif), termasuk dengan memanfaatkan peluang dari kerja sama internasional (*Foreign Trade Agreement - FTA*); ii) optimalisasi *market intelligence* KPwLN untuk penguatan sisi *demand* (investor/buyer potensial); iii) sinergi penguatan sisi *supply*, antara lain *product, pricing, quality* dan kontinuitas produk UMKM, maupun proyek investasi yang *clean and clear* untuk ditawarkan kepada investor. Penguatan persepsi positif investor sektor riil juga ditempuh melalui penyampaian

key message oleh pimpinan Bank Indonesia dan otoritas pemerintah Indonesia pada saat kegiatan promosi, antara lain pada saat *bilateral investor meeting* dengan Perwakilan Pemerintah Sichuan Province.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia melalui *linkage Investor Relation Unit – Regional Investor Relation Unit – Global Investor Relation Unit (IRU-RIRU-GIRU)* telah memfasilitasi penyelenggaraan 6 (enam) kegiatan promosi perdagangan dalam bentuk pameran dagang dan pertemuan bilateral. Fasilitasi dilakukan untuk mempromosikan produk unggulan dari 33 UMKM binaan Bank Indonesia di 9 (sembilan) provinsi untuk produk kopi, teh, makanan/minuman olahan, rempah-rempah, kerajinan, dan *fashion*.

31) Terjaganya kepentingan Bank Indonesia/Republik Indonesia melalui penyampaian posisi Bank Indonesia/Republik Indonesia di forum/kerja sama internasional

Bank Indonesia senantiasa memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan/atau ekonomi Republik Indonesia melalui diplomasi dan/atau negosiasi di forum/lembaga/kerja sama internasional. Posisi/*stances* Indonesia telah diterima di berbagai forum/lembaga/kerja sama internasional, antara lain pada rangkaian ASEAN Working Committees (ASEAN WCs), ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting – Working Group (AFCDM-WG), ASEAN Senior Level Committee (SLC), Task Force ASEAN Swap Arrangement (TF-ASA), G20, EMEAP, ASEAN+3,

dan IMF (termasuk dalam *Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions /AREAER*).

Di ASEAN, Bank Indonesia mendukung prioritas keketuaan Malaysia, khususnya pada isu keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan konektivitas sistem pembayaran, serta *Project Revive* yang sejalan dengan inisiatif *Revisiting Working Committees (WCs) Mandate* yang diusung Indonesia pada keketuaan ASEAN 2023. *Project Revive* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan mengurangi redundansi pertemuan jalur keuangan ASEAN. Bank Indonesia juga terus mengawal posisi dalam rencana pembentukan kembali perjanjian ASEAN Swap Arrangement (ASA) sebagai jaring pengaman keuangan regional. Dalam 30th Meeting of the Working Committee on Payment and Settlement Systems (WC-PSS) pada 18–19 Februari 2025, Bank Indonesia mengusulkan perluasan *roadmap Regional Payment Connectivity (RPC) Beyond ASEAN* yang secara umum disetujui ASEAN Member States (AMS) untuk dibahas secara bertahap. Di ASEAN+3, Bank Indonesia aktif memperkuat JPKI dan berkontribusi dalam pembahasan *New Financing Structure CMIM* dan operasionalisasi *Rapid Financing Facility (RFF)* melalui amandemen *CMIM Agreement (AG)* dan *Operational Guidelines (OG)*. Bank Indonesia juga mendorong kekuatan organisasi ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) sebagai *trusted policy advisor* dalam mendukung IMF De-linked Portion (IDL) dari 40% menjadi 50%.

Boks.8: The 29th ASEAN Senior Level Committee (SLC) Meeting 2025



29th ASEAN Senior Level Committee (SLC) on Financial Integration and Related Meetings di Kota Kinabalu, Malaysia

Pertemuan ASEAN SLC merupakan forum strategis dalam jalur keuangan khusus bank sentral yang ditujukan untuk mengarahkan kebijakan integrasi

keuangan kawasan ASEAN. Bank Indonesia berperan aktif sebagai *Chair* dalam pertemuan SLC bersama State Bank of Vietnam. Forum ini membahas perkembangan

agenda prioritas ASEAN dan *deliverables* inisiatif yang berada di bawah SLC. Agenda *financial integration* ASEAN SLC mencakup kemajuan diskusi pada *working committee Capital Account Liberalization* (CAL), *ASEAN Banking Integration Framework* (ABIF), *Financial Services Liberalisation* (FSL), *Capital Market Development* (CMD), *Financial Inclusion* (FINC), dan *Payment and Settlement Systems* (PSS). Pertemuan ini juga menjadi wadah untuk menyamakan pandangan dalam menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan digitalisasi.

Pertemuan *Steering Committee on Capacity Building* (SCCB) membahas evaluasi pelaksanaan program *capacity building* 2024 dan penyusunan *learning roadmap* 2025 yang selaras dengan kebutuhan *Working Committees* (WCs). Pertemuan *Task Force on SF* membahas finalisasi *ASEAN Green Map*, perkembangan *ASEAN Taxonomy Version 4*, serta strategi komunikasi perubahan iklim. Sementara itu, dalam sesi utama SLC, dibahas berbagai inisiatif prioritas, termasuk *Project Revive* untuk reformasi kelembagaan jalur keuangan ASEAN, progres *re-establishment* ASEAN *Swap Arrangement* (ASA), dan capaian masing-masing WC. Diskusi juga mencakup *outlook* perekonomian kawasan yang disampaikan oleh IMF dan AMRO, serta

komitmen penguatan kerja sama regional melalui berbagai kebijakan digital dan integrasi pasar.

Hasil pembahasan menunjukkan *outlook* perekonomian kawasan ASEAN pada tahun 2025 diperkirakan pada tren yang cukup positif, yaitu pada level 4,7%. Di sisi lain, proyeksi inflasi kawasan diperkirakan tetap rendah pada level 3,1% di tahun 2025, mengalami penurunan signifikan dari 6,3% pada tahun sebelumnya. Tren penurunan inflasi ini diperkirakan akan berlanjut hingga mencapai 2,8% pada tahun 2026, mencerminkan perbaikan stabilitas harga dan respons kebijakan yang efektif dalam menjaga keseimbangan makroekonomi kawasan.

Secara keseluruhan, pertemuan SLC ke-29 telah terlaksana dengan baik dan mencerminkan komitmen negara-negara ASEAN dalam memperkuat integrasi keuangan kawasan di tengah dinamika ekonomi global. Pembahasan yang mencakup *capacity building*, *sustainable finance* dan konektivitas sistem pembayaran menjadi fondasi penting bagi penguatan stabilitas dan ketahanan sistem keuangan ASEAN. Pertemuan SLC diharapkan dapat semakin memperkuat kerja sama ASEAN dalam menghadapi tantangan global serta mendukung stabilitas ekonomi.

Di tingkat multilateral, Bank Indonesia terus menjaga posisi Indonesia dalam G20 dan *Annual Report on Exchange Arrangement and Exchange Restrictions* (AREAER) dan *Macroprudential Policy* (MP) *Survey* 2024. Dalam 2nd G20 *Finance Ministers and Central Bank Deputies* (FCBD), Presidensi Afrika Selatan memutuskan untuk menerbitkan *Chair's Summary* G20 FMCBG (Februari 2025) yang menegaskan peran sentral G20 sebagai forum kerja sama ekonomi global dengan tema "*Solidarity, Equality and Sustainability*," serta dukungan terhadap stabilitas ekonomi global melalui kebijakan fiskal dan moneter yang kredibel dan kerja sama multilateral yang erat. Selain itu, juga disinggung mengenai reformasi dan peningkatan efektivitas lembaga multilateral seperti IMF dan *Multilateral Development Bank* (MDB) dengan masukan strategis Bank Indonesia mengenai 16th *General Review of Quota* (GRQ) dan *insurance protection gap* yang telah diterima. Selain itu, Bank Indonesia juga menyampaikan pengkinian AREAER dan *Macroprudential Policy* (MP) *Survey* 2024 kepada IMF yang mencakup kebijakan moneter, aliran modal, ekspor-impor, perpajakan, dan *digital currency and crypto assets*. Penyusunan dilakukan

melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Di tingkat regional, Bank Indonesia terus menjaga posisi Indonesia di forum EMEAP dan BIS melalui penyusunan *paper* dan perkembangan perekonomian Indonesia. Bank Indonesia berkontribusi dalam penyusunan *Look Back Look Forward* (LBLEF) *Paper* untuk memperingati 30 tahun EMEAP *Governors' Meeting*, termasuk mendorong penguatan kristalisasi hasil pertemuan dan *top-down guidance* agar lebih strategis dan selaras dengan arahan EMEAP *High Level Meetings*. Dalam rangka kesiapan kawasan menghadapi krisis, Bank Indonesia turut serta dalam *Crisis Communication Test* (CCT) tahunan yang diselenggarakan oleh EMEAP dan mengusulkan pengintegrasian skenario krisis. Di forum Bank for International Settlements (BIS), Bank Indonesia menyampaikan pandangan mengenai *recent economic development* dan *current issues* kebanksentralan, termasuk kontribusi aktif dalam diskusi BIS *Central Bank Governance Group* (CBGG) terkait penentuan topik diskusi prioritas 2025. Di forum South East Asian Central Banks (SEACEN), Bank Indonesia aktif

dalam proses rekrutmen *Director of Macroeconomics and Monetary Policy Management* (MMPM) baru serta penyusunan *SEACEN Strategic Plan 2026–2028*.

Dalam kerja sama bilateral, Bank Indonesia memperkuat *Structured Bilateral Cooperation* (SBC) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bank sentral. Bank Indonesia telah menjalin kerja sama SBC dengan 14 bank sentral mitra yang meliputi Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Turki, Singapura, Korea Selatan, India, Swiss, Lao PDR, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Kamboja, dan Vietnam. SBC dengan State Bank of Vietnam (SBV) yang berlaku efektif sejak 7 Maret 2025 untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. SBC tersebut merupakan bagian penting hasil pertemuan Presiden Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal Republik Sosialis Vietnam pada 10 Maret 2025, sekaligus memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam. Melalui skema SBC, Bank Indonesia menginisiasi pertukaran informasi, penguatan kapasitas, serta kerja sama yang lebih sistematis dan bermanfaat. Hal ini tercermin dalam berbagai program, antara lain *joint workshop* dengan Bank of England (BoE) yang mengangkat tema *4th ASEAN Regional Workshop on Payments Systems "Navigating the Future of Payment Systems"* pada 27-28 Februari 2025 bersama Monetary Authority of Singapore (MAS), Bank Negara Malaysia (BNM), Bank of Thailand (BoT), dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA). Bank Indonesia juga melaksanakan *technical level meeting* dengan Bank of Japan (BoJ) serta penyelenggaraan *capacity building/knowledge sharing* mengenai perkembangan dan *outlook* ekonomi Indonesia kepada Institute for International Monetary Affairs (IIMA) Japan. Langkah tersebut menjadi bukti nyata Bank Indonesia dalam mengukuhkan *institutional leadership* di kawasan maupun *beyond ASEAN*.

PS 10 Merumuskan dan implementasi bauran kebijakan kelembagaan dengan kepemimpinan profesional dan tata kelola yang baik untuk mencapai kinerja unggul

Di tengah tantangan lingkungan strategis yang memerlukan penguatan kerangka kerja serta penyempurnaan proses bisnis kebijakan dan kelembagaan, Bank Indonesia senantiasa mengutamakan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana amanat UU. Selain itu, penguatan kewenangan Bank Indonesia, cepatnya perkembangan teknologi digital, dan pergeseran demografi pegawai ke generasi milenial dan generasi Z

yang semakin besar, mendorong Bank Indonesia untuk selalu memperkuat pengelolaan SDM dan meningkatkan kompetensi kepemimpinan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Sepanjang triwulan I 2025, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan dan implementasi bauran kebijakan kelembagaan dengan kepemimpinan profesional dan tata kelola yang baik untuk mencapai kinerja unggul sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

32) Terjaganya kinerja kelembagaan yang efektif dan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik

Bank Indonesia secara konsisten menjaga kinerja kelembagaan yang efektif dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya penyempurnaan berkelanjutan dalam implementasi praktik tata kelola yang baik dan profesional. Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah melaksanakan tindak lanjut atas pencapaian tingkat maturitas tata kelola di Bank Indonesia tahun 2024 yang mencapai level *enhanced*. Pencapaian tingkat maturitas tahun 2024 tersebut disertai sejumlah rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan praktik tata kelola yang lebih baik. Menindaklanjuti hal tersebut, Bank Indonesia telah merumuskan *action plan* sebagai dasar penguatan maturitas tata kelola yang selanjutnya akan dimonitor secara berkala.

Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, Bank Indonesia juga melakukan penguatan terhadap fungsi audit intern. Hal ini dilakukan melalui penerbitan ketentuan internal terkait manajemen audit intern dan struktur organisasinya sebagai dasar penguatan peran audit intern dalam melakukan fungsi asesmen, strategi, advisori pengendalian internal serta pelaksanaan audit intern pada area tata kelola, keuangan, dan operasional. Bank Indonesia juga tengah melakukan integrasi tata kelola yang mencakup integrasi fungsi hukum, fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen audit intern, mulai dari perumusan ketentuan hingga pelaksanaan dan pengendalian. Integrasi tiga fungsi tata kelola ini dilakukan guna memastikan ketentuan yang memadai, proses pengambilan keputusan yang jelas, serta kepatuhan terhadap implementasi regulasi. Di area integritas kelembagaan, Bank Indonesia memperoleh capaian yaitu hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana Bank Indonesia memperoleh indeks tertinggi sebesar 86,71 dan berada di atas rata-rata lembaga, baik tipe besar (78,40) maupun nasional (71,53). Predikat

tersebut telah diperoleh Bank Indonesia selama empat tahun berturut-turut sejak 2021 sebagai wujud nyata komitmen terhadap transparansi dan budaya integritas yang merupakan bagian dari tata kelola yang baik.

Lebih lanjut, dalam menjaga maturitas Maturitas Risiko Bank Indonesia (MRBI) dan Maturitas Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI), Bank Indonesia senantiasa menindaklanjuti *Opportunity for Improvement (OFI)* hasil penilaian tahun 2024. Penguatan MRBI dilakukan melalui: (i) pengembangan konsepsi integrasi tata kelola kelembagaan yang mencakup integrasi fungsi manajemen risiko, audit intern, dan fungsi hukum; (ii) penyempurnaan ketentuan manajemen risiko selaras dengan sistem tata kelola Bank Indonesia; (iii) implementasi integrasi tata kelola kelembagaan secara bertahap; serta (iv) pengkinian metodologi dan proses bisnis dalam pengendalian risiko Bank Indonesia secara terintegrasi. Sementara itu, Bank Indonesia melakukan penguatan MKTBI melalui: (i) pengembangan penetapan *recovery time objective* (RTO) sebagai dasar pemulihan SDM dan lokasi kerja; (ii) identifikasi risiko disruptif yang lebih detail selaras dengan strategi pemulihan dan penyiapan sumber daya; serta (iii) pelaksanaan simulasi dengan cakupan multi skenario yang lebih beragam guna memastikan kesiapan SDM dan infrastruktur, serta penguatan protokol keberlangsungan tugas sebagai tindak lanjut perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil simulasi yang telah dilaksanakan.

33) Pemenuhan penerbitan dan pelaksanaan peraturan per-Undang-Undang Bank Indonesia sesuai amanat Undang-Undang dan kebutuhan Bank Indonesia

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan yang ada dan menerbitkan ketentuan baru dalam rangka menjaga kecukupan landasan hukum dalam pelaksanaan tugas. Dalam periode tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan 35 peraturan yang terdiri dari 6 PBI, 14 PDG, 9 PADG, dan 6 PADG Internal. Penerbitan ketentuan merupakan pemenuhan terhadap amanat beberapa Undang-Undang antara lain UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU BIK), dan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan UU BIK. Selain itu, pada triwulan I 2025 Bank Indonesia melakukan penyesuaian PBI dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mengenai

devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor dari kegiatan terkait sumber daya alam. Penerbitan ketentuan juga dilakukan dalam rangka merespon dinamika kebijakan dan kebutuhan penguatan fungsi kelembagaan secara menyeluruh. Secara umum, pembentukan peraturan di Bank Indonesia dilakukan melalui: (i) asesmen hukum secara komprehensif di area kebijakan utama dan kebijakan kelembagaan; (ii) proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya; serta (iii) koordinasi dengan mitra kerja terkait. Hal tersebut dimaksudkan agar peraturan yang diterbitkan dapat mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia dan selaras dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta sesuai dengan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

34) Terjaganya akuntabilitas dan kinerja keuangan lembaga

Sebagai wujud akuntabilitas kelembagaan kepada publik, Bank Indonesia menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan Bank Indonesia dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan kredibilitas Bank Indonesia yang berlandaskan kinerja efektif, efisien, dan berkepatuhan melalui terjaganya akuntabilitas dan sustainabilitas keuangan Bank Indonesia. Sebagai bentuk akuntabilitas keuangan sebagaimana amanat UU, pada triwulan I 2025, Bank Indonesia menyusun Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) 2024 *Unaudited* dan menyampaikan LKTBI tersebut kepada BPK-RI untuk dilakukan pemeriksaan. Proses pemeriksaan BPK-RI dilaksanakan pada awal Februari sampai dengan awal Mei 2025 (selama 90 hari). Dalam proses pemeriksaan BPK RI tersebut, Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan sinergi yang efektif sehingga dapat memberikan BPK-RI keyakinan yang memadai untuk memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKTBI Tahun 2024. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk terus mengelola keuangan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan menyajikan laporan keuangan yang relevan, akuntabel, dan transparan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan antara lain melalui pengendalian terhadap realisasi anggaran agar selalu sesuai dengan perencanaan, pengembangan sistem keuangan disertai sosialisasi pengelolaan sumber daya keuangan, dan penguatan fungsi *Internal Control Officer* (ICO) di masing-masing satuan kerja di Bank Indonesia.

35) Tersedianya SDM yang kompeten, profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia

Penguatan pengelolaan SDM yang kompeten, profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia dilakukan melalui penerapan strategi perencanaan, pemenuhan, pengembangan, dan pemeliharaan (4P). Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia memfokuskan strategi pengelolaan SDM pada penguatan perencanaan SDM beserta strategi pemenuhannya yang mempertimbangkan optimalisasi formasi SDM sebagai dampak implementasi digitalisasi proses bisnis di Bank Indonesia. Penguatan perencanaan SDM juga dilakukan dengan menyusun konsepsi kebijakan dan pedoman Manajemen Karier sebagai acuan pelaksanaan suksesi kepemimpinan serta skema pemenuhan SDM internal yang baru. Ke depan, Bank Indonesia melakukan pengembangan SDM berdasarkan postur program pengembangan karir dan program pengembangan kompetensi pegawai tahun 2025. Program tersebut bertujuan untuk membangun kepemimpinan profesional dengan kompetensi yang relevan di era digital dan mental spiritual untuk mendukung kontribusi nyata bank sentral dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, Bank Indonesia juga melakukan penguatan pada aspek pemeliharaan SDM melalui *Employee Value Proposition* (EVP) 3.0 terkait fasilitas perkantoran, perumahan dan kesehatan.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah meluncurkan *HR Super Apps* yang merupakan platform integratif untuk mempermudah pegawai dalam merencanakan karier, meningkatkan kinerja, mengembangkan kompetensi, dan menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Hal ini merupakan bentuk akselerasi dalam pencapaian *3-Smart* dan penguatan sistem manajemen SDM. Ke depan Bank Indonesia akan terus mengembangkan fitur-fitur *HR Super Apps* untuk meningkatkan *employee experience*.

PS 11 Merumuskan dan implementasi kebijakan komunikasi dan pengaturan hukum untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai bank sentral dan lembaga publik, komunikasi kebijakan perlu diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia. Komunikasi publik berperan besar dalam meningkatkan efektivitas kebijakan bank sentral, termasuk dalam memperkuat pemahaman dan pembentukan ekspektasi terkait dengan perkembangan ekonomi terkini dan berbagai

langkah kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia. Selain itu, penguatan akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia juga ditempuh dengan memastikan tersedianya landasan aturan hukum yang cukup sehingga pelaksanaan tugas Bank Indonesia senantiasa dilakukan sesuai kewenangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik dan profesional sebagaimana amanat UU P2SK.

Sepanjang triwulan I 2025 Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan dan implementasi kebijakan komunikasi dan pengaturan hukum untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

36) Komunikasi untuk mendukung efektifitas kebijakan serta pemenuhan transparansi

Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga keterbukaan informasi publik dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Sepanjang triwulan I 2025, Bank Indonesia secara konsisten memperkuat kolaborasi dan sinergi kelembagaan dengan K/L dalam mendorong komunikasi kebijakan. Selanjutnya, dalam memastikan implementasi pelayanan informasi publik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bank Indonesia senantiasa meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan layanan informasi publik, di antaranya melalui forum edukasi, *workshop* pemutakhiran informasi, dan berbagai kegiatan lain. Bank Indonesia juga telah melakukan pemutakhiran informasi dan mengumumkan daftar informasi publik (DIP) pada situs Bank Indonesia agar dapat diakses secara luas oleh publik.

Sebagai upaya dalam mempertahankan peringkat sebagai Badan Publik Informatif, pada triwulan I 2025 Bank Indonesia telah memperkuat ketentuan internal terkait keterbukaan informasi publik. Langkah ini ditempuh guna memastikan keselarasan ketentuan internal Bank Indonesia dengan UU dan peraturan yang berlaku, serta menjadi upaya strategis untuk menjaga konsistensi, kepastian hukum, dan tata kelola layanan informasi publik yang akuntabel. Sementara itu, untuk memastikan implementasi pelayanan informasi publik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bank Indonesia senantiasa meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan pelayanan informasi publik, di antaranya melalui pelaksanaan sosialisasi Pemutakhiran Portofolio Informasi, DIP dan DIK

Bank Indonesia tahun 2025 bersama perwakilan Manajer Informasi dan/atau *Steward Informasi* Bank Indonesia. Dalam hal melaksanakan kewajiban Badan Publik, Bank Indonesia secara intensif mengimplementasikan layanan informasi publik yang lebih inklusif. Bank Indonesia senantiasa memenuhi respons atas permohonan, keberatan, dan sengketa informasi yang diajukan publik melalui jalur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan ketentuan UU KIP serta telah melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui kanal komunikasi Bank Indonesia. Pada triwulan I 2025, terdapat 94,89% pemohon informasi yang puas terhadap kualitas pelayanan informasi publik Bank Indonesia, di mana rata-rata permohonan informasi dapat dijawab dalam waktu kurang dari 1 hari kerja.

Selain itu, Bank Indonesia juga telah menerbitkan Laporan Layanan Informasi Publik periode 2024 dengan tema “Sinergi Memperkuat Transparansi dan Hak Akses Masyarakat atas Informasi Publik” yang mencakup evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik 2024, serta arah kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai pada 2025. Laporan dimaksud juga telah disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat sebagai bentuk akuntabilitas dan responsibilitas Bank Indonesia.

37) Komunikasi untuk menjaga persepsi publik yang positif terhadap Bank Indonesia

Pada triwulan I 2025, komunikasi Bank Indonesia diarahkan pada pengelolaan ekspektasi dan literasi *mitra kerja* sejalan dengan *stance* BKBI. Komunikasi kebijakan diharapkan dapat memperkuat ekspektasi publik terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas (*pro-stability*), serta kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan ekonomi keuangan inklusif dan hijau yang diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). BKBI tersebut ditujukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, memastikan inflasi terkendali dalam kisaran sasaran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, komunikasi kebijakan juga diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi seluruh lapisan masyarakat terkait dengan *stance* kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia.

Komunikasi bauran kebijakan Bank Indonesia pada triwulan I 2025 berfokus pada hasil keputusan RDG Bulanan Januari 2025 yang memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 % dan dipertahankan sampai Maret 2025.

Komunikasi intensif dilakukan untuk memperkuat ekspektasi masyarakat bahwa keputusan Bank Indonesia tetap konsisten dengan *stance* kebijakan moneter yang *pro-stability* dan sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* dalam menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah serta untuk memastikan tetap terkendalnya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2025. Terkait pengendalian inflasi, Bank Indonesia mengomunikasikan rangkaian kegiatan sinergi antara Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai mitra strategis lainnya dalam TPIP dan TPID, di antaranya melalui GNPIP di berbagai daerah. Sementara itu, komunikasi kebijakan *pro-growth* pada triwulan I 2025 difokuskan pada keselarasan dukungan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Pemerintah dalam program Asta Cita, juga strategi makroprudensial dan sistem pembayaran seperti KLM dalam rangka pertumbuhan kredit perbankan dan QRIS TAP untuk mendorong kemudahan bertransaksi seluruh lapisan masyarakat melalui digitalisasi sistem pembayaran.

Bank Indonesia juga secara aktif melaksanakan komunikasi kebijakan kepada *mitra kerja* yang *disasar*. Komunikasi Bank Indonesia secara konsisten diarahkan untuk mengelola literasi publik melalui beragam kanal *above the line* (ATL) seperti *website*, media sosial Bank Indonesia, serta media massa. Ada pun komunikasi melalui kanal *below the line* (BTL), antara lain dilakukan melalui konferensi pers, taklimat media, serta FGD dengan ekonom, akademisi, lembaga riset, K/L, parlemen, dan media. Kegiatan komunikasi *through the line* (TTL) dilakukan Bank Indonesia melalui kegiatan edukasi yang dipublikasikan pada kanal media sosial Bank Indonesia dan kegiatan komunikasi interaktif yang diselenggarakan oleh Museum Bank Indonesia (MuBI). Melalui berbagai strategi komunikasi dimaksud, Bank Indonesia dapat menjaga keterlibatan *mitra kerja* pada triwulan I 2025. Hal ini tercermin pada persepsi positif-netral dari mayoritas *mitra kerja* terhadap pesan yang dikomunikasikan Bank Indonesia melalui berbagai kanal.

PS 12 Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola aset fisik dan aset sistem informasi yang terintegrasi dengan pengadaan dan pengelolaan program untuk mendukung pencapaian kinerja kelembagaan optimal

Bank Indonesia terus melakukan penguatan pengelolaan sumber daya dan pengelolaan program dalam rangka mencapai kinerja kelembagaan yang modern, produktif,

dan efektif. Pesatnya perkembangan teknologi digital menuntut Bank Indonesia untuk mempercepat digitalisasi proses bisnis kebijakan dan kelembagaan dengan tetap menjaga tata kelola yang baik dan profesional. Hal tersebut dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan inovasi dan informasi digital, yang didukung oleh sarana dan prasarana modern serta pengelolaan program yang bertata kelola secara baik.

Sepanjang triwulan I 2025, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka merencanakan, mengembangkan, dan mengelola aset fisik dan aset sistem informasi yang terintegrasi dengan pengadaan dan pengelolaan program untuk mendukung pencapaian kinerja kelembagaan optimal sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

38) Tercapainya *Service Excellent* melalui Manajemen Aset Fisik yang Terintegrasi, Modern, dan Digital

Bank Indonesia memastikan ketersediaan berbagai inovasi dan teknologi serta layanan digital yang *agile*, *resilient*, dan *intelligent* untuk senantiasa mendukung transformasi pada area kebijakan dan kelembagaan. Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia terus menyediakan layanan kelogistikan yang berkualitas untuk aplikasi BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI, BI-ETP, dan BI-FAST. Penyediaan layanan kelogistikan telah dilakukan secara optimal yang tecermin pada kualitas layanan yang memenuhi standar Bank Indonesia. Bank Indonesia senantiasa menjaga ketersediaan sarana sumber daya energi melalui pemeliharaan infrastruktur berupa kelistrikan dan sistem pendinginan.

Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan PLN dan Pelaksana Operasional Pemeliharaan sebagai upaya dalam mendukung layanan kelogistikan. Hal ini dicapai antara lain dengan memastikan ketersediaan daya listrik secara kontinu 24/7 serta memastikan kualitas tegangan dan frekuensi listrik dicapai secara optimal melalui instalasi peralatan pendukung kelistrikan pada aplikasi kritikal dan kecukupan ketersediaan solar untuk mendukung peralatan *backup*. Di sisi lain, Bank Indonesia turut menjalin kemitraan strategis dengan PLN, Pertamina, dan mitra kerja lainnya guna memastikan kualitas layanan listrik pada aplikasi kritikal serta peralatan *backup* selalu dalam kondisi yang prima sehingga mendukung operasionalisasi aplikasi dapat berjalan 24/7.

39) Terwujudnya aset teknologi digital yang berkualitas melalui penerapan manajemen aset yang terstandar dan tingkat layanan yang optimal

Bank Indonesia senantiasa berupaya dalam menjaga tingkat keandalan, *availability*, dan keamanan sistem informasi melalui asesmen *Information Technology Service Management (ITSM)* dan *Cyber Security*. Dalam rangka mencapai hal tersebut, pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah melakukan implementasi digitalisasi Bank Indonesia pada beberapa area, yaitu konsepsi perancangan untuk pengembangan digitalisasi DMP melalui sistem DWP di area perumusan kebijakan (RDG Bulanan) dan pelaksanaan kebijakan (RDG Mingguan), bersama dengan perumusan konsepsi penggunaan data pada area tersebut. Selain itu juga tengah dilakukan pengembangan pada beberapa sistem, khususnya di area layanan kas tunai, pengelolaan Produk OM *Pro Market*, serta sistem-sistem lainnya.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia telah mempersiapkan berbagai upaya dalam menjaga tingkat maturitas *Information Technology Service Management (ITSM)* dan tingkat maturitas *Cyber Security* pada skala yang optimal. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui *monitoring* dan peningkatan kapasitas layanan dalam rangka menjaga ketersediaan layanan digital secara berkala serta memastikan tingkat kepuasan atas penggunaan aset teknologi digital yang telah dikembangkan Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia melakukan penguatan *cyber security* secara komprehensif melalui proses review, evaluasi, serta perbaikan terhadap sistem keamanan siber, dan pelaksanaan pengembangan inovasi digital dan inovasi data telah berjalan sesuai rencana.

40) Terwujudnya pengadaan yang berkualitas untuk mendukung pengelolaan aset dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia secara konsisten memperkuat tata kelola pengadaan melalui pengukuran *Procurement Maturity Assessment (PMA)* yang dilaksanakan oleh pihak eksternal menggunakan model *Procurement Excellent Plus*. Model tersebut menilai kematangan fungsi pengadaan secara holistik mencakup dimensi strategi, operasional, organisasi, dan teknologi. Pada 2024, Bank Indonesia berhasil menjaga level maturitas pengadaan di level *strategic* dan *proactive* pada berbagai aspek penilaian. Penilaian *strategic* pada aspek strategi, operasional, dan organisasi mencerminkan pengelolaan pengadaan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis kinerja. Sementara itu, penilaian *proactive* pada aspek teknologi menunjukkan kemajuan dalam pemanfaatan teknologi secara optimal dalam mendukung proses pengadaan.

Pada triwulan I 2025, Bank Indonesia melakukan penyusunan strategi dan rencana kerja *Procurement Maturity Assessment* (PMA) tahun 2025 sebagai bagian dari kegiatan asesmen tahunan untuk menilai tingkat maturitas pengadaan di Bank Indonesia. Upaya penguatan maturitas pengadaan Bank Indonesia tahun 2025 akan difokuskan pada aspek sistem informasi dengan pendekatan digitalisasi yang selaras dengan transformasi kelembagaan dan arah strategis Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia telah menindaklanjuti rekomendasi penguatan dan tindak lanjut dari asesmen rekomendasi PMA tahun sebelumnya, terutama pada area *key drivers* melalui

penguatan pengelolaan hubungan penyedia (*supplier relationship management*) dan implementasi *modern strategic sourcing* untuk mendorong pencapaian sasaran maturitas secara menyeluruh. Selanjutnya, dalam mendukung pengadaan yang bertata kelola, Bank Indonesia menerapkan penguatan koordinasi antar satuan kerja dalam rangka penyelesaian pengadaan strategis sesuai rencana sebagaimana strategi 3S+I (simplifikasi, standardisasi, sistemisasi, dan integrasi) pada area pengadaan serta melalui *monitoring* berkala melalui laporan pengadaan yang dilakukan secara periodik.





Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

LAMPIRAN



DAFTAR ISTILAH

Daftar Istilah

ISTILAH	PENJELASAN
3I	Integrasi, interkoneksi, interoperabilitas yang menggambarkan bentuk keterhubungan antarinfrastruktur pasar keuangan.
3-Smart	Program kepemimpinan Bank Indonesia untuk menciptakan pemimpin yang profesional yang memiliki kompetensi (<i>book smart</i>), berpengalaman (<i>street smart</i>), dan memiliki perilaku mulia (<i>spiritual smart</i>).
<i>Advanced Release Calendar</i>	Sistem yang digunakan untuk menjadwalkan dan merilis informasi penting atau data ekonomi sebelum tanggal rilis resmi.
<i>Agile</i>	Kemampuan untuk bergerak cepat dan mudah
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
Bauran Kebijakan Bank Indonesia	Integrasi kebijakan secara dinamis yang saling melengkapi dan memperkuat antarkebijakan utama, yakni kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan system pembayaran, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung untuk memperoleh kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.
Bauran Kebijakan Kelembagaan	Penggunaan beberapa kebijakan pada area kelembagaan dengan basis kinerja efektif, efisien, dan kepatuhan/ <i>compliance</i> . Hal ini diperlukan sebagai langkah dalam memastikan keseimbangan antara memastikan tercapainya mandat Bank Indonesia melalui kinerja yang efektif dengan upaya mendorong produktivitas sumber daya secara efisien, serta memastikan ketaatan hukum dan akuntabilitas melalui tata kelola yang baik.
BI-FAST	Layanan sistem pembayaran yang dilakukan secara <i>real time</i> dan 24/7, yang mempercepat proses penyelesaian transaksi dan akan menggantikan SKNBI.
BI-Payment Clear dan BI-Payment Info	Infrastruktur untuk mendeteksi anomali transaksi dan potensi fraud di sektor keuangan.
Bank Indonesia – <i>Real-Time Gross Settlement</i>	Sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
Bank Indonesia- <i>Scripless Securities Settlement System</i>	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
<i>Blueprint</i>	Kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja.
<i>Business matching</i>	Temu bisnis antarpelaku ekonomi.

ISTILAH	PENJELASAN
Cadangan devisa	Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
Central Bank Digital Currency	Mata uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal.
Central Clearing	Mekanisme penyelesaian transaksi keuangan yang dikelola oleh CCP untuk mengurangi risiko gagal bayar, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan efisiensi pasar.
Central Counterparty	Lembaga kliring yang mengambil alih risiko <i>counterparty</i> dari transaksi antar pelaku pasar melalui proses novasi dan melakukan multilateral <i>netting</i> atas eksposur transaksi para pelaku pasar.
Collaborative Workplace	Lingkungan kerja yang menekankan kerja sama tim, komunikasi terbuka, dan teknologi pendukung untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, serta efisiensi.
Composability	Kemampuan berbagai komponen atau aplikasi keuangan untuk saling berintegrasi dan beroperasi bersama.
Contagion Analysis	Analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana krisis keuangan, kejutan pasar, atau risiko tertentu menyebar dari satu entitas atau sektor ke sektor lainnya dalam sistem ekonomi atau keuangan.
Countercyclical Capital Buffer (CCyB)	Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (<i>buffer</i>) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (<i>excessive credit growth</i>) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Counterparty Line	Jumlah kredit atau limit eksposur yang diberikan oleh satu pihak kepada <i>counterparty</i> dalam transaksi keuangan.
Cross Border	Lintas batas, lintas negara.
Cyber Library	Perpustakaan digital yang memungkinkan akses cepat dan luas ke berbagai sumber akademik dan literatur melalui internet, mendukung pembelajaran dan riset modern.
Cyber Patrol	Sistem atau layanan pemantauan keamanan siber yang bertugas mengawasi, mendeteksi, dan merespons ancaman siber secara proaktif.
Dana Pihak Ketiga	Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada perbankan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Data-driven Institution	Organisasi atau lembaga yang mendasarkan pengambilan keputusan dan strateginya pada analisis data.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Data Lake</i>	Tempat penyimpanan data mentah dalam jumlah besar yang fleksibel dan digunakan untuk analisis lanjutan seperti <i>Big Data</i> , AI, dan <i>machine learning</i> .
<i>Data Preparation</i>	Proses menyiapkan data mentah agar lebih bersih, terstruktur, dan siap digunakan dalam analisis atau machine learning, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan efektif.
<i>Data Repository Loader</i>	Proses atau alat yang digunakan untuk memuat data ke repositori penyimpanan (seperti <i>Data Warehouse</i> atau <i>Data Lake</i>) dengan memastikan integritas, efisiensi, dan kesiapan data untuk analisis atau kebutuhan bisnis.
<i>Data Visualization</i>	Penyajian data dalam bentuk visual agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif.
<i>Dedicated Meeting</i>	Pertemuan yang secara khusus diadakan untuk membahas satu topik atau tujuan tertentu dengan fokus penuh, tanpa gangguan dari agenda lain.
Derivatif	Instrumen turunan yaitu kontrak, perjanjian, atau transaksi yang nilainya diturunkan dari suatu instrumen keuangan.
Destinasi Pariwisata Super Prioritas	Destinasi wisata yang diprioritaskan untuk dikembangkan tahun 2019-2024, antara lain Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
Devisa	Sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.
Devisa Hasil Ekspor	Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.
Digital BPR	Pendekatan komprehensif untuk mendesain ulang dan mengoptimalkan proses bisnis berbasis digital dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan beradaptasi, antara lain mencakup aspek pengambilan keputusan, manajemen informasi, <i>digital environment</i> , dan pola kerja.
Digitalisasi	Proses alih media dari bentuk fisik, tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital.
<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>	Transaksi derivatif standar (<i>plain vanilla</i>) berupa transaksi <i>forward</i> yang dilakukan dengan mekanisme <i>fixing</i> dan mata uang penyelesaiannya dalam Rupiah.
<i>Dynamic Systemic Risk Surveillance</i>	Kerangka pengawasan yang bersifat <i>forward looking</i> dan terintegrasi dengan mempertimbangkan seluruh informasi pengawasan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia.
<i>E-commerce</i>	Transaksi perdagangan secara <i>online</i> atau menggunakan teknologi internet.
Ekonomi digital	Ekonomi yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Ekonomi dan keuangan hijau	Sistem ekonomi dan keuangan yang mendukung upaya menjaga dan memperhatikan aspek lingkungan dan/atau iklim.
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain.
<i>Electronic Trading Platform</i>	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.

ISTILAH	PENJELASAN
Elektronifikasi	Mengubah cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai.
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.
<i>Employee Value Proposition</i>	Nilai tambah yang ditawarkan pegawai dan sebagai imbalan atas kontribusi terhadap perusahaan.
<i>End-to-end</i>	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif.
<i>Epicentrum of Change</i>	Titik utama atau pusat dari suatu perubahan besar yang berdampak luas dalam ekonomi, teknologi, sosial, atau pemerintahan.
Festival Ekonomi Syariah (FESyar)	Kegiatan sejenis Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang berskala regional dan nasional serta merupakan kegiatan <i>road to</i> ISEF.
<i>Financial Market Infrastructure</i>	Sistem multilateral antar lembaga peserta (langsung), termasuk operator sistem, yang digunakan untuk kliring atau pencatatan pembayaran, surat berharga, derivatif, atau transaksi keuangan lainnya.
<i>Financing to Value</i>	Rasio pembiayaan yang diberikan bank terhadap nilai aset.
<i>Forward looking</i>	Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda/ <i>time lag</i> kebijakan moneter.
Generasi Y (Milenial)	Penduduk yang lahir antara periode tahun 1981–1996.
Generasi Z	Penduduk yang lahir antara periode tahun 1997–2012.
<i>Hedging</i>	Kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber risiko.
HLM	<i>High Level Meeting</i>
Industri Halal	Industri yang sejalan dengan kriteria kehalalan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri.
<i>Imported Inflation</i>	Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang yang berasal dari luar negeri akibat dampak perubahan nilai tukar.
<i>Indirect Clearing</i>	Mekanisme kliring di mana peserta pasar yang tidak memiliki akses langsung ke Central Counterparty (CCP) menggunakan perantara (<i>clearing member</i>) untuk menyelesaikan transaksi mereka.
IndONIA	Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu <i>overnight</i> di Indonesia.
Inflasi	Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (<i>cost-push</i>) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (<i>demand-pull</i>).

ISTILAH	PENJELASAN
Inflasi inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen <i>volatile foods</i> dan <i>administered prices</i> .
Infrastruktur Pasar Uang	Sistem multilateral antar lembaga peserta (langsung), termasuk operator sistem, yang digunakan untuk kliring atau pencatatan pembayaran, surat berharga, derivatif, atau transaksi keuangan lainnya
Integrasi	Penyatuan infrastruktur <i>post trade</i> dalam satu institusi yang sama untuk rantai nilai (<i>value chain</i>) layanan transaksi.
Interkoneksi	Kemampuan antarsistem bertukar informasi atau bertransaksi membutuhkan perantara, atau dengan kata lain interkoneksi antar sistem terjadi secara tidak langsung.
Interoperabilitas	Kemampuan dua sistem untuk berkomunikasi atau bertransaksi secara langsung.
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
<i>Investor Outreach</i>	Strategi atau upaya untuk menjangkau, berkomunikasi, dan menarik investor potensial agar tertarik berinvestasi dalam aset, proyek, atau instrumen keuangan tertentu.
Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)	Acara tahunan Bank Indonesia yang berskala nasional dan internasional dan terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu <i>Sharia Economic Forum</i> dan <i>Sharia Fair</i> . Kegiatan forum terdiri dari seminar/ <i>workshop</i> , sedangkan <i>Sharia Fair</i> merupakan <i>outlet</i> bagi pelaku usaha industri halal, pesantren, Lembaga keuangan, dan lembaga terkait.
<i>Joint Audit</i>	Proses audit keuangan yang dilakukan oleh dua atau lebih firma audit secara bersamaan untuk menilai laporan keuangan suatu entitas.
Keuangan digital	Keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau <i>web</i> melalui pihak ketiga.
Keuangan inklusif	Suatu bentuk pendalaman layanan keuangan untuk masyarakat bawah untuk dapat memanfaatkan produk keuangan formal.
Klaster	Kelompok usaha yang saling berhubungan atau sentra UMKM.
<i>Lead the Market</i>	Memimpin dalam industri atau segmen tertentu dengan inovasi, keunggulan kompetitif, atau strategi yang lebih unggul dibandingkan pesaing.
Likuiditas	Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.
<i>Loan to Value</i>	Rasio pinjaman yang diberikan bank terhadap nilai aset.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Local Currency Bilateral Swap Agreement</i>	Bentuk kerja sama keuangan bilateral yang lazim dilakukan oleh bank sentral, yang memungkinkan suatu bank sentral untuk mendapatkan valuta asing dari bank sentral mitra dengan cara saling mempertukarkan mata uang lokal masing-masing negara, untuk kemudian dipertukarkan Kembali pada saat jatuh tempo yang telah disepakati.
<i>Local Currency Transaction</i>	Transaksi bilateral antar dua negara dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, untuk mendiversifikasi <i>currency exposure</i> .
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.
<i>Market Maker</i>	Pihak yang secara aktif menyediakan likuiditas dengan menawarkan harga beli (bid) dan harga jual (ask) dalam transaksi pasar uang.
<i>Merchant Discount Rate</i>	Tarif yang dikenakan kepada <i>merchant</i> oleh bank.
Mikroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan Lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya.
<i>Modern Strategic Sourcing</i>	Pendekatan strategis dalam pemilihan dan manajemen pemasok yang mengutamakan efisiensi, inovasi, keberlanjutan, dan teknologi untuk meningkatkan nilai bisnis serta mengoptimalkan rantai pasok.
<i>Money Market Curve</i>	Kurva yang menggambarkan hubungan antara tenor (jangka waktu) dan suku bunga instrumen pasar uang.
<i>Nazhir</i>	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
<i>National Driven</i>	Pendekatan atau strategi yang berfokus pada tujuan, kepentingan, dan prioritas suatu negara, dengan dorongan kuat dari pemerintah atau institusi nasional untuk mencapai visi atau target tertentu.
Neraca Pembayaran Indonesia	Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.
<i>Net inflows</i>	selisih antara total kontribusi atau pembelian baru (inflows) dan total penarikan atau penjualan (outflows) dari suatu investasi atau entitas.
<i>Non Performing Loan</i>	Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet.
<i>Online</i>	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.
Operasi Moneter	Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (<i>Standing Facilities</i>).

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Outstanding</i>	Jumlah yang masih berjalan, beredar, atau belum lunas dalam suatu instrumen keuangan.
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki <i>buffer</i> likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) Rupiah.
Penanaman Modal Asing	Kegiatan memasukkan modal atau investasi baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain untuk melakukan kegiatan usaha atau mengelola operasi perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal baik secara total atau sebagian.
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki <i>buffer</i> likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) Rupiah.
<i>Portfolio Inflows</i>	Investasi portofolio yang dilakukan oleh bukan penduduk Indonesia di Negara Indonesia
<i>Price Discovery</i>	Proses pembentukan harga yang mencerminkan nilai wajar suatu aset berdasarkan interaksi antara penjual dan pembeli di pasar.
<i>Primary Dealer</i>	Institusi yang disetujui oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk berpartisipasi dalam pembelian dan penjualan obligasi pemerintah secara langsung dari pemerintah.
<i>Pro-growth</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
<i>Pro-stability</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi.
<i>Programmability</i>	Kemampuan sistem keuangan untuk membuat kontrak dan instruksi keuangan yang dapat dijalankan secara otomatis sesuai aturan yang telah ditetapkan sebelumnya
<i>Project Based</i>	Pendekatan kerja yang berfokus pada penyelesaian program dengan tim khusus, batas waktu tertentu, dan hasil yang terukur.
Proyek Garuda	Sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) Indonesia yang kemudian disebut Rupiah Digital.
<i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>	Standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
QRIS Cross Border/Lintas Negara	Salah satu inisiatif kolaboratif untuk membangun standardisasi infrastruktur setelmen untuk perdagangan lintas batas.
QRIS Tap NFC	Sistem pembayaran berbasis teknologi <i>Near Field Communication</i> (NFC) yang memungkinkan pengguna cukup mendekatkan ponsel ke terminal pembayaran tanpa perlu memindai QR code secara manual.

ISTILAH	PENJELASAN
Rasio Intermediasi Makroprudensial	Penyempurnaan kebijakan GWM LFR yang dilakukan dengan memperluas komponen intermediasi, yakni menambahkan surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki bank sebagai komponen pembiayaan. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, antara lain: diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat setara dengan peringkat investasi.
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial	Penyempurnaan dari kebijakan rasio kredit UMKM antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain dalam rangka memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif
<i>Regional Payment Connectivity (RPC)</i>	Perjanjian kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan yang disepakati oleh Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Banko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand.
<i>Regulatory Reform</i>	Proses perubahan, penyempurnaan, atau penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas kebijakan dalam suatu sektor atau industri.
<i>Repurchase Agreement (Repo)</i>	Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.
Rupiah Digital	Bentuk digital mata uang Rupiah.
<i>Sandbox</i>	Uji coba terbatas dalam lingkungan yang terkontrol sebelum sistem atau fitur baru diterapkan secara luas.
<i>Seamless</i>	Sistem atau proses yang berjalan lancar, otomatis, dan tanpa hambatan.
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	Surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan <i>underlying asset</i> berupa surat berharga milik Bank Indonesia.
Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI)	Surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan <i>underlying asset</i> berupa surat berharga dalam valuta asing milik Bank Indonesia.
Sistem Pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.
<i>Sovereign Credit Rating</i>	Peringkat utang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. <i>Sovereign Credit Rating</i> mengindikasikan tingkat resiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut.
<i>Spot</i>	Transaksi valuta asing dengan penyelesaian pada hari yang sama atau maksimal dalam dua hari.

ISTILAH	PENJELASAN
Standar Nasional <i>Open API</i> Pembayaran (SNAP)	Standar Nasional <i>Open API</i> Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif; mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran; dan/atau meningkatkan praktik pasar (<i>market practice</i>) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
<i>Straight-through</i>	Pemrosesan otomatis yang dilakukan dalam transaksi bisnis
<i>Streamlining</i>	Peningkatan efisiensi suatu proses tertentu dalam suatu organisasi
<i>Stress test</i>	Uji ketahanan.
Sukuk	Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah.
Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI)	Sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan <i>underlying asset</i> berupa surat berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
<i>Supervisory Technology</i> (Suptech)	Penggunaan teknologi inovatif oleh lembaga pengawas untuk mendukung implementasi fungsi pengawasan.
<i>Supplier Relationship Management</i>	Strategi dan proses yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pemasok secara efektif, dengan tujuan meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi risiko, dan menciptakan nilai tambah dalam bisnis.
Surat Berharga Negara	Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Surat Utang Negara	Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
<i>Swap</i>	Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.
Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (<i>stakeholder</i>) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.
Tokenization	Proses digitalisasi aset nyata menjadi token yang dapat diperdagangkan di blockchain.
Transformasi kelembagaan	Transformasi yang mencakup penguatan organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta digitalisasi.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Triple Intervention</i>	Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar <i>spot</i> , penyediaan likuiditas valuta asing terkait instrumen lindung nilai melalui DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder guna menjaga kecukupan likuiditas Rupiah.
Uang Elektronik	Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetorkan terlebih dahulu.
Uang Layak Edar	Uang Rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
<i>Underlying Asset</i>	Aset yang menjadi dasar dari instrumen finansial atau investasi.
<i>Unique Identifier</i>	<i>String</i> numerik atau alfanumerik yang dikaitkan dengan satu entitas dalam sistem.
<i>Volatile Food</i>	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh <i>shocks</i> (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
Wajar Tanpa Pengecualian	Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
<i>Waste to Energy</i>	Proses mengubah limbah menjadi energi yang dapat dimanfaatkan, seperti listrik, panas, atau bahan bakar.
<i>White Paper</i>	Laporan atau panduan yang ditulis secara mendalam untuk menginformasikan secara ringkas tentang suatu permasalahan dan solusinya.
<i>Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger</i>	Sistem pencatatan digital berbasis ledger untuk transaksi Rupiah Digital dalam skala wholesale.
<i>Yield</i>	Imbal hasil.

DAFTAR SINGKATAN

ISTILAH	PENJELASAN
3I	Integrasi, Interkoneksi, Interoperabilitas
3S	Simplifikasi, Standardisasi, dan Sistemisasi
3T	Terdepan, Terluar, dan Terpencil
3P + 1I	<i>Product, Pricing, Pelaku dan Infrastruktur</i>
4P	Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan, Pemeliharaan
AB3	Aku Bangga BI Bermakna
ACC-BIS	The Council dari Asian Consultative Council – Bank for International Settlement
ACCD	<i>Appointed Cross Currency Dealers</i>
AI	Artificial Intelligence
AL	Alat Likuid
AL/DPK	Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga
APUVINDO	Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia
APU PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASPI	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
ATL	<i>Above The Line</i>
ATM	<i>Automated Teller Machine/ Anjungan Tunai Mandiri</i>
ATM/D	<i>Automated Teller Machine/Deposit.</i>
BTL	<i>Below The Line</i>
BBWI	Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja

ISTILAH	PENJELASAN
BIDIC	Bank Indonesia-Digital Innovation Center
BI-ETP	Bank Indonesia – <i>Electronic Trading Platform</i>
BI-FAST	Bank Indonesia – <i>Fast Payment</i>
BI-RTGS	Bank Indonesia – <i>Real Time Gross Settlement</i>
BI-SSSS	Bank Indonesia- <i>Scripless Securities Settlement System</i>
BIS	Bank for International Settlements
BKBI	Bauran Kebijakan Bank Indonesia
BKK	Bauran Kebijakan Kelembagaan
BNM	Bank Negara Malaysia
BoP	<i>Balance of Payments</i>
BoT	Bank of Thailand
BP2MI	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPPU	<i>Blueprint Pengembangan Pasar Uang</i>
BPR	Business Process Reengineering
BSBI	Badan Supervisi Bank Indonesia
BSP	Bangko Sentral ng Pilipina
BSPI	<i>Blueprint Sistem Pembayaran</i>
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
BUSN	Bank Umum Swasta Nasional
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CBDC	<i>Central Bank Digital Currency</i>
CBUAE	Bank Sentral Uni Emirat Arab
CCP	<i>Central Counterparty</i>

ISTILAH	PENJELASAN
CCyB	<i>Countercyclical Capital Buffer</i>
CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CP	<i>Consultative Paper</i>
CPIS	<i>Coordinated Portfolio Investment Survey</i>
DC	Data Center
DMP	<i>Decision Making Process</i>
DNDF	<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPSP	Destinasi Pariwisata Super Prioritas
DSRS	<i>Dynamic Systemic Risk Surveillance</i>
DWP	Digital Workplace Platform
EKD	Ekonomi Keuangan Digital
EMEAP	Executives Meeting of East Asia Pacific Central Banks
ERB	Ekspedisi Rupiah Berdaulat
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
ETP	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
ETPD	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
EVP	<i>Employee Value Proposition</i>
FAQ	<i>Frequently Asked Question</i>
FATF	Financial Action Task Force
FEB	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
FEKDI	Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia
FFR	<i>Fed Funds Rate</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>

ISTILAH	PENJELASAN
FK-PPPK	Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan
FSAP	<i>Financial Sector Assessment Program</i>
FSI	<i>Financial Soundness Indicators</i>
G20	Group of Twenty
GBBI	Gerakan Bangga Buatan Indonesia
GEBER PK	Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen
GFXC	Global Foreign Exchange Committee
GIRU	<i>Global Investor Relation Unit</i>
GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional
IIP	International Investment Position
IKKAT	Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi
IKN	Ibu Kota Nusantara
IKNB	Institusi Keuangan Non-Bank
IKRA	Industri Kreatif Syariah
IKU	Indikator Kinerja Utama
IMF	International Monetary Fund
IN2MOTION Fest	Indonesia International Modest Fashion Festival
IPK	Infrastruktur Pasar Keuangan
IndONIA	Indonesia Overnight Index Average
INDRA	<i>Integrated Analytic Data Repository and Analytic</i>
INFRATANI	Integrated Farming with Information Technology and Society
IRFCL	<i>International Reserves and Foreign Currency Liquidity</i>

ISTILAH	PENJELASAN
IRU	<i>Investor Relation Unit</i>
IHT	<i>In House Training</i>
ISDA	<i>International Swaps and Derivatives Association</i>
ISEF	<i>Indonesia Sharia Economic Festival</i>
ISO	International Organization of Standardization
ITSK	Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (inovasi teknologi sistem keuangan)
ITSM	<i>Information Technology Service Management</i>
JIBOR	<i>Jakarta Interbank Offered rate</i>
JKD	Jaringan Komunikasi Data
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
K/L	Kementerian/Lembaga
KCBA	Kantor Cabang Bank Asing
KKI	Karya Kreatif Indonesia
KKI	Kartu Kredit Indonesia
KKI	Kerja Sama Keuangan Internasional
KKKM	Kerangka Kerja Kebijakan Moneter
KKMP	Kerangka Kerja Kebijakan Makroprudensial
KKSP	Kerangka Kerja Sistem Pembayaran
KLM	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
KOPERBI	Komplek Perkantoran Bank Indonesia
KSK	Kajian Stabilitas Keuangan
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUPVA BB	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

ISTILAH	PENJELASAN
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LCT	<i>Local Currency Transaction</i>
LGA	Listrik-Gas-Air
LKTBI	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LMS	<i>Learning Management System</i>
LNPR	Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LRUK	Limbah Racik Uang Kertas
LSB	Lembaga Selain Bank
LU	Lapangan Usaha
MAS	Monetary Authority of Singapore
MBG	Makanan Bergizi Gratis
MDR	<i>Merchant Discount Rate</i>
ME FATF	<i>Mutual Evaluation by the Financial Action Task Force</i>
MKTBI	Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia
ML	<i>Machine Learning</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MuBI	Museum Bank Indonesia
MRBI	Manajemen Risiko Bank Indonesia
NCCD	<i>Non Centrally Cleared Derivative</i>
NK	Nota Kesepahaman
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	<i>Non Performing Loan</i>
NWGBR	<i>National Working Group on Benchmark Reform</i>

ISTILAH	PENJELASAN
UMI	Usaha Mikro
UMi	Ultramikro
OECD	<i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
OG	<i>Operational Guidelines</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OM	Operasi Moneter
P2DD	Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
P2SK	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PCPM	Pendidikan Calon Pegawai Muda
PDB	Produk Domestik Bruto
PDG	Peraturan Dewan Gubernur
Perpres	Peraturan Presiden
Pemda	Pemerintah Daerah
PFMI	<i>Principles for Financial Market Infrastructures</i>
PII	Posisi Investasi Internasional
PIP	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran
PJP	Penyedia Jasa Pembayaran
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PMA	<i>Procurement Maturity Assessment</i>
PMK	Program Meningkatkan Kompetensi
PMK	Protokol Manajemen Krisis

ISTILAH	PENJELASAN
PPSPM	Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
PoC	<i>Proof of Concept</i>
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSP	Penyelenggara Sistem Pembayaran
PUR	Pengelolaan Uang Rupiah
PUVA	Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
PQN	Pekan QRIS Nasional
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
QRIS TUNTAS	QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai
RAFI	Ramadhan dan Idul Fitri
RDG	Rapat Dewan Gubernur
Repo	<i>Repurchase Agreement</i>
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RIRU	<i>Regional Investor Relation Unit</i>
RPC	<i>Regional Payment Connectivity</i>
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
RPLN	Rasio Pendanaan Luar Negeri
RRH	Rata-Rata Harian
SBC	<i>Structured Bilateral Cooperation</i>
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
SBN	Surat Berharga Negara
SBV	State Bank of Vietnam
SDM	Sumber Daya Manusia
SEKDA	Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah
SEKI	Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia

ISTILAH	PENJELASAN
SERAMBI	Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri
SIAPIK	Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan
Simkrisnas	Simulasi Krisis Nasional
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SNAP	Standar Nasional <i>Open API</i>
SPBI	Sistem Pembayaran Bank Indonesia
SPIP	Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia
SP-PUR	Sistem Pembayaran-Pengelolaan Uang Rupiah
SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SSKI	Statistik Sistem Keuangan Indonesia
STP	Straight Through Processing
SULNI	Statistik Utang Luar Negeri Indonesia
<i>SupTech</i>	<i>Supervisory Technology</i>
SUVBI	Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia
SVBI	Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia
<i>Threshold RPLN</i>	<i>Threshold</i> Rencana Pembiayaan Langsung Nasional
TIKMI	Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi

ISTILAH	PENJELASAN
ToT	<i>Training of Trainer</i>
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPIP	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
UE	Uang Elektronik
UGM	Universitas Gajah Mada
UI	Universitas Indonesia
ULE	Uang Layak Edar
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UPB	Uang Pecahan Besar
UPK	Uang Pecahan Kecil
UU	Undang-Undang
UU P2SK	Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UYD	Uang Kartal Yang Diedarkan
Valas	Valuta Asing
VITAL	<i>Visualizing the outcomes, Theory understood, Algorithm fitted, dan Learn the meaning</i>
VF	<i>Volatile Food</i>
WB	World Bank
WTE	<i>Waste to Energy</i>
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
yoy	<i>Year on Year</i>





Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350
www.bi.go.id